

**UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN SEKTOR PARIWISATA
DI KABUPATEN MOJOKERTO**

(Studi Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

JONI MAJA'ALI

NIM. 0310313052-31



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMERINTAH DAERAH
2007

MOTTO

**Negara tidak membutuhkan Orang yang gila akan gelar tetapi
Negara hanya Membutuhkan Orang yang mau menyumbangkan
Ilmunya untuk Negarannya**

#

**Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mau menata
administrasinya dan mengerti akan rakyatnya**

#

**Kadang kita tidak mensyukuri apa yang telah dimiliki tetapi
selalu menyesali apa yang belum tercapai**

(J & U)



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
(FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE)

Jl. Mayjen Haryono No. 163 Malang 65145; Telp. (0341) 553737,
568914, 556703 dan 551611 Pes. 205 fax (0341) 553737; E-mail :
fia@brawijaya.ac.id

Program Studi : • S1 Adm. Publik • S1 Adm. Bisnis • DIII Kesekretariatan • DIII
Pariwisata
• Magister Ilmu Administrasi Publik & Bisnis • S3 Ilmu Administrasi

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan didepan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 14 Desember 2007
Jam : 10.00 WIB
Skripsi atas nama : Joni Maja'ali
Judul : Upaya Peningkatan Pendapatan Sektor Pariwisata Di
Kabupaten Mojokerto (Studi Pada Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto).

dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Dr. Imam Hanafi, S.Sos, M.Si

Ketua

Drs. Minto Hadi, M.Si

Anggota

Dr. Bambang Supriyono, M.S

Anggota

Wike, S.Sos, M.Si

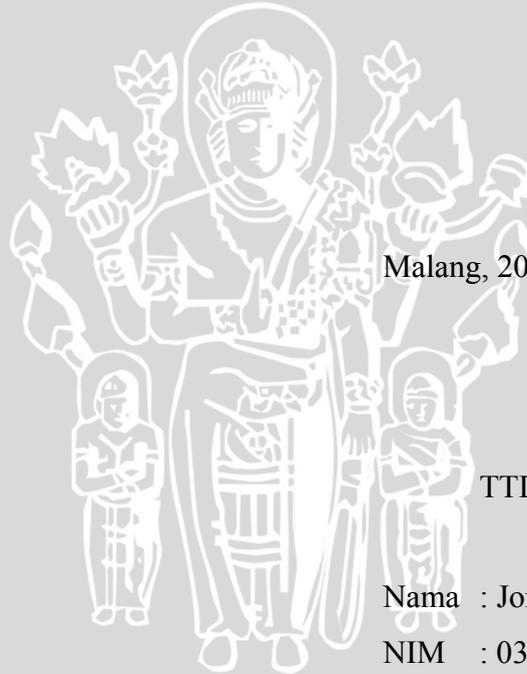
Anggota



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di dalam naskah skripsi ini dapat di buktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)



Malang, 20 Januari 2008

TTD

Nama : Joni Maja'ali

NIM : 0310313052

RINGKASAN

Joni Maja'ali, 2007, Upaya Peningkatan Pendapatan Sektor Pariwisata Kabupaten Mojokerto Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto), Nama Pembimbing Utama Dr. Imam Hanafi, S.Sos, MSi, Pembimbing Pendamping Drs. Minto Hadi, MSi, 118 hal + xiii.

Pada dasarnya keinginan pemerintah untuk meningkatkan dan mengembangkan sektor pariwisata pada suatu negara atau daerah adalah dalam rangka menggali dan meningkatkan nilai-nilai ekonomi khususnya pada peningkatan penerimaan negara disatu peningkatan penerimaan daerah disisi lain sebagai akibat adanya orang-orang yang melakukan perjalanan wisata di negara atau daerah tersebut. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor dengan bahan baku yang tidak pernah habis dengan sifatnya dapat diperbaharui "*renewable*" yang membedakannya dengan sektor-sektor lain dengan bahan baku yang terbatas. Dengan demikian dapat diketahui bahwa peningkatan sektor pariwisata sebagai suatu industri menimbulkan manfaat ekonomi yang besar terhadap sektor-sektor lainnya. Karena itu pada dasarnya peningkatan dan pengembangan akan menimbulkan dampak berganda. Dimana pariwisata yang sangat luas akan menjadi pendorong bagi pengembangan sektor-sektor lain, sehingga dengan peningkatan pariwisata diharapkan dapat memberikan sumbangan yang besar terhadap sumber penerimaan pendapatan khususnya pada peningkatan pendapatan asli daerah di samping terhadap penerimaan pendapatan masyarakat dalam rangka mendorong lajunya proses pembangunan.

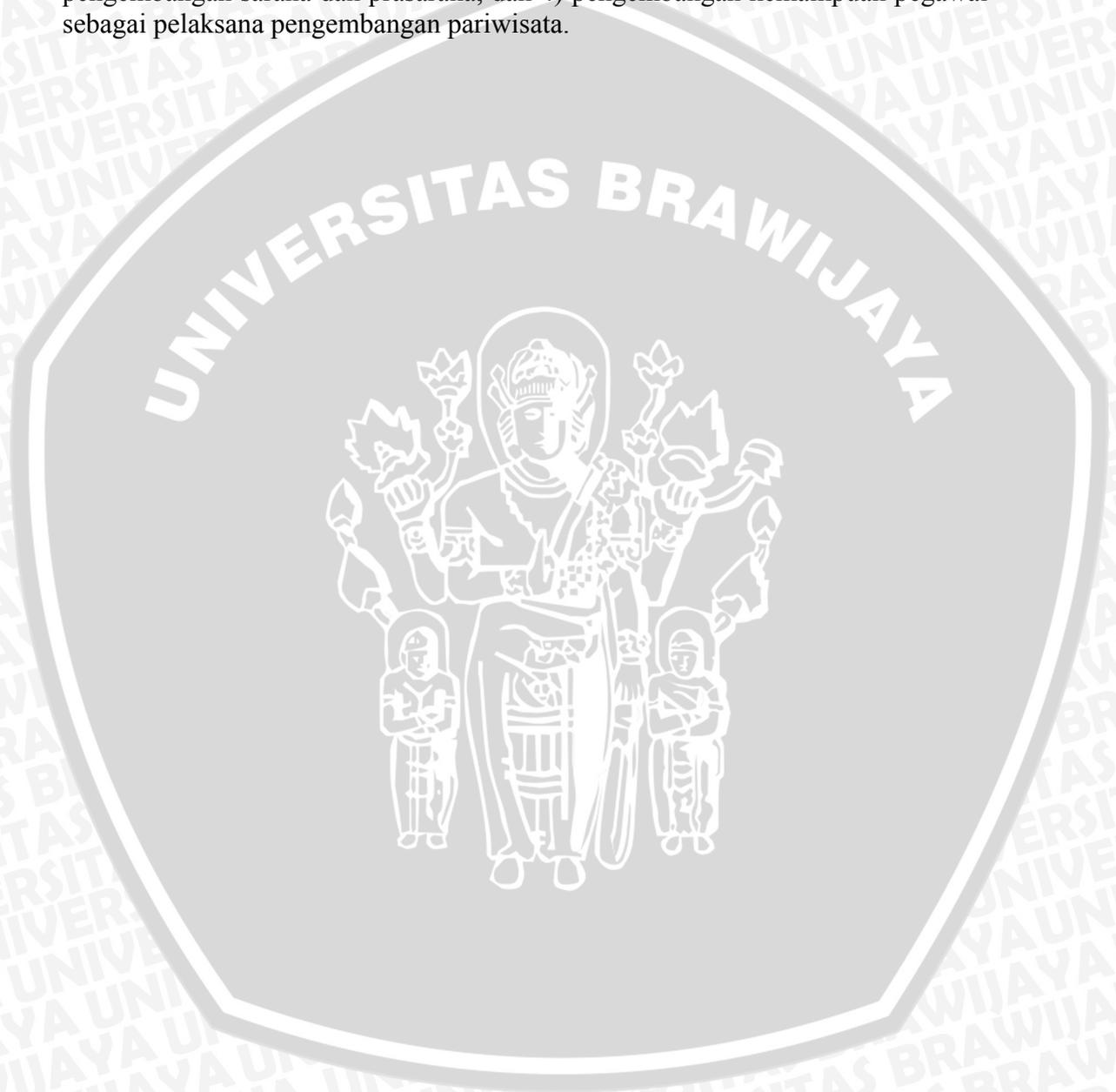
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mojokerto, untuk mengetahui kendala dalam peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mojokerto, dan untuk menganalisis upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam meningkatkan PAD dari Sektor Pariwisata. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yang digunakan dalam suatu penelitian untuk memperoleh gambaran secara kualitatif dan akan menghasilkan data secara deskriptif melalui uraian. Adapun tahapan analisis dalam penelitian ini adalah : reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

Analisis menunjukkan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari retribusi obyek wisata tahun 2004 sebesar 2,24%, tahun 2005 sebesar 2,19%, dan tahun 2006 sebesar 2,31%. Sedangkan rata-rata kontribusi pendapatan dan sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mojokerto selama tiga tahun terakhir (2004-2006) yaitu sebesar 2,25%.

Kontribusi sektor pariwisata dalam PAD Kabupaten Mojokerto kecil disebabkan: 1) adanya keterbatasan dana yang tersedia, 2) kualitas pelaksana pengembangan pariwisata masih rendah, 3) fasilitas jalan menuju obyek wisata masih kurang dari standar karena terlalu sempit sehingga tidak bisa buat simpangan, dan 4) pengemasan produk wisata masih kurang. Meskipun demikian ada faktor pendukung dalam pengembangan pariwisata yaitu: 1) kondisi alam

yang sejuk dengan berbagai pemandangan dan panorama yang indah, 2) fasilitas penginapan yang memadai, 3) wewenang yang dimiliki pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pengembangan pariwisata, dan 4) adanya potensi pariwisata seni dan budaya.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan pengembangan sektor pariwisata yaitu dengan: 1) peningkatan pemasaran dan promosi wisata, 2) pengembangan obyek dan daya tarik wisata, 3) pengembangan sarana dan prasarana, dan 4) pengembangan kemampuan pegawai sebagai pelaksana pengembangan pariwisata.



SUMMARY

Joni Maja'ali, 2007, Effort Of Make-Up Of Income Of Sector Tourism Sub-Province Of Mojokerto As One Of The Source Of Basic Income Of Area (Study At On Duty Tourism And Culture Sub-Province Mojokerto), Name of Especial Counselor Dr. Imam Hanafi, S.Sos, MSi, Co Counselor Drs. Minto Hadi, MSi, 118 page + xii.

Governmental basically want to increase and develop the tourism sector at one particular state or area in order to dig and improving economic values. That effort focus on make-up of state acceptance one make-up of area acceptance on the other side as effect is traveling existence of people who do the journey tour in the area or state. Tourism sector represent one of the sector with the raw material that has character "renewable" which different with the other sector by the limited raw material. Thereby, the tourism sector is an industry to generate the big economics benefit of other to sector. In consequence basically improvement and development will generate the double impact. From that case the government can take several efforts to increase the tourism sector such as using basic strategy to increase marketing and promotion of tourism sectors. And the steps to get that purpose are by introducing the tourism products as far as it can. Second, is make the product interesting to attract the tourists, and the last is by offer a great message clearly. If the Sub-Province of Mojokerto is able to do it successfully so it will bring good effects in improvement of the tourists that visited the tourism object and also will increasing the income of Sub- province of Mojokerto.

The purpose of this research is to analysis the contribution of tourism sector for The Basic Income of Area of Sub-Province of Mojokerto, to know the problem of tourism contribution sector to Basic Income of Area of Sub-Province of Mojokerto, and to analysis the effort on duty Tourism and Culture in improving PAD from Tourism Sector. Method Analysis which is used in this research is to through analysis qualitative. Qualitative analyzes method which is used in a research to obtain, get picture qualitative and will yield data descriptively through description. As for step analyze in this research is education data, data of presentation, and take conclusion or verification.

The analysis shows the result which indicate that the tourism sector contribute for the income of obtained Genuine Area of retribution of object year tour 2004 equal to 2,24%, year 2005 equal to 2,19%, and year 2006 equal to 2,31%. While income contribution mean and tourism sector to Basic Income of Area in Sub-Province of Mojokerto during three the last year (2004-2006) that is equal to 2,25%.

Contribution of tourism sector in PAD Sub-Province Mojokerto is not significant caused 1) Availability of fund is low 2) quality of executor of tourism development low 3) the facilities to go to the tourism object are less than standard because the way is too narrow so it cannot make the deviation, and 4) packaging of tourism product still less. Nevertheless there is supplementary factor in tourism development that is 1) condition of cold nature by various beautiful panorama and view 2) adequate lodging facility 3) authority had by the local government to

carry out the tourism development, and 4) existence of cultural and artistic tourism potency.

The effort that was doing by Government of Sub-Province Mojokerto in improving development of tourism sector that is by 1) make-up of marketing and promotion tourism 2) development of object and fascination tourism 3) facilities and basic facilities development, and 4) development officer ability as tourism development executor.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Upaya Peningkatan Pendapatan Sektor Pariwisata Kabupaten Mojokerto (Studi Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto).

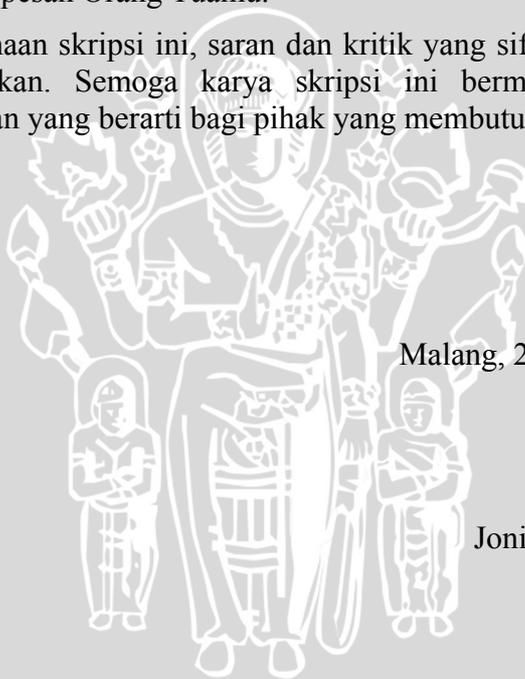
Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

- 1) Kedua orang tuaku Yusa Maja'ali & Sri Hastustik yang kusayangi, atas doa dan dukungannya yang tak ternilai bagi penulis. Ku persembahkan hasil karyaku untuk kedua orang tuaku yang telah mendidik untuk menjadikanku seorang sarjana. Sembah sujud dan karyaku kupersembahkan padamu.
- 2) Bapak Dr. Imam Hanafi, S.Sos, MSi, selaku Dosen Pembimbing I yang telah dengan sabar memberikan arahan, masukan, bimbingan dan waktu kepada penulis, dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- 3) Bapak Drs. Minto Hadi, MSi, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dalam mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi.
- 4) Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Administrasi khususnya Jurusan Administrasi Publik yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Jurusan Administrasi Publik.
- 5) Kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Mojokerto beserta staf yang dengan senang hati telah mengizinkan penulis melakukan penelitian serta memberikan nasehat-nasehat kepada penulis.
- 6) My Family, My Sister: Endang. S (Udin,Civas & Farell) and My brother's Rahmad Hidayat, Mamiku Siti Maja'ali, Nenekku Satu-satunya Djarmi dan semua saudara-saudaraku yang tak bisa aku sebutkan semuanya Terima Kasih atas Doa-doanya yang telah diberikan.
- 7) Terima kasih juga Ku persembahkan kepada Om Nono & Tante Toetik Yang Telah Ku anggap sebagai Orang Tuaku sendiri & Terima Kasih juga telah mengijinkanku berteduh di Istana BCT i2/19 selama menempuh Sarjana, Om Nanang (Yik) Thank'\$ Saran-sarannya & Teman-teman seperjuanganku baik yang sudah lulus & blm: Sindhu &(Ade Dita Marisa), Indro, Nino, Davis, Septa, Dani, Okyk, Singgih, Cicik ayo semangat untuk menempuh gelar sarjananya.

- 8) Teman-teman Seperjuangan Kampus FIA **Publik**'03: Dani, Errik, Cak Na, Hariman, Aan (Cebook) Andri, Aneeta, Sisca, Karolin, Amy, Pipit, Elis, Ika Reog, Nita Persik, Ririn, Lita, Wiwin, Septian, Musa, Rita, Sadat, Johan reog, Yanuar, Novan, Fefen, Fatah, Dwe Yosi, Beni Bali, Havid, Dito, Dite, Zendi, Mbah Jhon, Carles, Dino, DISMA'05 & 06, Dll. **Bisnis**: Roni Rijek, Erik Tolenk, Jayanti, Putro, Vinka, Eka Sapie, Mbah, Dewa, Dll. **Kantin Soto FIA**: Pedro Sofi, Yoyok Sofi, Goendoel Parkir, Dan Semua Orang yang pernah mempengaruhi Hidupku selama di Malang yang tak bisa Kusebutkan Semuanya Thank'\$ atas persahabatannya selama di Kota Malang "Kita Semua Saudara".
- 9) Sengaja Kupersembahkan paling terakhir Sang Inspirasi Hidup yang cukup banyak membantu penulis" My Lupy (Ningtias Wulandari' Bastra'05)" Terima Kasih atas Perhatiannya & kasih sayang yang telah di berikan kepadaku. "Maaf kalo slama ini aku selalu egois sama km dan nggak pernah mau mengalah & satu yang Ku minta darimu: "Jagalah kepercayaan yang telah kuberikan kepadamu". Yang rajin kuliahnya ya biar cepat lulus dan ingat selalu pesan-pesan Orang Tuamu.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.



Malang, 20 Januari 2008

Joni Maja'ali

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	i
TANDA PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
RINGKASAN	iv
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kontribusi Penelitian	7
1.5 Sistematika Pembahasan	8
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Administrasi Publik	9
2.2 Administrasi Pemerintahan Daerah	10
2.3 Otonomi Daerah	12
2.4 Pariwisata	13
2.4.1 Pengertian Pariwisata	13
2.4.2 Jenis-jenis Pariwisata	18
2.4.3 Peranan Industri Pariwisata	21
2.4.4 Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Pariwisata	23
2.5 Pengembangan Pariwisata	26
2.5.1 Pengertian Pengembangan Pariwisata	26
2.5.2 Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata	26
2.5.3 Kontribusi Sektor Pariwisata Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	28
2.5.4 Upaya Efektivitas Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Guna Meningkatkan Pendapatan	42
2.5.5 Kerangka Pemikiran	43
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	44
3.2 Fokus Penelitian	45
3.3 Lokasi dan Situs Penelitian	45
3.4 Jenis dan Sumber Data	46
3.5 Teknik Pengumpulan Data	46
3.6 Instrumen Peneliti	47
3.7 Analisis Data	47

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian	49
4.1.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
4.1.2	Potensi Pariwisata Kabupaten Mojokerto	53
4.1.3	Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	54
4.1.4	Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto	72
4.1.5	Personalia	73
4.1.6	Tujuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto	76
4.2	Penyajian Data	
4.2.1	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mojokerto	76
4.2.2	Kendala Peningkatan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mojokerto	78
4.2.3	Upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Meningkatkan PAD dari Sektor Pariwisata	81
4.3	Analisa Data dan Interpretasi	96
4.3.1	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mojokerto	96
4.3.2	Kendala Peningkatan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mojokerto	99
4.3.3	Upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Meningkatkan PAD dari Sektor Pariwisata	101
BAB 5 PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	115
5.2	Saran	115

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Obyek Wisata Alam di Kabupaten Mojokerto	54
2. Obyek Wisata Purbakala di Kabupaten Mojokerto	55
3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto Eselon Kepegawaian	74
4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto Golongan Kepegawaian	74
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto Tingkat Pendidikan	75
6. Realisasi PAD dari Sektor Pariwisata Per Jenis Pendapatan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2004 – 2006	77
7. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD Tahun 2004 – 2006	78
8. Sarana Hotel dan Penginapan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2007	88
9. Rumah Makan atau Restoran di Kabupaten Mojokerto Tahun 2007	91
10. Perkembangan Prasarana Kesehatan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2007	95



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Kerangka Pemikiran	43
2. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto	71

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Ijin Penelitian	118
2. Tempat/Lokasi Penelitian	119



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Serangkaian pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia hakekatnya merupakan pembangunan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pembangunan yang dilaksanakan meliputi seluruh kehidupan masyarakat mulai aspek politik, sosial, ekonomi budaya. Serta pertahanan dan keamanan.

Untuk mendukung pembangunan nasional agar merata diseluruh wilayah Indonesia, maka Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan kelelusaan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. yang mana pemerintah telah mengeluarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang menitik beratkan pada pelaksanaan otonomi daerah dengan menetapkan asas desentralisasi pada daerah propinsi, daerah Kabupaten dan daerah kota dengan menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab. Mengingat besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki bagi pengembangan sektor pariwisata di Indonesia dan didaerah khususnya sebagai salah satu sektor yang prospektif pada masa yang akan datang.

Lebih lanjut seperti yang telah diungkapkan oleh Yoeti (1997:64), sebagai akibat lebih jauh dari pengembangan sektor pariwisata ternyata memberi dampak terhadap perekonomian dinegara/daerah yang dikunjungi. Adapun dampak yang dimaksud antara lain adalah:

- 1) Memberikan kesempatan kerja atau dapat memperkecil pengangguran.
- 2) Meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah.

- 3) Meningkatkan pendapatan nasional (*National Income*)
- 4) Memberikan efek multiplier dalam perekonomian setempat.

Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan, pada dasarnya keinginan pemerintah untuk meningkatkan dan mengembangkan sektor pariwisata pada suatu negara atau daerah adalah dalam rangka menggali dan meningkatkan nilai-nilai ekonomi khususnya pada peningkatan penerimaan negara disatu peningkatan penerimaan daerah disisi lain sebagai akibat adanya orang-orang yang melakukan perjalanan wisata di negara atau daerah tersebut.

Pariwisata sangatlah tepat bila menjadi salah satu komoditi prospektif yang dianggap potensial untuk dikembangkan di masa yang akan datang untuk dapat berperan dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara dan pendapatan daerah khususnya, guna menunjang pelaksanaan proses pembangunan.

Mengingat bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang tidak pernah habis yang sifatnya dapat diperbaharui "*renewable*" yang membedakannya dengan sektor-sektor lain dengan bahan baku yang terbatas. Dengan demikian dapat diketahui bahwa peningkatan sektor pariwisata sebagai suatu industri menimbulkan manfaat ekonomi yang besar terhadap sektor-sektor lainnya. Karena itu pada dasarnya peningkatan dan pengembangan akan menimbulkan dampak berganda. Dimana pariwisata yang sangat luas akan menjadi pendorong bagi pengembangan sektor-sektor lain, sehingga dengan peningkatan pariwisata diharapkan dapat memberikan sumbangan yang besar terhadap sumber penerimaan pendapatan khususnya pada peningkatan pendapatan asli daerah di samping terhadap penerimaan pendapatan masyarakat dalam rangka mendorong lajunya proses pembangunan.

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan dalam menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh pemberian dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antara propinsi dengan Kabupaten atau kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintah daerah yang diatur oleh Undang-undang no. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membawa perubahan yang mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah

Dalam hubungannya dengan kemampuan keuangan daerah, pemerintah daerah tidak dapat menjalankan fungsinya dengan efektif dan efisien apabila tidak disertai dengan biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Aspek keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga dapat mensejahterakan masyarakat di daerahnya.

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang diperoleh dan dipungut berdasarkan peraturan daerah (Perda) sesuai peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah dikatakan ideal apabila mampu memberikan kontribusi terbesar di seluruh pendapatan daerah lainnya. Dengan komposisi keuangan yang seperti ini mencerminkan semakin luasnya daerah menjalankan kewenangan otonominya dan begitu juga sebaliknya dengan terbatasnya kontribusi yang diberikan menunjukkan rendahnya kemampuan otonomi daerah itu sendiri.

Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang salah satunya bersumber dari sektor pariwisata. Dengan alasan bahwa negara kita mempunyai kekayaan dan keindahan alam yang berbeda-beda antar daerah. Sehingga masing-masing daerah memiliki potensi dan karakteristik yang beraneka ragam yang menjadikan daerah tersebut memiliki ciri khas tersendiri.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat James J. Spillane (1994:57) yang menyatakan bahwa:

Pengembangan sektor pariwisata disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: pertama, karena makin berkurangnya peranan minyak sebagai penghasil devisa jika dibandingkan waktu lalu. Kedua, prospek pariwisata yang memperlihatkan kecenderungan masyarakat secara konsisten. Ketiga, karena besarnya potensi pariwisata yang dimiliki oleh daerah-daerah di Indonesia.

Dalam hal ini sektor pariwisata memiliki peran yang sangat penting dalam mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah untuk itu yang mempunyai wewenang dalam menangani sektor pariwisata ini adalah pemerintah daerah masing-masing. Diharapkan pemerintah daerah tersebut mampu mengembangkan semua potensi pariwisata yang ada dengan semaksimal mungkin karena dirasakan

akan memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pendapatan daerah utamanya yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pariwisata dituntut lebih aktif melakukan pembinaan dan pengkoordinasian kepada seluruh jajaran industri pariwisata di daerah. Oleh karena itu dalam upaya pengembangan pariwisata diperlukan peran aktif masyarakat karena pada akhirnya pengembangan pariwisata akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, kesadaran dan peran aktif masyarakat dapat di tingkatkan melalui peningkatan dan pembinaan kelompok sadar wisata, seni budaya, industri kerajinan. Sebagai langkah selanjutnya diperlukan adanya tindakan dan upaya dari pemda secara aktif untuk mengembangkan potensi pariwisata.

Dalam pengembangan sektor pariwisata, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yang diharapkan dapat memacu keberhasilan program pariwisata yang sedang dikembangkan yaitu sapta kebijakan pariwisata. Adapun tujuh butir sapta kebijakan pariwisata (Mussanef, 1995:37) : “1) promosi digencarkan, 2) aksesibilitas diperluas, 3) mutu produk dan pelayanan dimantapkan, 4) kawasan pariwisata dikembangkan, 5) wisata bahari digalakkan, 6) sumber daya manusia ditingkatkan, 7) sadar wisata dibudayakan.”

Pengembangan sektor pariwisata diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan pendapatan masyarakat di sekitar daerah obyek wisata. Dengan semakin berkembangnya sektor pariwisata akan memperluas kesempatan kerja dan mendorong berkembangnya industri penunjang kegiatan pariwisata. Sektor pariwisata membuka lapangan kerja sehingga banyak menyerap tenaga kerja mulai dari kegiatan transportasi, akomodasi dan perhotelan, sampai penyediaan makanan dan air minum, serta biro perjalanan dan sebagainya.

Pengembangan sektor pariwisata memberikan banyak keuntungan karena manfaat yang dihasilkan cukup besar. Tetapi di sisi lain pengembangan sektor pariwisata juga dapat menimbulkan dampak negatif apabila tidak direncanakan dan dikelola dengan baik.

Menyadari adanya pengaruh yang ditimbulkan sektor pariwisata, maka pengembangan sektor pariwisata memerlukan strategi perencanaan yang terpadu dan menyeluruh dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki serta harus

mendapatkan dukungan dari semua pihak baik dari pemerintah, swasta, atau dari masyarakat sendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat Selo Sumarjan dalam Spillane (1987:133) yang menyatakan bahwa:

Pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan yang terencana, secara menyeluruh baik dari segi ekonomi, sosial, budaya. Perencanaan tersebut mengintegrasikan pengembangan pariwisata kedalam pembangunan ekonomi, fisik, sosial dari suatu negara. Di samping itu rencana tersebut harus mampu memberikan kerangka kerja kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong dan mengendalikan pengembangan pariwisata.

Dari segi kemasyarakatan sektor pariwisata perlu dikembangkan agar usaha yang bertujuan baik itu tidak mendatangkan kekecewaan karena perkembangan pariwisata yang pesat akan menimbulkan dan tidak menutup kemungkinan akan membawa dampak sosial yang tidak diinginkan.

Pengembangan sektor pariwisata mempertimbangkan dampak dari berbagai aspek sehingga memerlukan strategi yang terpadu dengan pola pengembangan pariwisata yang terencana secara menyeluruh. Kabupaten Mojokerto melaksanakan otonomi daerah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah yang salah satunya bersumber dari sektor pariwisata. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto adalah dengan mengembangkan sektor lain yang terkait dengan kegiatan ini, diharapkan dapat mengembangkan dan pemeratakan kesempatan berusaha dan bekerja terutama bagi masyarakat setempat.

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki banyak potensi pariwisata baik itu wisata alam maupun wisata budaya oleh karena itu pemerintah Kabupaten Mojokerto melakukan usaha pengembangan pariwisata. Adapun potensi pariwisata yang dimaksud adalah wisata alam yang terdiri dari: Pemandian Air Panas Padusan Pacet, Pemandian Ubalan, Cuban Canggung, Air Terjun Dlundung, Waton Mas Jedog, Cek Dam Kemlagi, Api Alam Bekucuk, Puncak Trawas, Bagagan Lima. Sedangkan wisata budaya terdiri dari Arca Reco Lanang, Petirtan Jolotundo, Candi Bajang Ratu, Candi Tikus, Candi Wringin Lawang, Kolam Segaran, Makam Troloyo, Museum Trowulan. Disekitar obyek wisata tersebut banyak terdapat pula penginapan (hotel), villa, dan rumah makan terutama di daerah pegunungan yaitu kawasan Pacet dan Trawas.

Menurut Hadi Sutrisno (Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto), Kabupaten Mojokerto memiliki potensi pariwisata yang cukup besar. Sektor pariwisata juga menjadi penyumbang pendapatan asli daerah yang cukup besar dengan penghasilan kurang lebih Rp 820 juta pertahun. Hanya pengembangannya harus dilakukan bertahap mengingat anggaran yang tersedia sangat terbatas. Namun dengan adanya bencana yang terjadi beberapa waktu lalu, tak dapat disangka bahwa pariwisata di Kabupaten Mojokerto mendapat pukulan berat. Padahal pemerintah menargetkan pada tahun 2003 pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata setidaknya mencapai satu milyar rupiah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Mojokerto akan mengalihkan pengembangan pariwisata ke kawasan lain. Salah satu yang dianggap berpotensi adalah kawasan trowulan yang terkenal dengan situs peninggalan Kerajaan Majapahit (Kompas, 17/03/2004).

Pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto saat ini menambahkan pengembangan pariwisata di kawasan trowulan dengan menggali potensi yang ada. Program yang sedang dilakukan sekarang adalah pembangunan fasilitas pendukung obyek wisata situs-situs kerajaan majapahit dan mendirikan sejumlah kios-kios dikawasan obyek wisata serta melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan pengunjung. Dengan harapan program tersebut dapat menarik para wisatawan untuk berkunjung yang akhirnya dapat meningkatkan pemasukan pendapatan asli daerah.

Dalam peningkatan pendapatan sektor pariwisata pemerintah Kabupaten Mojokerto harus memperhatikan peningkatan sarana dan prasarana, pengembangan obyek pariwisata serta mengadakan promosi pariwisata tetapi dalam penyelenggaraan semua itu belum berhasil dengan baik.

Mengingat begitu pentingnya peran sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, maka peneliti mengadakan penelitian di Kabupaten Mojokerto dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut memiliki banyak potensi obyek pariwisata yang potensial untuk dikembangkan akan tetapi kontribusi yang di berikan sektor pariwisata kepada pendapatan asli daerah sangat kecil setelah terjadinya bencana alam yang menghancurkan sektor pariwisata andalannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mojokerto?
- 2) Apa saja kendala dalam peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mojokerto?
- 3) Bagaimana upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam meningkatkan PAD dari Sektor Pariwisata?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menganalisis kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mojokerto.
- 2) Untuk mengetahui kendala dalam peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mojokerto.
- 3) Untuk menganalisis upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam meningkatkan PAD dari Sektor Pariwisata.

1.4 Kontribusi Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari pelaksanaan penelitian ini adalah :

- 1) Aspek Praktis
Sebagai bahan pertimbangan bagi departemen pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Mojokerto dalam merumuskan strategi pemasaran.
- 2) Aspek Teoritis
Sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi pihak lain yang ingin meneliti pada masalah yang sama guna pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Administrasi Pemerintahan Daerah.

1.5 Sistematika Pembahasan

BAB 1 Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB 2 Tinjauan pustaka, berisi tentang teori-teori atau pendapat ahli yang berkaitan dan menunjang penulisan skripsi. Disini dijelaskan mengenai administrasi publik, administrasi pemerintahan daerah, otonomi daerah, pariwisata yang terdiri dari pengertian pariwisata, jenis-jenis pariwisata, peranan industri pariwisata, pengembangan obyek dan daya tarik pariwisata, dan diakhiri dengan pengembangan pariwisata yaitu meliputi pengertian pengembangan pariwisata, peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata, kontribusi sektor pariwisata dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dan upaya efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan pendapatan.

BAB 3 Metode penelitian, membahas tentang jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.

BAB 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, potensi pariwisata Kabupaten Mojokerto, gambaran umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, visi dan misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto, personalia, tujuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto, kemudian dilanjutkan dengan penyajian data, dan analisa data dan interpretasi tentang kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto, kendala peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto dan upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam meningkatkan PAD dari Sektor Pariwisata.

BAB 5 Penutup, berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang disertai dengan saran yang diberikan kepada instansi terkait.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Administrasi Publik

Sistem administrasi negara yang diterapkan di seluruh dunia. Jumlahnya hampir sama dengan banyaknya negara atau bangsa yang ada (Pamudji, 1983:9). Bahkan dalam satu sistem administrasi Negara masih dijumpai pula subsistem dari suatu kelompok masyarakat tertentu atau dari suatu bagian wilayah Negara tertentu. Nampak disini terdapat hubungan antara administrasi negara dan administrasi daerah.

Pada tahun 50-an, sekelompok ilmuwan politik dan administrasi Negara mulai menyadari bahwa memindahkan begitu saja sistem dan lembaga - lembaga atau pranata politik dan administrasi negara dari Negara tertentu ke Negara lain tidak tepat. Hasil analisa ilmu-ilmu sosial sosial lainnya seperti misalnya sosiologi, antropologi, ekonomi dan lainnya memperkuat pendapat bahwa apa yang baik di negara tertentu belum tentu baik di negara lain. Pengalaman membuktikan bahwa bantuan teknis dari negara-negara maju ke negara berkembang dengan menerapkan asas, dalil dan bahkan teori administrasi negara yang telah terbukti berhasil di negara maju, ternyata tidak demikian halnya di negara berkembang.

Menurut Fred W. Riggs (dalam Pamudji 1983:11), dengan mempelajari ekologi administrasi negara, dapat diketahui ciri-ciri suatu sistem administrasi negara dari suatu masyarakat, bangsa dan negara tertentu dan selanjutnya dapat pula dipahami mengapa dalam suatu masyarakat, bangsa dan negara itu tumbuh dan berkembang sistem administrasi negara tersebut.

Menurut Sondang P. Siagian (1992:2), administrasi berarti, "keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan." Sedangkan administrasi publik adalah "keseluruhan kegiatan yang dilakukan seluruh aparatur pemerintahan dan suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan negara."

Pengertian Administrasi Publik menurut Felix A. Nigro (dalam Pamudji 1983:22-23):

- 1) Adalah suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan
- 2) Meliputi ketiga cabang pemerintahan, eksekutif, yudikatif dan legislative dan hubungan ketiganya
- 3) Mempunyai peran penting dalam perumusan kebijakan umum / Negara dan oleh karenanya merupakan bagian proses politik
- 4) Dalam beberapa hal berbeda dengan administrasi privat.
- 5) Sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan dari administrasi publik sendiri menurut Siagian (1984:30-32) antara lain adalah:

- 1) Meningkatkan kemakmuran rakyat, terlepas dari system politik dan perekonomian yang dianut oleh suatu Negara, semua Negara modern mengatakan semua negara itu adalah “*welfare slate*”
- 2) Pemerintahan wajib melayani warganya dengan perlakuan sama.

Perkembangan administrasi negara di Indonesia mulai nyata tumbuh dan berkembang setelah tahun 1945, ketika Indonesia merdeka dan sistem administrasi negara milik Indonesia sendiri. Masa perkembangan seterusnya dimulai pada tahun 1954, pemerintah Indonesia mendatangkan suatu putusan dan Amerika Serikat untuk meneliti mengenai administrasi kepegawaian. Perutusan tersebut diketuai Edward H Lictfield dengan dibantu oleh Alan C. yang kemudian memberikan rumusan saran kepada RI yang diberi judul “*Training Administration of Indinesia*” (Miftah Thoha,1986:41-42). Salah satu isi dan saran - saran tersebut adalah perlu adanya lembaga pendidikan administrasi di Indonesia, kemudian pemerintah menindaklanjuti dengan mendirikan Lembaga Administrasi Negara di Jakarta. Mulai itulah perkembangan administrasi negara mulai difikirkan dan direncanakan.

2.2 Administrasi Pemerintahan Daerah

Pengertian pemerintah menurut Finer yang dikutip Pamudji (1983:5) menyatakan bahwa istilah *government* (yang dapat mempunyai arti pemerintah dan pemerintahan) paling sedikit mempunyai 4 arti :

- 1) Menunjukkan proses kegiatan atau proses memerintah, yaitu melaksanakan atas pihak lain.
- 2) Menunjukkan masalah - masalah Negara dalam nama kegiatan / proses diatas dijumpai.
- 3) Menunjukkan orang - orang (pejabat) yang dibebani tugas untuk memerintah.

- 4) Menunjukkan cara, metode / situasi di dalam suatu masyarakat tertentu.

Secara etimologi, Pamudji (1983:3) menyebutkan bahwa asal kata dan pemerintahan adalah pemerintah, sedangkan asal kata dan pemerintah adalah perintah : 1) Perintah; adalah perkataan yang dimaksud menyuruh melakukan sesuatu, 2) Pemerintah, adalah kekuasaan memerintah suatu Negara, 3) Pemerintahan; adalah suatu perbuatan memerintah.

Menurut UU No. 32 tahun 2004 Pemerintah Daerah pasal 1 menyebutkan Pemerintah Daerah adalah penyelenggara pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sedangkan yang dimaksud Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur pemerintahan daerah.

Dengan dianutnya sistem desentralisasi di Indonesia, maka dibentuk daerah otonom, yaitu dengan melimpahkan sebagian wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sehingga daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri. Setiap daerah harus memiliki prakarsa-prakarsa dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Prakarsa-prakarsa ini menyangkut kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan maupun pemenuhan perangkat pelaksana, termasuk juga dalam hal pembuatan kebijakan-kebijakan dan peraturan untuk daerah sebagai wujud otonomi daerah.

Dengan adanya pelimpahan sebagian wewenang dari pusat ke daerah, dikenal beberapa istilah yaitu dekonsentrasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Berdasarkan Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Desentralisasi sendiri mempunyai arti penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil dari pemerintah kepada instansi vertical di wilayah tertentu.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dan pemerintah kepada daerah dan desa dari pemerintah propinsi kepada kabupaten/kota dan desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

2.3 Otonomi Daerah

Istilah otonomi daerah di dalamnya mengandung dua unsur kata yaitu Otonomi dan daerah. Secara etimologis perkataan otonomi berasal dari “auto” yang berarti sendiri dan “nomos” yang berarti aturan. Menurut Abdurahman (1997:9) arti peraturan sendiri dan pemerintahan sendiri sebagaimana dikemukakan “Mula-mula otonomi atau berotonomi berarti mempunyai peraturan sendiri atau mempunyai hak atau wewenang untuk membuat peraturan sendiri, sering disebut juga sebagai hak atau kekuasaan atau wewenang.”

Pengertian Otonomi Daerah menurut Undang-Undang No 32 tahun 2004 adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Otonomi Daerah harus dapat meningkatkan Kemandirian Daerah. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan otonomi daerah didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dalam pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan Kekuasaan Pusat dan Daerah.

Di samping itu menurut Undang-undang no 32 pasal 22 tahun 2004, dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban :

- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat ;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi ;
- d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan ;
- e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan ;
- f. Menyediakan fasilitas pelayanan pendidikan
- g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak ;
- h. Mengembangkan sistem jaminan sosial ;
- i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah ;
- j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah ;
- k. Melestarikan lingkungan hidup ;
- l. Mengelola administrasi kependudukan ;
- m. Melestarikan nilai sosial budaya
- n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya ; dan
- o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sehingga di sini jelas terlihat bahwa dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintahan daerah akan sangat mandiri dalam melakukan pembangunan di

segala bidang. Dengan itu pemerintah pusat telah melaksanakan “*steering rather than rowing*” artinya pemerintah pusat hanya merumuskan kebijakan makro yang bersifat pengendalian (*stering*), sedangkan urusan yang kecil-kecil (*rowing*) untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah, perencanaan dan pelaksanaan (pemanfaatan anggaran) diserahkan kepada daerah.

2.4 Pariwisata

2.4.1 Pengertian Pariwisata

Indonesia adalah negara yang sedang berkembang atau membangun yang mana membutuhkan banyak biaya guna pembangunan bangsa, sedangkan hanya mengharapkan hasil, migas dan industri tidak mencukupi dan tidak akan cepat maju seperti negara-negara tetangga, oleh karena itu pemerintah telah menyanangkan komoditi non migas yang berupa even-even pariwisata, yang mana mana dikenal masyarakat baru mulai pada awal tahun 1960-an dan akhir-akhir ini menjadi pokok pembicaraan dalam halnya kalayak ramai.

Pariwisata saat ini menjadi titik perhatian bangsa Indonesia karena merupakan salah satu lading devisa yang dapat diandalkan jika dibenahi dengan tepat. Kaum modal banyak yang berpindah ke dunia industri pariwisata, industri tanpa polusi udara meskipun rawan polusi budaya. Para pendidik mendirikan sekolah-sekolah kepariwisataan, baik akademik atau perguruan tinggi.

Kepariwisataan (*tourism*) diartikan sebagai salah satu kegiatan usaha melayani serta memenuhi keinginan dan kebutuhan orang yang sedang melakukan perjalanan (*traveler*).

Wujudnya berupa penyediaan dan pelayanan sejumlah fasilitas promosi, perencanaan perjalanan, transportasi dan penyediaan daerah tujuan wisata yang menarik dan menyenangkan. Termasuk didalamnya fasilitas yang dibutuhkan untuk menginap, istirahat, makan dan minum serta rekreasi.

Kata pariwisata sebenarnya baru populer di Indonesia setelah diselenggarakannya Musyawarah Nasional *Tourisme* II di Tretes, Jawa Timur pada tanggal 12 sampai dengan 14 Juni 1959. sebelumnya kata pari menggunakan istilah kata “*Tourism*” yang berasal dari bahasa Belanda. Seiring dengan perkembangan di bidang sosial ekonomi, sosial budaya dan teknologi. Maka bentuk pariwisata berkembang menjadi suatu kegiatan yang bersifat lebih

komplek, sehingga pada akhir abad 19 pariwisata merupakan suatu bentuk industri modern.

Lebih spesifik lagi, pengertian pariwisata dinyatakan secara jelas dan tegas melalui Undang-Undang No 9 Tahun 1990 dalam Mussanef (1995:13) bahwa “pariwisata adalah segala sesuatu berhubungan dengan wisata termasuk pengusaha obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.”

Yoety (1990:109) memberikan definisi pariwisata sebagai berikut :

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha (*business*) atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna pertamasaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.

Menurut Suwanto (1997:3) bahwa pengertian pariwisata adalah sebagai berikut :

Pariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain seperti sekedar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun untuk belajar.

Pariwisata sebagai ilmu merupakan kegiatan normal (fikiran, perasaan) manusia mengenal berbagai hal atau sesuatu apa saja termasuk pariwisata (Nyoman S. Pendit, 1994:2).

Pariwisata tidak hanya menarik wisatawan dalam negeri tetapi mancanegara (luar negeri). Untuk itu perlu diambil langkah-langkah dan penganturan yang lebih terarah berdasarkan kebijaksanaan terpadu antara lain dibidang promosi, penyediaan fasilitas, serta mutu kelancaran pelayanan serta pembinaan pengembangan pariwisata dalam negara untuk ditujukan kepada pengenalan budaya bangsa dan tanah air Indonesia.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, pariwisata tersebut pada dasarnya mengandung lima unsur yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Adapun lima unsur yang dimaksud adalah: unsur manusia (wisatawan), unsur kegiatan (perjalanan), unsur motivasi (menikmati), unsur sasaran (obyek dan daya tarik wisata) dan unsur usaha. Di samping itu faktor-faktor yang harus ada dalam batasan definisi pariwisata adalah sebagai berikut :

1) Perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu

- 2) Perjalanan itu dilakukan dari satu tempat ke tempat lainnya.
- 3) Perjalanan itu, walaupun apa bentuknya, harus selalu dikaitkan dengan bertamasyaan atau rekreasi.
- 4) Orang yang melakukan perjalanan tersebut tidak mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya dan semata-mata sebagai konsumen di tempat tersebut.

Salah satu ciri kepariwisataan adalah bahwa produk yang tersedia harus diberi dan dinikmati oleh wisatawan ditempat produk tersebut disajikan, sehingga ada jarak antara tempat produk luista (*destinasion*) dengan pasar wisata (*market*) atau sebaliknya produk wisata tidak bisa di bawah ke pasar wisata. Karena adanya jarak tersebut maka diperlukan strategi pengelolaan secara sistematika yang dapat menjembatani antara produk wisata dengan pasar wisata yang pada akhirnya produk yang disajikan dapat memenuhi kebutuhan atau memuaskan bagi wisatawan (RS. Damardjati, 1991:1).

Secara nyata dikatakan bahwa yang mendorong seorang untuk melakukan perjalanan wisata adalah keadaan di daerah tujuan, baik karena keindahan alam, peninggalan sejarah, seni budaya daerah yang di tuju. Berdasarkan alasan tersebut maka untuk lebih menarik minat wisatawan datang kesuatu daerah, maka obyek-obyek wisata yang menjadi tujuan wisata tersebut harus dikembangkan. Untuk itu perlu dipikirkan bagaimana upaya pengembangan terhadap daerah wisata tersebut agar wisatawan yang akan datang akan lebih lama tinggal pada daerah tujuan wisata (DTW), sehingga pengeluaran keuangan yang dilakukan oleh mereka dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara dan khususnya pendapatan daerah.

Pengertian-pengertian di atas menurut A.J Burkart dan Medlik melalui bukunya *Tourism, Past, Present and Future* yang dikutip oleh Soekadijo (1997:3) bahwa “pariwisata berarti perpindahan orang untuk sementara waktu dan dalam jangka pendek ketujuan-tujuan diluar tempat dimana mereka biasanya hidup dan bekerja, dan kegiatan mereka selama tinggal di tempat tujuan tersebut.”

Berhasil tidaknya upaya peningkatan sektor pariwisata di suatu daerah tujuan wisata (DTW) dapat dilihat dari jumlah wisatawan yang berkunjung kedaerah tersebut, maka perlu kiranya dikemukakan pengertian dari wisatawan itu sendiri.

Seperti yang diungkapkan *Oxford English Dictionary* (1993:190) dalam Marpaung (2000:5-6), yang menyebut wisatawan dengan kata *Tourism* menyatakan bahwa :

Tourist adalah orang yang melakukan perjalanan, terutama yang melakukannya untuk rekreasi; orang yang melakukan perjalanan untuk kesenangan dan kebudayaan, orang yang mengunjungi sejumlah tempat untuk melihat-lihat obyek-obyek wisata dengan pemandangan yang menarik atau hal-hal lain dengan tujuan yang sama.

Menurut Suwanto (1997:4), menyebutkan bahwa : “Seseorang atau kelompok orang yang melakukan suatu perjalanan wisata, disebut dengan wisatawan (*tourist*), jika lama tinggalnya sekurang-kurangnya 24 jam di daerah yang dikunjungi.”

Menurut Yoeti (1990:123), mendefinisikan wisatawan sebagai berikut :

Wisatawan (*tourist*) adalah Pengunjung sementara yang paling sedikit tinggal selama 24 jam di negara yang dikunjunginya dan tujuan perjalanannya dapat digolongkan ke dalam klasifikasi berikut ini :

1. Pesiari (*leisure*) seperti untuk keperluan rekreasi, liburan, kesehatan, studi, keagamaan dan olah raga.
2. Hubungan dagang (*business*), keluarga, konferensi dan misi.

Dari pengertian-pengertian tersebut di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan, bahwa pada hakekatnya wisatawan adalah setiap orang yang melakukan bepergian atau perjalanan untuk sementara waktu dan tidak kurang dari 24 jam dengan bermacam-macam motivasi dan tujuan atau kepentingan yang berbeda-beda dengan mengeluarkan sejumlah uang di tempat yang mereka kunjungi tanpa mencari nafkah di tempat tersebut. Dengan demikian pada dasarnya ada motif-motif atau alasan-alasan tertentu yang mendorong wisatawan untuk melakukan perjalanan ke suatu daerah tujuan wisata (DTW).

Dengan dicanangkannya kepariwisataan baik tingkat daerah maupun tingkat internasional yang bisa menghasilkan devisa ditingkat pemerataan dan pemasukan daerah maka dari itu tidak hanya pemerataan saja yang menjalankan dan menjaga akan tetapi masyarakat seluruh Bangsa Indonesia juga ikut melaksanakan dan ikut bertanggung jawab supaya program pemerataan dapat berjalan seperti apa yang telah diprogramkan. Disini kesadaran masyarakat sangat dituntut supaya ramah dan rasa persaudaraan dijunjung tinggi terhadap wisatawan baik manca negara maupun domestik dan juga supaya ikut menjaga fasilitas-fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah.

Menurut Poerwadarminta (1985:655),” Motif adalah sebab-sebab yang akan menjadi dorongan, tindakan seseorang, dasar pikiran atau pendapat, sesuatu yang menjadi pokok.”

Adapun motif wisata menurut Soekadijo (1997:38) adalah sebagai berikut:

- 1) Motif Bersenang-senang atau tamasya
Motif ini melahirkan tipe wisata tamasya (*pleasure tourism*), wisatawan tipe ini ingin mengumpulkan pengalaman sebanyak-banyaknya, mendengarkan dan menikmati apa saja yang menarik perhatian.
- 2) Motif Rekreasi
Motif rekreasi dengan tipe rekreasi ini sukar dibedakan dengan wisatawan diatas. Tipe wisatawan rekreasi melakukan kegiatan yang menyenangkan yang dimaksudkan untuk memulihkan kesegaran jasmani dan rohani.
- 3) Motif Kebudayaan
Dalam tipe wisatawan kebudayaan (*culture tourism*) orang tidak hanya sekedar mengunjungi suatu tempat untuk menyaksikan atraksi (*pleasure tourism*), akan tetapi lebih daripada itu, termasuk didalamnya kunjungan ke berbagai peristiwa khusus (*special event*) seperti upacara keagamaan.
- 4) Motif Olah Raga (wisata olah raga)
Wisata olah raga adalah pariwisata dimana wisatawan mengadakan perjalanan wisata karena motif olah raga, seperti *Asean Games*, *World Cup* dan lain-lain.
- 5) Motif bisnis (wisata bisnis)
Bisnis merupakan motif dalam wisata bisnis. Banyak hubungan yang terjadi antara orang-orang bisnis, ada kunjungan bisnis, pertemuan-pertemuan bisnis, dan sebagainya.
- 6) Motif Konvensi (wisata konvensi)
Wisata konvensi merupakan perjalanan wisata yang timbul karena adanya pertemuan-pertemuan nasional maupun internasional untuk membicarakan bermacam-macam masalah, seperti masalah pelestarian hutan.
- 7) Motif Spiritual
Motif spiritual dan wisata spiritual (*spiritual tourism*) merupakan salah satu tipe wisata yang tertua, sebelum adanya wisata rekreasi, bisnis, olah raga dan sebagainya. Wisata spiritual ini merupakan perjalanan untuk berziarah untuk keperluan keagamaan lain, seperti naik haji.
- 8) Motif Interpersonal
Motif interpersonal maksudnya adalah perjalanan yang diadakan oleh seseorang untuk bertemu dengan orang lain, contohnya : melihat bintang film atau penyanyi tersohor dan lain-lain
- 9) Motif Kesehatan
Wisata kesehatan (*health tourism*) merupakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata ditempat-tempat yang dianggap memiliki khasiat untuk menyembuhkan suatu penyakit, seperti ke tempat sumber air mineral (*spa*).
- 10) Motif Sosial (Wisata Sosial)
Tipe wisata sosial (*social tourism*) bukan wisata yang berdasarkan motif sosial. Motif wisata sosial biasanya ialah rekreasi, bersenang-senang (*pleasure tourism*) atau sekedar mengisi waktu libur, akan tetapi perjalanan yang dilaksanakan dengan bantuan pihak-pihak tertentu secara sosial (fasilitas relatif murah) misal : wisata remaja, wisata sosial buruh.

2.4.2 Jenis-jenis Pariwisata

Setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah yang lain. Termasuk di dalamnya jenis pariwisata di daerah mempunyai ciri-ciri sendiri untuk dikembalikan oleh pemerintah daerah masing-masing. Untuk keperluan perencanaan dan pembangunan jenis-jenis pariwisata tersebut harus dibedakan, sehingga dengan demikian dapat ditentukan kebijakan apa yang mendukung sektor pariwisata tersebut. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap fasilitas yang perlu dipersiapkan dalam pengembangan industri pariwisata tersebut. Potensi-potensi wisata yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dipengaruhi oleh letak geografis dari kawasan wisata tersebut. (Pendit, 1994:67).

Menurut *Spillane* (1994:145), jenis-jenis pariwisata itu antara lain:

1. Pariwisata untuk menikmati perjalanan (*Pleasure Tourism*)
Jenis wisata ini dilakukan oleh orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, mencari udara segar, menikmati keindahan alam, mendapatkan ketenangan dan kedamaian diluar kota.
2. Pariwisata untuk rekreasi (*Recreation Tourism*)
Dilakukan oleh orang-orang yang menghendaki hari liburanya untuk istirahat, memulihkan kesegaran. Biasanya mereka tinggal selama mungkin ditempat yang mereka anggap benar-benar menjamin tujuan rekreasi, misalnya kepantai maupun pegunungan.
3. Pariwisata kebudayaan (*Cultural Tourism*)
Ditandai dengan rangkaian motivasi, seperti keinginan untuk belajar di pusat pengajaran dan riset, untuk mempelajari adat-istiadat, kelembagaan, dan cara hidup, peninggalan masa lampau, kesenian dan tarian rakyat.
4. Pariwisata untuk olah raga (*Sport Tourism*)
Jenis pariwisata ini dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. *Big sport event*: peristiwa olahraga besar yang menarik banyak minat.
 - b. *Sporting tourism of practitioner* : pariwisata bagi mereka yang ingin mempraktekkan sendiri.
5. Pariwisata untuk berkovensasi (*Convention Tourism*)
Berupa penyediaan tempat pertemuan dan konvensi dengan fasilitas penunjang mutakhir yang diperlukan untuk efisiensi operasi konvensi, jenis wisata ini berusaha di kembangkan di Indonesia.
6. Pariwisata diperlukan untuk usaha dagang (*Business Tourism*)
Dilakukan untuk transaksi ataupun pertemuan para pengusaha untuk keperluan bisnis.

Selain itu, Pendit (1994:34), juga mengklasifikasikan jenis pariwisata yang sudah dikelompokan yaitu:

1. Wisata Cagar Alam: jenis wisata ini terkait dengan kegemaran akan keindahan alam, hawa udara yang segar di pegunungan, keajaiban hidup binatang dan marga satwa yang langka serta tumbuhan-tumbuhan yang jarang ditempat lain.
2. Wisata Budaya: tujuannya adalah ingin memperluas pandangan hidup dan kunjungan ketempat lain atau keluar negeri, mempelajari keadaan masyarakat setempat, kebiasaan dan adat-istiadat, cara hidup, budaya dan kesenian daerah.
3. Wisata Pertanian: mengandalkan perjalanan ke proyek-proyek pertanian, perkebunan, ladang pembibitan, sambil menikmati segarnya aneka ragam tanaman.
4. Wisata Bahari: wisata yang dihubungkan dengan olahraga air atau laut seperti memancing, menyelam, berlayar, selancar, melihat tanaman laut serta berbagai rekreasi perairan lainnya.
5. Wisata Kesehatan: keperluan istirahat dalam arti jasmani dan rohani yang mengunjungi tempat peristirahatan, seperti air panas yang mengandung mineral, iklim yang sejuk dan menyehatkan.
6. Wisata komersial: mengadakan perjalanan mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersial seperti pameran industri, pameran dagang dengan dimeriahkan berbagai atraksi seni.
7. Pilgrim: dikaitkan dengan agama, sejarah, adat dan kepercayaan umat atau kelompok masyarakat dengan cara mengunjungi tempat suci, makam orang besar, pemimpin yang diagungkan, tempat penuh legenda, bukit atau gunung yang dianggap keramat.

Sedangkan jenis-jenis pariwisata menurut Ndrahu (1983:07), digolongkan menjadi 2 bagian yaitu:

1. Ketinggian nilai budaya: berupa keindahan kesenian seperti seni ukir kayu, kulit maupun logam, seni batik dan sonket, seni tari, seni musik tradisional yang semua tiap daerah beraneka ragam coraknya. Selain itu juga dapat berwujud peninggalan sejarah berupa candi-candi, pura maupun keraton serta warisan adat-istiadat maupun seni kehidupan asli daerah setempat yang berbeda-beda.
2. Keindahan alam: berupa deburan ombak, pasir putih, kerang laut, tanah laut, perumahan berundak-undak, gunung berapi, sumber air panas, air terjun dan macam-macam makanan khas daerah.

Menurut Oka A. Yoeti (1990:110) menyebutkan bahwa hingga sekarang jenis pariwisata diantaranya :

1. Menurut letak geografis, dimana kegiatan pariwisata berkembang :
 - a. Pariwisata Lokal (*Local Tourism*)
Yaitu dimaksud dengan jenis pariwisata ini adalah pariwisata setempat, yang mempunyai ruang lingkup relatif sempit dan terbatas dalam tempat-tempat tertentu saja.
 - b. Pariwisata Regional (*Regional Tourism*)
Yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang disuatu tempat atau daerah yang ruang lingkungnya lebih luas bila dibandingkan dengan

- “*local tourism*“, tetapi lebih sempit jika dibandingkan dengan “kepariwisataan nasional (*national tourism*)”.
- c. Kepariwisata Nasional (*National Tourism*)
 - 1) Kepariwisata dalam arti sempit :
Yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang dalam wilayah suatu negara.
 - 2) Kepariwisata Nasional dalam arti luas :
Yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang dalam suatu wilayah suatu negara, selain kegiatan “*domestic tourism*“ juga dikembangkan “*foreign tourism*” di mana di dalamnya termasuk “*in bound tourism*” dan “*out going tourism*”.
 - d. *Regional Internasional Tourism*
Yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang disuatu wilayah internasional yang terbatas, tetapi melewati batas – batas lebih dari dua atau tiga negara dalam wilayah tersebut.
 - e. *International Tourism*
Yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang di seluruh negara di dunia, termasuk di dalamnya, selain “*regional – international tourism*” juga kegiatan “*national tourism*”
2. Menurut pengaruhnya terhadap Neraca Pembayaran
 - a. *In Tourism* atau Pariwisata Aktif
Yaitu kegiatan kepariwisataan yang ditandai dengan gejala masuknya wisatawan asing ke suatu negara tertentu
 - b. *Out going Tourism* atau Pariwisata Pasif
Yaitu kegiatan kepariwisataan yang ditandai dengan gejala keluarnya warga negara sendiri bepergian ke luar negeri sebagai wisatawan.
 3. Menurut alasan / tujuan perjalanan
 - a. *Business Tourism*
Yaitu jenis pariwisata di mana pengunjungnya datang untuk tujuan dinas, usaha dagang atau yang berhubungan dengan pekerjaannya, kongres, seminar, convention, symposium, musyawarah kerja.
 - b. *Vacation Tourism*
Yaitu jenis pariwisata di mana orang-orang yang melakukan perjalanan wisata terdiri dari orang-orang yang sedang berlibur, cuti atau pakansi.
 - c. *Education Tourism*
Yaitu jenis pariwisata di mana pengunjung atau orang melakukan perjalanan untuk tujuan studi atau mempelajari sesuatu bidang ilmu pengetahuan
 4. Menurut saat atau waktu berkunjung
 - a. *Season Tourism*
Yaitu jenis pariwisata yang kegiatannya berlangsung pada musim – musim tertentu.
 - b. *Occasion Tourism*
Yaitu jenis pariwisata di mana perjalanan wisatanya dihubungkan dengan kejadian (*occasion*) maupun suatu events, seperti misalnya : Galungan dan Kuningan di Bali.

5. Pembagian menurut obyeknya
 - a. *Cultural Tourism*

Yaitu jenis pariwisata, dimana motivasi orang-orang untuk melakukan perjalanan disebabkan karena adanya daya tarik seni budaya suatu tempat atau daerah.
 - b. *Recuperational Tourism*

Biasanya disebut sebagai pariwisata kesehatan. Tujuan daripada orang-orang untuk melakukan perjalanan adalah untuk menyembuhkan suatu penyakit, seperti mandi di sumber air panas.
 - c. *Commercial Tourism*

Disebut sebagai pariwisata perdagangan, karena perjalanan wisata ini dikaitkan dengan kegiatan perdagangan nasional atau internasional, dimana sering diadakannya kegiatan *Expo, Fair, Exhibition*, dan lain-lain.
 - d. *Sport Tourism*

Yang dimaksud adalah jenis pariwisata ini ialah perjalanan orang yang bertujuan untuk melihat atau menyaksikan suatu pesta olah raga di suatu tempat atau negara tertentu, seperti Olympiade, sepak bola, dan lain-lain. Atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan itu sendiri.
 - e. *Political Tourism*

Yaitu suatu perjalanan yang tujuannya untuk melihat atau menyaksikan suatu peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan kegiatan suatu negara, apakah ulang tahun peringatan hari-hari tertentu, seperti Parade 1 Mei di Tionghoa atau 1 Oktober di Rusia.
 - f. *Social Tourism*

Pariwisata sosial jangan hendaknya diasosiasikan sebagai suatu pariwisata yang berdiri sendiri. Pengertian ini hanya dilihat dari segi penyelenggaraannya saja yang tidak menekankan untuk mencari keuntungan, seperti misalnya *Study Tour, Picnic* atau *Youth Tourism*
 - g. *Religion Tourism*

Yaitu jenis pariwisata dimana tujuan perjalanan yang dilakukan adalah untuk melihat atau menyaksikan upacara-upacara keagamaan.

Kekayaan alam dan keindahan alam yang dimiliki berbagai daerah di Indonesia seperti yang dijelaskan di atas, sangat menarik bagi para calon wisatawan baik asing maupun domestic untuk mengunjungi daerah-daerah tujuan wisata tersebut, sehingga apabila itu dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik maka akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata.

2.4.3 Peranan Industri Pariwisata

Pariwisata mulai dikenal banyak orang setelah ada keputusan dari Presiden pada tanggal 9 Agustus 1964 dengan istilah industri pariwisata. Berdasarkan hal tersebut di Indonesia mulai diadakan upaya pengembangan industri pariwisata

agar tujuannya tercapai. Sejalan dengan hal tersebut menurut Oka A. Yoeti (1997:70), tujuan dari industri sebagai berikut : “1) menarik investor asing agar mau menanamkan modal dan 2) pariwisata sebagai bagian dari sektor industri.”

Batasan pariwisata sebagai sektor industri mengarah pada pengertian luas yaitu bahwa industri pariwisata merupakan serangkaian kegiatan aktivitas dari berbagai bidang usaha yang melayani jasa yang nantinya akan diperlukan oleh wisatawan, dimana diantara unit usaha yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan.

Sedangkan menurut Damardjati (1975:24), memberikan batasan industri pariwisata sebagai berikut : “industri pariwisata merupakan rangkuman dari berbagai macam bidang usaha, yang secara bersama-sama menghasilkan produk ”maupun jasa” atau layanan dan *service* yang nantinya baik secara langsung maupun tidak langsung yang dibutuhkan wisatawan selama lawatannya.”

Dari pengertian di atas menunjukkan bahwa industri pariwisata bukanlah jenis industri yang berdiri-sendiri. Industri tersebut membutuhkan kerja sama dan keterkaitan antara bidang usaha yang satu dengan bidang yang lain. Bidang usaha yang berkaitan dengan industri pariwisata:

- 1) *Travel Agent/ Tour Operation*
- 2) Perusahaan Pengangkutan
- 3) Akomodasi Perhotelan
- 4) Bar dan Restoran
- 5) *Souvenir Shop*
- 6) Dan lain-lain.

Melihat keberadaan dan tujuan dari pengembangan sektor peranan industri pariwisata sangat penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Selain itu peranan industri pariwisata berpengaruh pada sektor lain yaitu:

- 1) Bidang tenaga kerja
Menyerap tenaga kerja karena memberikan dan menciptakan lapangan kerja baru kepada masyarakat.
- 2) Bidang sosial budaya
Hubungan yang terjalin antara wisatawan dengan penduduk asal tempat wisata tersebut, akan mempengaruhi pola hidup baru.

2.4.4 Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata

Menurut Yoeti (1990:158), menjelaskan bahwa :

Untuk pengertian obyek wisata dalam literatur kepariwisataan luar negeri tidak dijumpai istilah obyek wisata seperti yang biasa dikenal di Indonesia. Untuk pengertian obyek wisata mereka lebih banyak menggunakan istilah *tourist attractions* yaitu segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi orang untuk mengunjungi sesuatu daerah tertentu.

Menurut Kodhyat (1992:80) bahwa : “Obyek wisata (*tourist object*) adalah perwujudan ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan.”

Sedangkan menurut Sihite (2000:222), menyebutkan bahwa :

Obyek wisata adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang sudah ada secara turun temurun ataupun yang dibangun serta dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan daya minat orang lain untuk mendekati, melihat, mengetahui untuk dinikmati dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.

Jenis obyek wisata :

1) Obyek wisata budaya

Adalah suatu obyek atau daya tarik wisata yang bersumber dari asset – asset budaya yang meliputi :

a. Peninggalan sejarah dan purbakala

Yaitu benda-benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang dibuat manusia dan umumnya 50 tahun lebih serta dianggap memiliki nilai sejarah, prasejarah dan kesenian.

b. Museum

Yaitu suatu bangunan atau tempat untuk menyimpan, merawat dan memamerkan benda-benda sejarah, purbakala, seni, antropologi yang juga dimanfaatkan sebagai arena pameran

c. *Art Gallery*

adalah bangunan atau tempat yang menyimpan koleksi benda-benda yang bernilai seni dan dapat dimanfaatkan sebagai arena pameran juga.

d. Taman budaya

Merupakan suatu bangunan atau pusat kegiatan seni yang dibangun di setiap propinsi atau daerah.

- e. Jenis pertunjukan
Yaitu suatu jenis kesenian yang dipentaskan baik dipanggung terbuka maupun tertutup.
- f. Desa kerajinan
Adalah suatu desa sebagai pusat pengumpulan dan pengolahan benda-benda seni kerajinan

2) Obyek wisata alam

Maksudnya adalah segala kegiatan perjalanan wisata yang daerah tujuan wisatanya berkaitan dengan alam, yang berbagai macam bentuknya. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah :

- a. Iklim
- b. Alam laut
- c. Perairan dan garis pantai
- d. Flora dan fauna
- e. Kawasan alami indah yang dapat dimanfaatkan untuk golf, ski air, selancar angin, fasilitas rekreasi dan sebagainya.

3) Obyek wisata minat khusus

Yang dimaksud dengan obyek wisata minat khusus adalah suatu obyek wisata yang digunakan untuk kepentingan dan tujuan tertentu. Seperti tempat olah raga, pusat pertokoan, dan lain-lain.

Obyek dan daya tarik wisata merupakan unsur pokok dalam pengembangan sektor pariwisata. Obyek dan daya tarik wisata dapat berupa alam, budaya, pola hidup yang memiliki daya tarik untuk dikunjungi para wisatawan. Dalam arti lain dapat dikatakan bahwa apa saja yang menjadi daya tarik wisatawan disebut sebagai obyek dan daya tarik wisata.

Pengembangan dan daya tarik wisata meliputi kegiatan pembangunan obyek beserta sarana dan prasarana yang diperlukan atau kegiatan mengelolah obyek dan daya tarik wisata yang telah ada. Misalnya membangun restoran atau rumah makan, hotel, biro perjalanan, toko souvenir dan lain-lain disekitar obyek wisata.

Dalam rangka pengembangan obyek dan daya tarik wisata menurut Mussanef (1995:176), perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kemampuan mendorong peningkatan dan perkembangan kehidupan ekonomi sosial budaya.

- 2) Nilai-nilai agama, adat-istiadat, pandangan dan nilai hidup dalam masyarakat.
- 3) Kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup.
- 4) Kelangsungan usaha itu sendiri.

Kemudian menurut Mussanef (1995:177), dalam rangka pelaksanaan program pengembangan obyek dan daya tarik wisata harus berpedoman pada hasil studi kelayakan meliputi:

- 1) Layak finansial: memenuhi kriteria komersial dengan membandingkan biaya operasional dan hasil usaha untuk mengembalikan modal.
- 2) Layak sosial ekonomi: memperhatikan perbandingan ratio bagi pembangunan obyek wisata di banding dengan pembangunan ekonomi (pertanian, industri khususnya kerajinan).
- 3) Layak teknis: obyek wisata tersebut dapat dipertanggung jawab atau tidak.
- 4) Layak lingkungan: analisa mengenai dampak lingkungan, bahwa apabila dampak kegiatan lingkungan tidak dapat ditanggulangi berdasarkan ilmu dan teknologi lebih besar dibanding dampak positifnya maka instansi yang bersangkutan dapat menolak rencana kegiatan pengembangan tersebut.

Pada intinya pengembangan obyek dan daya tarik wisata harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah, swasta dan adanya partisipasi dari masyarakat agar tercapai tujuan sesuai dengan yang direncanakan. Pengembangan obyek dan daya tarik wisata secara garis besar menurut Mussanef (1995:178) terdiri dari:

- 1) Pengembangan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pengunjung antara lain kenyamanan, keindahan, kebersihan, kelestarian dan nilai-nilai sesuai dengan kebutuhan operasional.
- 2) Pengembangan pelaksana pariwisata yaitu terdiri dari manusia, bentuk organisasi dan tata kerja serta prosedur sesuai kebutuhan operasional.

Dalam pengembangan obyek dan daya tarik wisata agar bisa menarik wisatawan diharapkan daerah tujuan wisata mampu menonjolkan hal-hal yang menarik dan juga bisa menyediakan fasilitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan wisatawan selama tinggal di tempat wisata tersebut. Sehubungan uraian di atas maka dalam pengembangan sektor pariwisata di samping harus berorientasi pada keuntungan yaitu dapat meningkatkan pendapatan asli daerah

juga harus didukung oleh semua pihak yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat setempat.

2.5 Pengembangan Pariwisata

2.5.1 Pengertian Pengembangan Pariwisata

Pengertian pengembangan pariwisata menurut Mussanef (1985:1) bahwa: “Pengembangan pariwisata adalah segala kegiatan dan usaha yang terkoordinasi untuk menarik wisatawan, menyediakan semua prasarana dan sarana, barang dan jasa fasilitas yang diperlukan, guna melayani kebutuhan wisatawan.”

Pengembangan pariwisata tidak hanya membenahi obyek wisata alam atau budaya, atau hanya melakukan pengembangan akomodasi dan restoran. Segala kegiatan dan pengembangan pariwisata mencakup segi-segi yang amat luas dan menyangkut berbagai segi kehidupan dalam masyarakat mulai dari kegiatan angkutan, akomodasi, atraksi wisata, makanan dan minuman, cinderamata, pelayanan suasana kenyamanan, dan lain-lain. Keberhasilan pengembangan pariwisata sangat tergantung dari dukungan dan keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat. Suatu upaya pengembangan pariwisata akan berjalan dengan baik apabila didukung pula dengan kegiatan promosi untuk memperkenalkan dan memasarkan pariwisata itu sendiri.

Tujuan pengembangan pariwisata menurut Oka A.Yoeti (1997:35) adalah :

- 1) Meningkatkan pendapatan devisa pada khususnya dan pendapatan Negara dan masyarakat pada umumnya, perluasan kesempatan serta lapangan kerja dan mendorong kegiatan-kegiatan industri penunjang dan industri sampingan lainnya.
- 2) Memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia.
- 3) Meningkatkan persaudaraan/persahabatan nasional dan internasional.

2.5.2 Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata

Menurut Soekanto (1987:3) “peranan diartikan sebagai tempat tertentu yang di tentukan untuk diduduki oleh seseorang dalam suatu proses pencapaian tujuan.” Pemerintah daerah dalam rangka pengembangan sektor pariwisata yang memiliki

fungsi dan peranan untuk dapat memanfaatkan seoptimal mungkin potensi yang dimiliki daerahnya.

Apabila pengertian dihubungkan dengan kedudukan pemerintah daerah dalam struktur pemerintah, maka fungsi pokok pemerintah daerah dalam sektor pariwisata menurut Pendit (1994:56) adalah:

- 1) Sebagai pelaksana dan penanggung jawab penuh terhadap segala kegiatan kepariwisataan dan pembangunan kepariwisataan di daerah serta hal-hal lain yang berkaitan dengan urusan kepariwisataan.
- 2) Sebagai pelaksana dan penanggung jawab penuh dari upaya “pengembangan struktur pariwisata yang ditugaskan kepadanya oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan tingkat atasannya menurut asas perbantuan.

Selo Sumarjan (Spillane, 1994:133) menyatakan bahwa pengembangan pariwisata harus mempunyai pengembangan yang berencana serta menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya. Peranan pemerintah dalam pengawasan pariwisata dalam garis besar adalah menyediakan infrastruktur (tidak hanya dalam bentuk fisik), memperluas berbagai pariwisata, kegiatan koordinasi antara pemerintah dengan pihak swasta, maka yang perlu diperhatikan adalah sarana angkutan, keadaan infrastruktur dan sarana-sarana pariwisata yang menuju ke daerah-daerah wisata tersebut, untuk dapat melaksanakan fungsi dan peranannya pemerintah daerah berdasarkan surat keterangan Menteri Perhubungan No 5.K. 72/U/1996 tentang ketentuan pokok badan pengembangan pariwisata menetapkan tugas badan pengembangan pariwisata daerah sebagai berikut:

- 1) Mengadakan penelitian, merumuskan dan mengusulkan kebijakan kepariwisataan kepada tingkat kepala-kepala daerah sehingga tercapai suatu usaha yang terkoordinasi dan terarah menuju pengembangan pariwisata daerah yang bersangkutan secara menyeluruh.
- 2) Menggerakkan dan mendayagunakan seluruh potensi yang ada di daerah yang dapat diarahkan menjadi pengembangan pariwisata di daerah yang bersangkutan.
- 3) Memberikan saran-saran kebijaksanaan pengembangan kepariwisataan di daerah kepada kepala daerahnya.

- 4) Mengkoordinasi pelaksanaan pengembangan pariwisata yang diselenggarakan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan.

Sehingga peranan dari pemerintah daerah dalam hal ini adalah sebagai unsur pembaharu atau development agen dalam pendorong bagi pembangunan dan pengembangan pariwisata serta pembangunan nasional pada umumnya, mengatur dan mengadakan promosi umum ke daerah lain dan memberikan pembinaan kepada masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam sektor pariwisata. Dengan cara ini diharapkan upaya pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan pemerintah daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya.

2.5.3 Kontribusi Sektor Pariwisata Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Sebelum membahas mengenai kontribusi sektor pariwisata dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, maka terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai pengertian pendapatan daerah yang di dalamnya terdapat 2 unsur kata yaitu pendapatan dan daerah.

Secara umum pendapatan diartikan sebagai perolehan dari suatu usaha yang dilakukan menurut Poerwadarminto (1986:546) bahwa yang dimaksud dengan pendapatan :

1. Hasil pencarian (usaha dan sebagainya)
2. Suatu yang didapatkan (dibuat dan sebagainya yang sedianya belum ada).

Kemudian Ichsan dan Ratih Nur Pratiwi (1989:55) mengemukakan bahwa: “pendapatan berarti hasil atau merupakan pendapatan yang bermanfaat.”

Berdasarkan berbagai pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan adalah hasil atau merupakan penerimaan yang bermanfaat yang didapatkan dari suatu usaha yang dilakukan.

Sedangkan pengertian daerah menurut pasal 1 No. 6 UU no. 32 Tahun 2004 (2004:10) dikemukakan bahwa:

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara kesatuan republik Indonesia.

Selanjutnya apabila kedua pengertian tersebut di atas dihubungkan sehingga menjadi pendapatan daerah maka dapat diartikan sebagai keseluruhan penerimaan daerah baik berupa uang atau perhitungan material lainnya dari sumber-sumber yang jelas dalam jangka waktu tertentu berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sesuai kepentingan masyarakat setempat. Yang termasuk sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Sedangkan pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Pendapatan asli daerah yang sah bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Sumber-sumber pendapatan asli daerah yang berhubungan dengan sektor pariwisata meliputi:

1) Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (1989:30), yang dimaksud “pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.”

Menurut UU RI no. 18 Tahun 1997 yang diperbaharui dengan undang-undang nomor 34 Tahun 2001, yang dimaksud pajak daerah adalah:

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dari pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh daerah yang sifatnya wajib bagi pribadi atau badan tanpa mendapatkan imbalan (prestasi) secara langsung, dan hasil pungutannya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga masing-masing daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, yang menjadi obyek pajak daerah adalah : “Jenis-jenis pajak daerah itu sendiri yaitu hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian golongan C dan parkir.”

a. Pajak Hotel

Obyek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk :

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.
2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan pengamanan.
3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum.
4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Sedangkan yang tidak termasuk obyek pajak hotel adalah :

1. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan/atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.
2. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren
3. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.
4. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel
5. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dimanfaatkan oleh umum.

b. Pajak Restoran

Obyek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran, termasuk rumah makan, kafe, bar, dan sejenisnya. Pelayanan di restoran/rumah makan meliputi penjualan makan dan/atau minuman di restoran/rumah makan, termasuk penyediaan penjualan makan/minum yang diantaranya dibawa pulang. Sedangkan yang tidak termasuk obyek pajak restoran adalah pelayanan usaha jasa boga atau catering dan

pelayanan yang disediakan atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

c. Pajak Hiburan

Obyek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran antara lain berupa tontonan film, kesenian, pagelaran musik dan tari, diskotik, karaoke, klab malam, permainan bilyar, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap dan pertandingan olah raga. Sedangkan yang tidak termasuk obyek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.

d. Pajak Reklame

Obyek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, antara lain: reklame papan/billboard/video/ megatron, reklame koin, reklame melekat (stiker), reklame selebaran, reklame berjalan, reklame udara, reklame suara, reklame film/slide dan reklame peragaan. Sedangkan yang tidak termasuk obyek pajak reklame adalah penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan penyelenggaraan reklame lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

e. Pajak Penerangan Jalan

Obyek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Sedangkan yang dikecualikan dari obyek pajak penerangan jalan adalah:

1. Penggunaan tenaga listrik adalah instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsultan perwakilan asing dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.
3. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknik terkait.
4. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Obyek pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C. Bahan galian golongan C tersebut antara lain : asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bertonit, dolomit, feldspar, garam batu, grafit, granit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap, tanah diatome, tanah liat, tawas, tras, yarosif, zeolit, basal, trakit.

Sedangkan yang dikecualikan dari obyek pajak bahan galian golongan C adalah :

1. Kegiatan pengambilan bahan galian golongan C yang nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk mengambil bahan galian golongan C tersebut dan tidak dimanfaatkan secara ekonomis.
2. Pengambilan bahan galian golongan C lainnya yang diterapkan dalam peraturan daerah.

g. Pajak Parkir

Obyek pajak parkir adalah penyelenggaraan pajak parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garansi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Sedangkan yang tidak termasuk obyek pajak parkir adalah :

1. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.
3. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

Jadi bisa diartikan bahwa objek pajak daerah adalah bentuk usaha yang didirikan oleh orang dan memperoleh pendapatan dari usaha tersebut, sehingga pemerintah layak untuk menarik iuran berupa pajak.

Subyek Pajak Daerah menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah “Orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.”

a. Pajak Hotel

Subyek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel.

b. Pajak Restoran

Subyek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran.

c. Pajak Hiburan

Subyek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan/atau menikmati hiburan.

d. Pajak Reklame

Subyek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau pameran reklame.

e. Pajak Penerangan Jalan

Subyek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Subyek pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah orang atau badan yang mengambil bahan galian golongan C.

g. Pajak Parkir

Subyek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir.

Dengan demikian bisa diartikan bahwa yang menjadi subyek pajak daerah adalah orang atau badan usaha yang memanfaatkan atau menggunakan fasilitas yang diberikan oleh obyek pajak daerah.

Pajak daerah yang berhubungan dengan sektor pariwisata adalah:

a. Pajak Hotel dan Restoran

Adalah pajak atas pelayanan hotel dan restoran. Hotel adalah bangunan yang khususnya disediakan bagi orang-orang untuk dapat

beristirahat, menginap, memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Restoran dan rumah makan adalah tempat menikmati makanan dan minuman yang disediakan dengan memungut bayaran, tidak termasuk jasa boga dan catering. Sedangkan subyek pajak yang menanggung pajak hotel dan restoran berdasarkan ketentuan UU No.18 Tahun 1997 adalah pengusaha rumah makan atau restoran dan penginapan (Hotel) tersebut. Dan tarif pajak yang ditetapkan adalah 10% atas jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan restoran tersebut.

b. Pajak Hiburan

Adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dan dipungut bayaran. Tidak termasuk penggunaan fasilitas olahraga. Tarif pajak hiburan dikenakan paling tinggi 10% atas jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar untuk menonton dan menikmati hiburan.

2) Retribusi Daerah

Pungutan retribusi daerah tidaklah sama dengan pungutan pajak daerah, karena retribusi merupakan pungutan langsung yang dikenakan untuk pelayanan tertentu dari pemerintah daerah. Sedangkan pajak merupakan pungutan tanpa menunjuk langsung pelayanan yang diberikan.

Menurut Feldman sebagaimana dikutip oleh G. Gadhart (Ichsan dkk, 1990:59) pengertian retribusi adalah:

Retribusi adalah penerimaan yang diperoleh oleh pengusaha publik dari rumah tangga swasta, berdasarkan norma-norma umum yang ditetapkan berhubungan dengan prestasi-prestasi yang diselenggarakan atas usul dan kepentingan rumah tangga swasta dan prestasi tersebut karena hubungan dengan kepentingan umum yang secara khusus dilaksanakan sendiri oleh pengawas publik.

Menurut Halim (2001:121) retribusi yaitu : “Pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontraprestasi yang diberikan oleh

pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku.”

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa “Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan organisasi atau badan. Yang menjadi retribusi adalah semua jenis jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah tetapi tidak semua jenis jasa yang diberikan pemerintah daerah dapat dipungut retribusi hanya jenis jasa-jasa tertentu yang hanya menurut pertimbangan ekonomi layak untuk dijadikan obyek retribusi.

Jasa yang dimaksud dikelompokkan menjadi 3 golongan yaitu: jasa umum yaitu jasa untuk kepentingan dan kemanfaatan umum, jasa usaha yaitu jasa yang menganut prinsip komersial dan perijinan tertentu yaitu kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Obyek retribusi yang berkaitan dengan sektor pariwisata adalah retribusi yang harus dibayar oleh badan atau pribadi yang menggunakan jasa dan dihitung dari perkalian antara pengguna jasa dan tarif retribusi. Dan tingkat penggunaan jasa dinyatakan sebagai kualitas pengguna jasa yang dijadikan dasar alokasi biaya yang dipakai daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

a. Retribusi jasa umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa umum ditetapkan dalam peraturan pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perijinan tertentu
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
3. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum
4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya
6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial
7. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah :

1. Retribusi pelayanan kesehatan

Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan, dan Rumah Sakit Daerah. Dalam retribusi pelayanan kesehatan ini tidak termasuk pelayanan pendaftaran.

2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan

Pelayanan persampahan / kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum dan taman.

3. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil

Akte catatan sipil meliputi akte kelahiran, akte perkawinan, akte perceraian, akte pengesahan dan pengakuan anak, akte ganti nama bagi warga negara dan akte kematian.

4. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat

Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan/pemakaman mayat, dan sewa tempat pemakaman atau

pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah.

5. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum

Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah.

6. Retribusi pelayanan pasar

Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

8. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran

Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengizinan oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat

9. Retribusi penggantian biaya cetak peta

Peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik dan peta teknis (struktur).

10. Retribusi pengujian kapal perikanan

Pelayanan pengujian kapal perikanan adalah pengujian terhadap kapal penangkap ikan yang menjadi kewenangan daerah.

Jenis retribusi jasa umum untuk daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah.

b. Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Retribusi jasa usaha ditetapkan dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu
2. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah

Pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian/alat-alat berat/alat besar milik daerah. Selanjutnya tidak termasuk dalam pengertian pelayanan pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, seperti pemancangan tiang listrik/telepon maupun penanaman/ pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

2. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan

Pasar grosir dan/atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan pihak swasta.

3. Retribusi tempat pelelangan

Tempat pelelangan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk dalam pengertian tempat pelelangan adalah tempat yang dikontrak oleh

pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

4. Retribusi terminal

Pelayanan terminal adalah tempat pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dengan ketentuan ini, pelayanan peron tidak dipungut retribusi.

5. Retribusi tempat khusus parkir

Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

6. Retribusi tempat penginapan/pengsanggahan villa

Pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa milik daerah adalah penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

7. Retribusi penyedotan kakus

Pelayanan penyedotan kakus adalah pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

8. Retribusi rumah potong hewan

Pelayanan rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

9. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal

Pelayanan pelabuhan kapal adalah pelayanan pada pelabuhan kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan kapal yang dimiliki dan/atau dikelola

oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

10. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga

Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

11. Retribusi penyeberangan di atas air

Pelayanan penyeberangan di atas air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang yang menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

12. Retribusi pengolahan limbah cair

Pelayanan pengolahan limbah cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri yang dikelola dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

13. Retribusi penjualan produksi usaha daerah

Penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah antara lain, bibit/benih tanaman, bibit ternak dan bibit/benih ikan, tidak termasuk penjualan produksi usaha Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Jenis retribusi jasa usaha untuk daerah propinsi dan daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah.

c. Retribusi perizinan tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,

prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi
2. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum
3. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dari biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Jenis-jenis perizinan tertentu adalah :

1. Retribusi ijin mendirikan bangunan

Izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan, termasuk dalam pemberian izin ini adalah kegiatan tinjauan desain dan pemantapan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku, dengan tetap memperhatikan Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan Bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

2. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol

Izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

3. Retribusi izin gangguan

Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

4. Retribusi Izin Trayek

Izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Pemberian izin oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah.

Selain jenis retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 sebagaimana disebutkan di atas, dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis retribusi lainnya sesuai kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang. Jenis retribusi lainnya, misalnya adalah penerimaan negara bukan pajak yang telah diserahkan kepada daerah.

2.5.4 Upaya Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Guna Meningkatkan Pendapatan

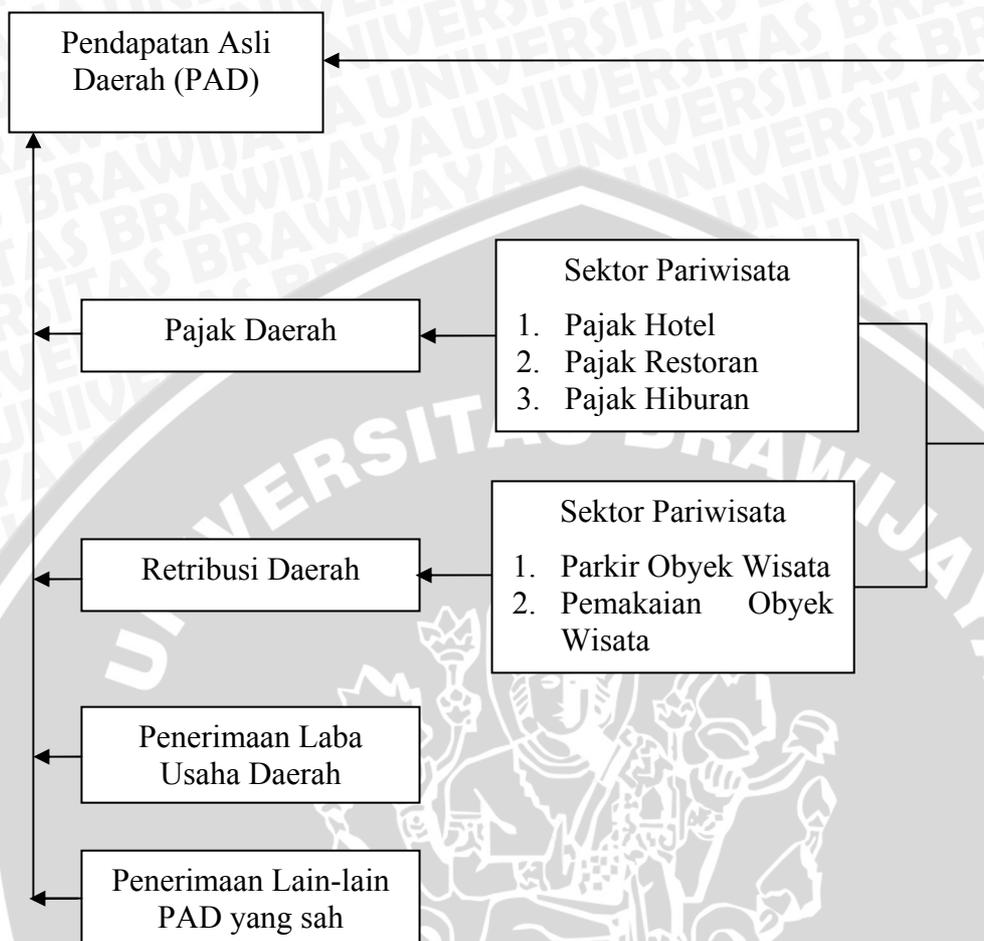
1) Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- a. Perubahan tarif pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Peningkatan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah secara profesional melalui mekanisme dan prosedur yang baik dan transparan.
- c. Usaha pengawasan terhadap obyek-obyek pajak daerah dan retribusi daerah dengan mengadakan penelitian ulang terhadap perkembangan obyek pajak daerah dan retribusi daerah.

2) Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- a. Melalui kegiatan investasi yang merupakan peranan sangat strategis bagi pemerintah kota dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Usaha untuk mencari dan memperkuat obyek pajak daerah dan retribusi daerah dengan tujuan untuk menghimpun sumber-sumber pembiayaan daerah yang potensial untuk dikembangkan.

2.5.5 Kerangka Pemikiran



BAB 3

METODE PENELITIAN

Pembuatan rancangan penelitian adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah. Suatu penelitian memerlukan metode yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti agar memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang ada. Oleh karena itu metode diperlukan dalam suatu penelitian.

Menurut Narbuko dan Achmadi (1991:1), “Metode Penelitian adalah cara-cara berpikir yang dipersiapkan untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian.” Dari pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Metode Penelitian adalah cara-cara yang dipakai untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa dan menginterpretasikan fakta-fakta tentang manusia, alam dan hubungan satu dengan yang lain guna untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status manusia, suatu objek, suatu situasi atau kondisi, sistem pemikiran, ataupun suatu luas pemikiran pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir: 1999).

Pendekatan yang digunakan ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut *Bag and Taylor* (Moleong, 2003) mendefinisikan “Metode Kualitatif adalah sebagai prosedur yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tulis maupun lisan dan orang-orang atau perilaku yang diamati.”

Dengan demikian penelitian ini berupaya mendeskripsikan, menguraikan, menginterpretasikan permasalahan serta kemudian mengambil kesimpulan dari permasalahan tersebut tentang upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Mojokerto.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian sangat penting, karena dengan fokus ini akan membantu peneliti kearah mana penelitiannya dibawa atau diarahkan. Fokus menurut Moleong (2000:297) sangat diperlukan dalam kegiatan penelitian, karena dalam penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan:

- 1) Penetapan fokus penelitian akan membahas *study* yang akan dibahas oleh peneliti.
- 2) Penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi criteria inklusi-eksklusi (memasukkan-mengeluarkan) suatu info yang diperoleh dari lapangan. Dengan bimbingan dan arahan suatu fokus, seorang peneliti tahu persis data atau info apa yang dikumpulkan dan data atau info mana yang walaupun menarik karena tidak relevan, tidak perlu dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sudah dikumpulkan.

Jadi sasaran atau fokus yang menjadi titik pangkal dalam penelitian ini adalah membahas tentang upaya pihak-pihak terkait khususnya kantor pariwisata dalam pengembangan sektor pariwisata, khususnya sub sektor pariwisata pada objek dan daya tarik wisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Mojokerto.

Dengan demikian yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mojokerto.
2. Kendala peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mojokerto.
3. Upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam meningkatkan PAD dari Sektor Pariwisata.

3.3 Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian ini berada pada Kabupaten Mojokerto yang mana peneliti dapat menangkap fenomena yang akan diteliti. Peneliti mengambil lokasi penelitian di daerah ini karena daerah ini mempunyai potensi kepariwisataan yang beraneka ragam di bandingkan dengan kota, maka yang menjadi situs penelitian ini adalah:

- 1) Kantor Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Mojokerto.
- 2) Obyek wisata di Kabupaten Mojokerto.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data-data diperoleh melalui dua sumber, yaitu:

1) Sumber Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya. Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah:

- a. Kepala Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Mojokerto.
- b. Kepala sub dinas pemasaran dan promosi pariwisata.
- c. Staf Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Mojokerto
- d. Kepala sub dinas pembukuan dan pelaporan
- e. Kepala seksi atraksi wisata
- f. Pengunjung objek wisata.

2) Jenis Data Sekunder

Adalah data pelengkap atau penunjang data primer yang dikumpulkan dari data yang sesuai dan merupakan pendukung dari penelitian yang dilakukan. Adapun data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui teknik dokumentasi meliputi:

- a. Arsip-arsip yang berhubungan dengan upaya pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah.
- b. Dokumen-dokumen yang dimiliki nara sumber di Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Mojokerto serta laporan kerja dari Dinas Pariwisata dan kebudayaan Mojokerto.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dipergunakan untuk memperoleh data dilapangan. Untuk itu metode atau cara pengumpulan data yang diperlukan harus benar dan akurat. Adapun metode dalam penelitian ini adalah:

1) Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan tatap muka (*Face to Face*) secara langsung dengan cara berdialog dan tanya jawab, baik dengan responden maupun dengan pihak-pihak yang terkait lainnya. Guna memperoleh informasi atau data secara jelas dan mendasar, juga untuk

menjalin hubungan dengan responden agar memperlancar dalam proses penelitian.

2) Observasi

Observasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai obyek penelitian, terutama yang berkaitan dengan upaya peningkatan pendapatan sektor pariwisata.

3) Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencari, mencatat serta mempelajari data dari sejumlah arsip atau dokumen resmi yang ada di lokasi penelitian yang dianggap penting dan mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti.

3.6 Instrumen Peneliti

1) Peneliti Sendiri

Salah satu ciri peneliti kualitatif adalah memasukan manusia atau peneliti sendiri sebagai alat pengumpul data utama (Moleong, 1993:4). Hal ini berpengaruh terutama dalam proses wawancara dan analisa data.

2) Pedoman Wawancara (*Interview Guide*)

Yaitu berupa daftar pertanyaan yang di ajukan kepada informan penelitian dan biasanya digunakan oleh peneliti sebagai kerangka dasar dalam mengadakan wawancara dengan aktor yang terlibat sebagai sumber data dalam penelitian ini.

3) Catatan Lapangan (*Field Note*)

Yaitu merupakan catatan untuk mencatat hasil-hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan di lapangan.

3.7 Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang sangat menentukan dalam keseluruhan proses penelitian, hal ini karena analisis data menyangkut kekuatan analisis dan kemampuan dalam mendeskripsikan data situasi, peristiwa dan konsepsi yang merupakan bagian dari obyek penelitian. Dengan analisis, data dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah.

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yang digunakan dalam suatu penelitian untuk memperoleh gambaran secara kualitatif dan akan menghasilkan data secara deskriptif melalui uraian.

Adapun tahapan analisis dalam penelitian ini adalah:

1) Reduksi Data

Yaitu dengan menajamkan, menggolongkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasikan.

2) Penyajian Data

Berupa sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian data kita dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

3) Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Yaitu dilakukan dengan cara longgar, tetap terbuka, tetapi dirumuskan secara rinci dan mengakar dengan kokoh (*Miles, 1992:16*)

Selanjutnya: "ketiga hal utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagai suatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis" (*Miles, 1992:19*).

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Mojokerto adalah Kabupaten yang diwarisi peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit, sebuah kerajaan besar di tanah Jawa yang mempunyai sejarah yang monumental. Kabupaten Mojokerto memiliki nilai-nilai industri wisata berupa wisata alam dan wisata budaya yang layak dan patut dikembangkan serta dikelola secara optimal dan profesional. Peninggalan Kerajaan Majapahit tersebut memiliki nilai sejarah yang tinggi juga merupakan suatu daya tarik wisata yang memikat.

Letak Kabupaten Mojokerto yang sangat strategi, berada di lintasan jalur tujuan wisata Yogyakarta, Solo, Bromo, dan Pulau Bali. Kabupaten Mojokerto sebagai daerah kunjungan wisata memiliki berbagai ragam obyek yang khas yang mempunyai prospek yang sangat baik bagi para wisatawan baik domestik maupun manca negara. Kabupaten Mojokerto sangat beruntung karena memiliki wisata alam seperti sumber air panas, air terjun dan panorama alam yang sangat indah. Selain itu juga memiliki potensi wisata budaya dengan kekayaan peninggalan dan situs sejarah seperti candi, arca dan lain-lain dengan jumlah yang cukup besar dibandingkan dengan wilayah kabupaten lain di Jawa Timur.

Melengkapi potensi wisata alam dan wisata budaya tersebut, Kabupaten Mojokerto juga memiliki potensi wisata religius berupa makam-makam keramat. Keberadaan masyarakat dengan keragaman budayanya melengkapi potensi kawasan wisata budaya dan alam sebagai obyek wisata yang sangat fantastis. Selain itu letak Kabupaten Mojokerto sangat strategis, berdekatan dengan Bali yang sudah menjadi tujuan wisata nasional, serta berdekatan dengan kawasan industri Surabaya, Gresik dan Sidoarjo. Berdasarkan hal ini, melalui perencanaan dan pengelolaan yang dilakukan dengan baik agar dapat dijadikan sumber andalan pendapatan asli daerah yang patut diperhitungkan. Kondisi ini memberikan

peluang bagi pengelola khususnya di obyek wisata untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang khusus di bidang pariwisata.

Daerah Trowulan, dikenal sebagai pusat Kerajaan Majapahit, yang kini banyak dijumpai sisa-sisa peninggalan sejarah kerajaan tersebut. Kabupaten Mojokerto terdiri atas 18 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Adapun kecamatan tersebut yaitu : Bangsal, Dawarblandong, Dlangu, Gedeg, Gondang, Jatirejo, Jetis, Kemlagi, Kutorejo, Mojoanyar, Mojosari, Ngoro, Pacet, Pungging, Puri, Sooko, Tawas, dan Trowulan, Kini banyak gedung-gedung pemerintahan yang dipindahkan ke kota Mojosari, sebelah timur Kota Mojokerto. Bagian selatan Kabupaten Mojokerto berupa pegunungan, dengan puncaknya Gunung Welirang (3.156 m) dan Gunung Anjasmoro (2.277 m). Kabupaten Mojokerto memiliki sejumlah obyek wisata menarik. Trowulan adalah daya tarik utama wisata sejarah di kabupaten ini, karena terdapat puluhan candi-candi peninggalan Kerajaan Majapahit, makam raja-raja Majapahit, serta Pendopo Agung bekas istana Majapahit. Kawasan pegunungan di selatan juga merupakan kawasan wisata andalan, diantaranya Pemandian Air Panas di Pacet dan villa-villa peristirahatan di Trawas. selain itu juga terdapat beberapa tempat berkembangnya industri kecil. Kecamatan Sooko terkenal dengan produksi sepatu dan sandal, kecamatan trowulan terkenal dengan kerajinan kemasan dan perak dan juga patung. kecamatan bangsal terkenal dengan krupuk rambaknya dan juga sekolah polisi negara juga terdapat di bangsal.

Namun demikian pemanfaatan kawasan yang belum optimal serta aksesibilitas ke lokasi yang masih sangat rendah tampaknya menjadikan keberadaan obyek wisata dan belum juga dirasakan manfaatnya secara maksimal bagi masyarakat setempat maupun oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Oleh karena itu pengembangan pariwisata sebagai daerah ekotorisme wisata diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pemakai kepentingan, terutama para pengambil keputusan untuk mengambil langkah-langkah berikut guna mengembangkan pariwisata Kabupaten Mojokerto sehingga dapat memberikan manfaat nyata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sumber pendapatan asli daerah sebagai sumber devisa negara.

1) Letak Geografis

Wilayah Kabupaten Mojokerto terletak diantara $111^{\circ} 19'$ sampai dengan $112^{\circ} 39'$ Bujur Timur dan antara $7^{\circ} 45'$ Lintang Selatan. Adapun batas-batas administrasi wilayah Kabupaten Mojokerto dibatasi oleh :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Lamongan
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Jombang dan Kabupaten Malang.

2) Keadaan Topografis

Topografi Wilayah Kabupaten Mojokerto cenderung di tengah dan tinggi di bagian selatan dan utara. Bagian selatan merupakan wilayah pegunungan yang subur, meliputi kecamatan Pacet, Trawas, Gondang dan Jatirejo. Bagian tengah merupakan wilayah daratan, sedangkan bagian utara merupakan daerah perbukitan kapur yang cenderung sangat subur. Sekitar 21% dari seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto mempunyai kemiringan tanah lebih dari 25° . Sedangkan sisanya merupakan wilayah daratan dengan tingkat kemiringan lahan kurang dari 25° .

Wilayah dataran rendah pada umumnya memiliki kemiringan tanah 0-2% yaitu meliputi kecamatan-kecamatan yang terletak di bagian utara dan bagian tengah yang meliputi semua kecamatan kecuali Kecamatan Pacet dan Kecamatan Trawas. Pada wilayah ini kemungkinan terjadinya gangguan erosi tanah sangat kecil. Sehingga segala jenis kegiatan budidaya dapat dilakukan baik untuk kawasan perkotaan maupun pedesaan.

Kelerengan di atas 40% merupakan wilayah yang rentan terhadap terjadinya erosi tanah. Wilayahnya meliputi kecamatan Jatirejo, Gondang, Pacet, Trawas, Ngoro dan Dawarblandong. Dan kawasan ini harus dipertahankan karena fungsinya sangat besar terhadap pengamanan siklus hidrologi dan menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup.

3) Karakteristik Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto pada tahun 2007 sebesar \pm 900.000 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,36%. Jumlah penduduk laki-

laki sebesar 445.389 jiwa sedangkan jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Jetis sebanyak 66.941 jiwa, sedangkan terendah di Kecamatan Trawas sebanyak 26.408 jiwa.

Dengan luas wilayah Kabupaten Mojokerto 692.15 Km², kepadatan penduduk di Kabupaten Mojokerto berkisar 1.306.47 jiwa/km². Adapun kecamatan yang dekat dengan pusat pertumbuhan (kota) memiliki kepadatan penduduk di atas 2.000 jiwa/km² antara lain kecamatan Sooko, Mojosari, dan Gedek. Kecamatan Sooko merupakan tingkat kepadatannya sangat tinggi dengan penduduk sebesar 2.319 jiwa/km². Kecamatan Dawarblandong, Gondang dan Trawas memiliki kepadatan penduduk yang kecil. Berdasarkan data tenaga kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mojokerto jumlah pencari kerja pada tahun 2007 mengalami kenaikan. Penduduk Mojokerto sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, industri, kerajinan dan perdagangan

4) Keadaan Iklim

Seperti daerah tropis lainnya Kabupaten Mojokerto memiliki iklim Tropika dengan 2 musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada umumnya musim kemarau jatuh pada pertengahan bulan Februari hingga pertengahan bulan September. Sedangkan selebihnya merupakan musim penghujan.

5) Luas Wilayah dan Administrasi Pemerintahan

Kabupaten Mojokerto memiliki lahan yang cukup luas dengan berbagai variasi pemanfaatannya. Berdasarkan data yang ada Wilayah Kabupaten Mojokerto terdiri dari 18 kecamatan, 300 Desa dan 4 Kelurahan memiliki luas keseluruhan 69.215 km² atau 1,72% dari keseluruhan luas wilayah Jawa Timur yang meliputi :

a. Pemukiman	: 132.440 km ²
b. Pertanian	: 593.560 km ²
c. Hutan	: 240.360 km ²
d. Rawa/Waduk	: 0.490 km ²
e. Lahan Kritis	: 0.200 km ²

- f. Padang Rumput : 1.590 km²
 - g. Semak/alang : 0.720 km²
- 6) Penggunaan Lahan

Luas wilayah Kabupaten Mojokerto sebesar 96.936 Ha dengan penggunaan lahannya sebagai berikut :

- a. Sawah seluas 37.337 Ha atau sebesar 38,08 %.
- b. Tegal/Kebun seluas 11.480 Ha atau sebesar 11,74 %.
- c. Bangunan atau halaman/pekarangan seluas 14.428 Ha atau sebesar 14,75 %.
- d. Perkebunan seluas 1.220 Ha atau sebesar 1,25 %.
- e. Hutan Rakyat seluas 368 Ha atau sebesar 0,38%.
- f. Kolam/tebat/empang seluas 10 Ha atau sebesar 0,01%.
- g. Lain-lain seluas 3.614 Ha atau sebesar 3,70%.

Penggunaan lahan terbesar di Kabupaten Mojokerto adalah sawah, yakni sebesar 38,08% dari luas wilayah. Kemudian Hutan Negara 30,01% penggunaan lahan untuk bangunan/pekarangan menduduki peringkat ketiga terbesar yaitu sebesar 14,75% dari luas wilayah. Sedangkan penggunaan terkecil berupa kolam/tebat/empang sebesar 0,01%.

4.1.2 Potensi Pariwisata Kabupaten Mojokerto

Potensi pariwisata Kabupaten Mojokerto dengan kondisi geografis yang dimiliki Kabupaten Mojokerto dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat serta mempunyai corak yang beranekaragam obyek wisata yang bertumpu pada keadaan alam sekitarnya. Hal tersebut merupakan modal utama bagi pengembangan pariwisata yang dapat menempatkan sektor pariwisata menjadi sektor andalan pendapatan asli dari sektor retribusi obyek pariwisata.

Potensi wisata yang ada di Kabupaten Mojokerto menurut buku Dinas Pariwisata Kabupaten Mojokerto yang berjudul Pelangi Wisata dan Seni Budaya di Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

a. Obyek Wisata Alam

Tabel
Obyek Wisata Alam di Kabupaten Mojokerto

No	Nama Obyek Wisata	Tempat
1	Wana Wisata Watu Blorok	Desa Kupang Kecamatan Jetis
2	Tirta Wisata Tanjungan	Kecamatan Kemlagi
3	Wana Wisata Air Hangat Padusan	Kecamatan Pacet
4	Air Terjun Grenjengan	Kecamatan Pacet
5	Taman Rekreasi dan Pemandian Ubalan	Kecamatan Pacet
6	Air Terjun Cuban Cunggu	Kecamatan Pacet
7	Goa Anggar Besi	Desa Jabung Kecamatan Jatirejo
8	Goa Gembyang	Desa Kuripsari Kecamatan Pacet
9	Wana Wisata Cagar Budaya Gunung Penanggungan	Kecamatan Jolotundo
10	Tanhura	Kecamatan Pacet Cangar
11	Api Ajaib Alam Bekucuk	Desa Tempuran Kecamatan Sooko
12	Wisata Air	Kali Brantas
13	Air Terjun Gumeng	Kecamatan Gondang
14	Goa dan Sungai Bawah Tanah	Kecamatan Ngoro
15	Air Terjun dan Pohan Jati Raksasa	Kecamatan Jatirejo

Sumber data : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto, 2007.

b. Obyek Wisata Purbakala

Tabel
Obyek Wisata Purbakala di Kabupaten Mojokerto

No	Nama Obyek Wisata	Tempat
1	Museum Trowulan	Kecamatan Trowulan
2	Gapura Wringin Lawang	Desa Jati Pasar Kecamatan Trowulan
3	Candi Brahu	Desa Bejjong Kecamatan Trowulan
4	Candi Sitinggil	Desa Bejjong Kecamatan Trowulan
5	Makam Putri Cempa	Kecamatan Trowulan
6	Kubur Panjang	Desa Nglinguk Kecamatan Sentonorejo
7	Kolam Segaran	Kecamatan Trowulan
8	Candi Kedaton	Kecamatan Trowulan
9	Candi Kuripsari	Kecamatan Ngoro
10	Candi Darmawangsa	Desa Kunjorowesi Kecamatan Ngoro
11	Candi Griya	Desa Kunjorowesi Kecamatan Ngoro
12	Candi Menara	Desa Kunjorowesi Kecamatan Ngoro
13	Gedung Ruang Pusaka	Pringgitan R. Dimas Bupati
14	Gunung Gajah Mungkur	Kecamatan Ngoro
15	Candi Putri	Desa Watonmas Kecamatan Trawas
16	Candi Pura	Desa Seloliman Kecamatan Trawas
17	Candi Kagu	Desa Seloliman Kecamatan Trawas
18	Candi Pendowo	Desa Watonmas Kecamatan Trawas
19	Candi Merak	Desa Watonmas Kecamatan Trawas
20	Candi Telong Bendong	Desa Kedung Udi Kecamatan Trawas
21	Candi Watu Kelir	Desa Kedung Udi Kecamatan Trawas
22	Candi Macan	Desa Seloliman Kecamatan Trawas
23	Kepurbakalaan XII	Desa Kedung Udi Kecamatan Trawas
24	Obyek Wisata Agro	P.G. Gempol Kerep
25	Obyek Pemancingan Ikan	Kecamatan Dlanggu
26	Obyek Kolam Renang	Desa Canggung Kecamatan Pacet

Sumber data : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto, 2007.

Dari begitu banyak potensi obyek pariwisata yang ada, Kabupaten Mojokerto memprioritaskan pengembangannya pada obyek wisata :

1) Kawasan Wisata Purbakala Trowulan

Kecamatan Trowulan merupakan Kecamatan yang paling banyak terdapat situs peninggalan Mojopahit sesuai Dokumen BAPPEDA Kabupaten Mojokerto yang memiliki daya tarik antara lain :

a) Candi Bajangratu

Candi ini terletak di Desa Temon Kecamatan Trowulan yang terbuat dari batu dan bata memiliki tinggi 16,1 m, panjang 11 m dan lebar 6,7 m. Candi Bajangratu memiliki daya tarik yaitu berbentuk paduraksa mempunyai sayap di kanan dan kirinya, relief yang menghiasi gapura dari atas ke bawah antara lain berupa : mata satu, kepala garuda, matahari diapit naga, kepala kala diapit singa, binatang bertelinga panjang. Adapun reliefnya bermakna Rama yang dipahatkan pada bagian sayap dan relief Sri Tanjung di bagian kaki. Sebenarnya dulu pada Jaman Mojopahit fungsi sebenarnya bukan sebagai pintu masuk keraton melainkan menuju ke suatu bangunan suci.

b) Candi Tikus

Candi Tikus lokasi dan bahannya sama dengan Candi Bajangratu dengan ukuran tinggi 5,20 m, panjang 25,4 m dan lebar 23,6 m. Arsitektur Candi Tikus melambangkan gunung suci tempat tinggal para dewa menurut kepercayaan hindu, Gunung Semeru selalu dihubungkan dengan air kehidupan yang dipercaya mempunyai kekuatan magis yang memberi kehidupan dan kesejahteraan kepada semua makhluk. Mitos inilah yang memungkinkan bahwa Candi Tikus suci, karena air yang mengalir dianggap sebagai air yang keluar dari Gunung Semeru.

c) Candi Wringin Lawang

Candi ini terletak di Desa Jatipasar Kecamatan Trowulan yang bahannya dari bata saja dengan ukuran tinggi 13,7 m, panjang 13 m, lebar 11 m. Disebut Wringin karena dulu Candi ini terletak didekat pohon beringin. Candi berbentuk terpisah atau belah. Candi ini berfungsi sebagai pintu masuk keraton Mojopahit.

Gapura Wringin Lawang merupakan bangunan kuno bentuk Gapura Belah yang tidak memiliki atap (Tipe Candi Bentar). Gapura ini diperkirakan sebagai pintu gerbang masuk salah satu kompleks bangunan yang berada di kota Mojopahit. Lokasinya berada di dukuh Wringin Lawang, Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan. Mudah dijangkau dengan berbagai kendaraan

d) Kolam Segaran

Kolam Segaran merupakan bangunan kolam kuno terbesar yang mencerminkan kemampuan Kerajaan Mojopahit beradaptasi dengan lingkungannya. Menurut cerita, kolam ini digunakan untuk rekreasi dan menjamu tamu-tamu Kerajaan Mojopahit. Lokasinya di Desa Trowulan Kecamatan Trowulan.

e) Museum Trowulan

Tempat menyimpan benda-benda kuno peninggalan Kerajaan Mojopahit, juga untuk tempat studi bagi para pelajar dan mahasiswa serta bisa juga sebagai tempat rekreasi. Lokasinya berada di Desa Trowulan Kecamatan Trowulan sebelum Pendopo Agung Trowulan.

f) Pendopo Agung

Sebuah bangunan khusus nuansa Mojopahit dan sering difungsikan sebagai tempat pertunjukkan kesenian, studi tour, lomba, tempat pertemuan dengan suasana yang teduh dan nyaman juga sebagai tempat istirahat/rekreasi. Lokasinya berada di Desa Trowulan Kecamatan Trowulan.

g) Makam Siti Inggil

Makam Siti Inggil merupakan tempat persinggahan dan pertapaan Raja Mojopahit ke I (R. Wijaya Kertarajasa Jayawerdana). Dulu ceritanya adalah sebuah punden di Dusun Kedungwulan yang diberi nama "Lemah Geneng" yang artinya Siti Inggil terdapat dua makam yaitu makam Sapu Angin dan Sapu Jagat sehingga makam ini dikeramatkan dan sering dikunjungi wisatawan lokal maupun asing setiap Jumat legi. Lokasinya berada di Dusun Kedungwulan Desa Bejijong Kecamatan Trowulan.

h) Makam Putri Cempa

Makam Putri Cempa merupakan makam bangsawan atau keluarga Kerajaan Majapahit yang memeluk agama Islam. Jumlah nisan ada 2 tempat, dimakam utama dan di halaman II. Makam ini dikeramatkan dan sering dikunjungi pada hari Jumat legi. Lokasinya berada di Desa Unggahan Kecamatan Trowulan.

i) Sentra Industri Kecil dan Pusat Informasi Pariwisata

Pusat Informasi Sentra Industri merupakan pusat berbagai macam souvenir/cinderamata khas Mojokerto dengan beberapa fasilitas seperti kios, hotel, kolam renang. Di samping itu juga bisa digunakan tempat rekreasi keluarga. Lokasinya sangat strategis berada di Jalan Raya Trowulan. Mudah dijangkau oleh kendaraan pribadi maupun umum.

j) Obyek Wisata Religius Makam Syeh Jumadil Kubro (Makam Troloyo)

Makam Troloyo merupakan kompleks makam yang terbagi dua kelompok makam yaitu bagian depan dan bagian belakang. Di bagian depan terdapat makam Syayid Jumadil Kubro seorang penyebar agama Islam di tanah Jawa sebelum Wali Songo dan bagian belakang ada makam Sunan Ngudung serta makam Syayid Usman. Lokasinya berada di Desa Sentonorejo Kecamatan Trowulan.

2) Pertitan Jolotundo

Kunjungan ke Pertitan Jolotundo akan dapat menikmati sejuaknya percikan air sumber di dalam candi dari Jolotundo yang terletak di lereng gunung Bekal. Salah satu puncak penanggungan ini terletak di Desa Seloliman Kecamatan Trawas. Dua sejarah yang sangat penting yaitu berhubungan dengan kepurbakalaan ini ialah angka 977 M yang dipahatkan sebelah kanan dan tulisan "GEMPENG" di sebelah kiri dinding belakang, di samping itu juga terdapat tulisan di sudut tenggara. Dalam sejarah diketahui bahwa Raja Udayana yang berasal dari Bali telah menikah dengan putri Gunapruyadharmapatni dari Jawa dari perkawinan lahirlah Airlangga pada tahun 977 M. Jadi tahun 977 M yang terdapat pada dinding merupakan tahun pembuatan Pertitan Jolotundo yang dipersiapkan untuk Airlangga.

3) Air Terjun Dlundung

Obyek wisata ini terletak di Desa Kemloko Kecamatan Trawas dengan nuansa pegunungan yang terasa sejuk dan rimbunan pohon yang masih alami membuat air terjun Dlundung sebagai tempat tujuan wisata yang menarik untuk dikunjungi. Lagipula tempat tujuan wisata yang mempesona ini mudah dijangkau karena letaknya yang hanya berjarak 40 km dari Kota Mojokerto. Dapat dicapai dengan kendaraan pribadi ataupun sepeda motor. Di samping itu tempat wisata ini sungguh cocok untuk bersantai dan melepas lelah bagi para remaja yang suka berkemah karena tersedia arena perkemahan yang cukup luas dan nyaman.

4) Wisata Alam Air Panas

Sumber air yang keluar di lereng Gunung Welirang ini mempunyai daya tarik tersendiri bagi pengunjungnya. Di samping menyenangkan untuk rekreasi keluarga, air panas ini dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit sehingga memberikan kesan tersendiri untuk dikunjungi. Keadaan lingkungan di sekitarnya yang masih alami dengan dikelilingi oleh rimbunya pepohonan dan semak belukar yang bisa memberikan rasa sejuk dan nyaman. Obyek wisata ini terletak di Desa Padusan Kecamatan Pacet. Bagi pengunjung yang ingin berendam di kehangatan air panas Pacet telah disediakan tempat bak penampungan yang cukup luas. Di samping itu juga tersedia kolam renang air dingin yang cukup bersih. Obyek wisata ini hanya berjarak 32 km dari pusat Kota Mojokerto yang mudah dijangkau baik dengan kendaraan pribadi maupun angkutan umum.

5) Air Terjun Cuban Cunggu

Air terjun yang jauh dari ketinggian lebih dari 30 meter dari sumbernya, terletak 32 km dari kota Mojokerto atau 15 km arah barat Taman Safari Pandaan menuju lokasi air terjun Cuban Cunggu dapat ditempuh dengan mudah dengan kendaraan roda empat. Letaknya tidak jauh dari Pemandian Air Panas (Padusan Pacet). Dengan udara yang sejuk dan panorama yang menarik sangat cocok dan menyenangkan untuk wisata keluarga.

6) Taman dan Pemandian Ubalan

Pemandian Ubalan merupakan obyek wisata buatan yang telah ditata dengan indah yang terletak di Desa Padusan Kecamatan Pacet. Di samping pemandian juga dilengkapi tempat bermain anak-anak kemudian kawasan bukit atau hutan, restoran serta cottage atau penginapan. Berbagai aneka buah-buahan dan sayur-sayuran biasanya digelar masyarakat di sekitar obyek wisata.

Pemandian Ubalan yang hanya berjarak 32 km dari kota Mojokerto tak pernah sepi dari pengunjung. Karena di samping lokasinya yang mudah dijangkau keadaan lingkungannya masih nampak alami. Pepohonan nampak subur menghijau mengelilingi obyek wisata ini, air kolam renang yang bersih dan sejuk membuat pengunjung betah berlama-lama di tempat ini.

7) Sumber Api alam Berkucuk

Sumber Api Alam Berkucuk terletak di Dusun Berkucuk Dea Tempuran Kecamatan Sooko terletak 3 km dari pusat Kota Mojokerto, dan dapat ditempuh dengan kondisi jalan yang sangat baik. Api ajaib Bekucuk memiliki keistimewaan kobaran api menjulang ke atas 5 m – 10 m dari sumber di atas air yang menggelegak atau bekucuk tidak ada henti-hentinya sejak jaman dahulu. Terletak di areal tanah 1105 m² ditepian desa dengan latar belakang hamparan sawah. Pada malam hari merupakan waktu yang tepat untuk menikmati Api Ajaib Bekucuk.

8) Cek Dam Tanjungan Kemlagi

Tanjungan Cek Dam Kemlagi merupakan sebuah danau buatan dengan luas genangan air sekitar 13 ha dari luas seluruhnya 27 ha yang terletak di Desa Tanjungan Kecamatan Kemlagi Mojokerto yang dapat ditempuh dari perempatan jalan raya Kemlagi tepatnya pada kilometer 9 terus lurus ke utara sejauh kurang lebih 3 km masuk Desa Tanjungan.

Pengembangan wisata yang dilakukan Kabupaten Mojokerto selain obyek wisata alam dan wisata Purbakala di atas juga sedang dikembangkan bidang seni dan budaya antara lain :

1) Pakaian Adat Pengantin Mojoputri

Sebagai kekayaan budaya masyarakat Kabupaten Mojokerto tata rias pengantin Mojoputri sekar kedaton diangkat dari bukit hasil penelitian sejarah. Busana pengantin Mojoputri yang merupakan hasil alkuturasi budaya yang berkembang sejak abad 13 hingga kini. Ciri yang mencolok tata rias pengantin Mojoputri yaitu mengikuti corak dandanan jaman Mojopahit, jaman kebesaran Islam Demak – Mataram dan jaman Penjajahan Belanda. Busana pengantin Mojoputri biasanya dikenakan oleh masyarakat Mojokerto yang melangsungkan suatu pernikahan.

2) Upacara Adat Temu Manten “Mayang Qubro”

Upacara adat ini diangkat dari perpaduan antara nilai tradisi Jawa (Mojopahit) dan nilai Islami. Kaya “Mayang” diambil dari nama kebesaran R. Wijaya pada saat penobatan menjadi Raja Mojopahit menggunakan mahkota dengan bersangkutan “Mayang Mekar.” Qubro diambil dari nama istilah besar pada kegiatan ritual yang bernuansa Islam. Upacara adat temu manten Mayang Qubro dari Kabupaten Mojokerto ini telah berhasil sebagai penyaji terbaik pada festival upacara adat se-Jawa Timur di Surabaya.

3) Kesenian Ujung Peninggalan Mojopahit

Konon pada masa R. Wijaya membuka (Babat) hutan Tarik yang kemudian dari bakal menjadi pusat kerajaan Mojopahit bersama pendukung mengalami berbagai kesulitan, hambatan dan perlawanan dari para dayang, jin, peri, peryangan. Untuk menambah kekuatan fisik dan mental spiritual, R. Wijaya memberikan bekal jaya kawijayan/kesaktian menggunakan senjata “Sodo Lanang.”

Atraksi kesenian Ujung diadakan pada saat hari baik tatkala bulan purnama, di tempat khusus seperti lapangan, muka balai desa, muka pendopo agung dan candi-candi peninggalan Mojokerto. Kesenian Ujung perkembangannya sekarang menampilkan bentuk kreatif antara lain dengan menggunakan alat pukul “Sodo Lanang” dalam ukuran gede ditambah dengan penampilan seperti reog/jatilan, warok ponorogo, lawak lokal dan tampilan penari-penari cantik semakin memukau para penonton.

4) Kesenian Wayang Kulit

Dalam Kitab Arjuna Wiwaha diungkapkan bahwa kesenian wayang sudah berkembang dan digemari masyarakat sejak jaman Erlangga Raja Kahuripan yang beberapa sumber sejarah ditenggarahi terletak di wilayah Kabupaten Mojokerto. Dari sumber cerita Jawa menerangkan bahwa kesenian wayang juga berkembang pada masa pemerintahan Raja Aji Joyoboyo di Memenang Kediri sekitar tahun 930 M.

Di Kabupaten Mojokerto kesenian wayang kulit dikembangkan oleh Ki Dalang Pit Asmoro (Almarhum) dari Bejjong Trowulan dengan ciri khas daerah Wayang versi Trowulan. Ki Dalang Pit Asmoro boleh dikata sebagai perintis dan sekaligus sebagai guru dari dalang-dalang di Kabupaten Mojokerto yang dikenal hingga saat ini. Di daerah Mojokerto wilayah timur juga berkembang seni Pendalangan wayang kulit (versi) porong yang tokohnya adalah Ki Sulaiman.

5) Kesenian Bantengan

Kesenian rakyat Bantengan berasal dari Kecamatan Pacet, tepatnya di Desa Made yang dahulunya merupakan desa yang berdekatan dengan hutan di lereng gunung welirang. Konon di kawasan hutan tersebut banyak hidup bermacam-macam satwa liar termasuk di antaranya adalah Banteng yang saat sekarang binatang itu sudah punah tidak ada sama sekali.

Pada saat itu seorang penduduk Desa Made yang bernama Paimin tengah memasuki hutan dan mendapati seonggokan kerangka Banteng yang masih lengkap. Kerangka Banteng itu dengan susah payah dibawa pulang dan dibersihkan, kemudian ditempatkan di salah satu tempat di rumahnya, dari kejadian itu Pak Paimin mendapatkan inspirasi untuk mengenang satwa Banteng-banteng itu dengan sebuah atraksi.

Atraksi itu diperankan oleh dua orang, satu orang berperan di depan memainkan kepala dan tanduk yang sekaligus sebagai kaki depan. Atraksi gerakan adalah menggambarkan gerakan-gerakan dan sikap banteng sewaktu sedang berkubang, banteng gabul dan sebagainya. Untuk menyemarakkan atraksi Pak Paimin juga melengkapi dengan musik gamelan terbang dan jidor. Dalam atraksi biasanya ditampilkan dua bantengan sedang berlaga dan

dilengkapi dengan satwa lain seperti harimau, kera, dan burung mulai dikembangkan dengan atraksi pencak silat dan barong seng.

6) Kesenian Ludruk

Ludruk termasuk seni teater tradisional yang sangat digemari oleh masyarakat di Kabupaten Mojokerto. Untuk menarik para penggemar seni teater ludruk pada pagelarannya sudah mulai dikembangkan dan banyak kreasi-kreasi baru, baik musik iringan cerita maupun penampilan yang lebih segar memberikan pesona tersendiri bagi penggemarnya. Kesenian ludruk terdapat di Kecamatan Kemlagi dan Jetis.

4.1.3 Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Daerah disebutkan bahwa tugas pokok Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Pariwisata dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Program
- 2) Pelaksanaan Kebijakan Operasional
- 3) Pemberian Pembinaan dan Perijinan
- 4) Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian
- 5) Pelaksanaan Tugas Ketatausahaan
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari peraturan itu maka ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 19 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh seorang Wali Kepala Dinas yang mempunyai tugas:

- a) Membantu Kepala Dinas dalam menjalankan wewenang dan kewajibannya. Mengkoordinasikan kegiatan internal satuan kerja lingkup Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas.
 - b) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- b. Bagian Tata Usaha
- 1) Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan meliputi urusan umum kepegawaian dan keuangan.
 - 2) Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, pengumpulan dan pengolahan data.
 - b) Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan.
 - c) Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana.
 - d) Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.
 - e) Pengelolaam urusan rumah tangga surat menyurat dan kearsipan.
 - f) Penyiapan data dan iformasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan investarisasi.
 - g) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.
 - h) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- c. Sub Bagian Umum
- Mempunyai tugas :
- 1) Melaksanakan Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan.
 - 2) Melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol.
 - 3) Melakukan analisis kebutuhan barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain.
 - 4) Mengumpulkan dan mengolah data bahan penyusunan program.
 - 5) Merumuskan dan menyusun program dan proyek.

- 6) Melaksanakan pengawasan pelaksanaan program dan proyek pembangunan.
- 7) Menghimpun dan mengolah data serta dokumentasi.
- 8) Melaksanakan tugas-tugas di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- 9) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan.
- 10) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

d. Sub Bagian

Kepegawaian mempunyai tugas :

- 1) Menyelenggarakan Tata Usaha Kepegawaian yang meliputi pengumpulan data pegawai, pembuatan buku induk pegawai, usulan-usulan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dalam jabatan dan pemberhentian pegawai.
- 2) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan.
- 3) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala bagian Tata Usaha.

e. Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- 1) Menghimpun dan mengolah data untuk menyusun anggaran rutin dan pembangunan.
- 2) Menyiapkan usulan Anggaran Dinas.
- 3) Mengolah Tata Usaha Keuangan dan Pembukuan serta realisasi APBD.
- 4) Melakukan pembayaran gaji pegawai, keuangan perjalanan dinas penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran dinas.
- 5) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha

f. Sub Dinas Obyek dan Daya Tarik Wisata

- 1) Sub Dinas Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan meliputi obyek wisata dan atraksi wisata serta rekreasi dan hiburan umum.

- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Dinas Obyek dan Daya Tarik Wisata, mempunyai fungsi:
 - a) Pembinaan dan upaya pengembangan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum.
 - b) Penyelenggaraan perijinan di bidang obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum.
 - c) Pelaksanaan pemantauan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum.
 - d) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.
 - e) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

g. Seksi Obyek Wisata

Mempunyai tugas :

- 1) Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan obyek wisata.
- 2) Menyiapkan bahan pembinaan dan upaya pengembangan obyek wisata.
- 3) Menyiapkan bahan untuk mengembangkan karya seni budaya nasional sebagai obyek wisata di daerah sesuai dengan etika dan estetika lingkungan setempat.
- 4) Menyiapkan petunjuk tentang pembatasan semua jenis unsur seni budaya asing yang berpengaruh negatif pada pembangunan bangsa dan negara.
- 5) Melaksanakan perijinan di bidang obyek wisata.
- 6) Melaksanakan pemantauan terhadap obyek wisata.
- 7) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan.
- 8) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Obyek dan Daya Tarik Wisata.

h. Seksi Atraksi Wisata

Mempunyai tugas :

- 1) Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan atraksi wisata.
- 2) Menyiapkan bahan pembinaan dan upaya pengembangan atraksi wisata.
- 3) Melaksanakan perijinan di bidang atraksi wisata.
- 4) Melaksanakan pemantauan dan menyusun laporan.
- 5) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan.

6) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Obyek dan Daya Tarik Wisata.

i. Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum

Mempunyai tugas :

- 1) Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan rekreasi dan hiburan umum.
- 2) Menyiapkan bahan pembinaan dan upaya pengembangan atraksi wisata sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah.
- 3) Melaksanakan perijinan di bidang rekreasi dan hiburan umum.
- 4) Melaksanakan pemantauan terhadap tempat rekreasi dan hiburan umum.
- 5) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan.
- 6) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas dan Daya Tarik Wisata.

j. Sub Dinas Bina Sarana Pariwisata

Mempunyai fungsi :

- 1) Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan meliputi akomodasi rumah makan dan beserta ketenagakerjaan.
- 2) Pembinaan dan pengembangan tenaga.
- 3) Penyelenggaraan perijinan sarana dan tenaga kerja.
- 4) Pelaksanaan pemantauan kegiatan pengembangan sarana dan tenaga kerja.
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

k. Seksi Akomodasi

Mempunyai tugas :

- 1) Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan
- 2) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sarana-sarana
- 3) Menyusun petunjuk teknis dalam kegiatan pelayanan jasa.
- 4) Melaksanakan perijinan dibidang akomodasi.
- 5) Melaksanakan pemantauan.
- 6) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan.

7) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Sarana Pariwisata.

l. Seksi Rumah Makan dan Bar

Mempunyai tugas :

- 1) Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan
- 2) Menyiapkan pembinaan dan upaya pengembangan sarana.
- 3) Menyusun petunjuk teknis dalam kegiatan pelayanan jasa.
- 4) Melaksanakan perijinan di bidang rumah makan dan bar.
- 5) Melaksanakan pemantauan.
- 6) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan.
- 7) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Sarana Pariwisata.

m. Seksi Ketenagakerjaan

Mempunyai tugas :

- 1) Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan
- 2) Melaksanakan bahan pembinaan tenaga kerja.
- 3) Melaksanakan perijinan ketenagakerjaan di bidang pariwisata.
- 4) Melaksanakan pemantauan kegiatan dan perkembangan ketenagakerjaan di bidang pariwisata.
- 5) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Sarana Pariwisata.

n. Sub Dinas Pemasaran dan Penyuluhan Pariwisata

Sub Dinas Pemasaran dan Penyuluhan Pariwisata, mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan meliputi promosi dan pelayanan informasi serta bimbingan pariwisata.

Sub Dinas Pemasaran dan Penyuluhan Wisata, mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan
- 2) Pelaksanaan pemantauan.
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.
- 4) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

o. Seksi Promosi

Mempunyai tugas :

- 1) Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan.
- 2) Melaksanakan menyiapkan bahan kerjasama promosi wisata.
- 3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengembangan pembangunan sarana promosi.
- 4) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan.
- 5) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sub Dinas Pemasaran dan Penyuluhan Pariwisata.

p. Seksi Pelayanan Informasi

Mempunyai tugas :

- 1) Mengumpulkan data pelayanan informasi.
- 2) Menyiapkan bahan pembinaan serta kerjasama dengan instansi pemerintah dan atau swasta dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi kepariwisataan.
- 3) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan.
- 4) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sub Dinas Pemasaran dan Penyuluhan Pariwisata.

q. Seksi Bimbingan Pariwisata

Mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan dan mengumpulkan bahan pembinaan
- 2) Melaksanakan dan merencanakan bimbingan pariwisata.
- 3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan meningkatkan peran serta masyarakat.
- 4) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan.
- 5) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sub Dinas Pemasaran dan Penyuluhan Pariwisata.

r. Sub Dinas Kebudayaan

Sub Dinas Kebudayaan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan meliputi kesenian dan nilai budaya, sejarah dan musium purbakala.

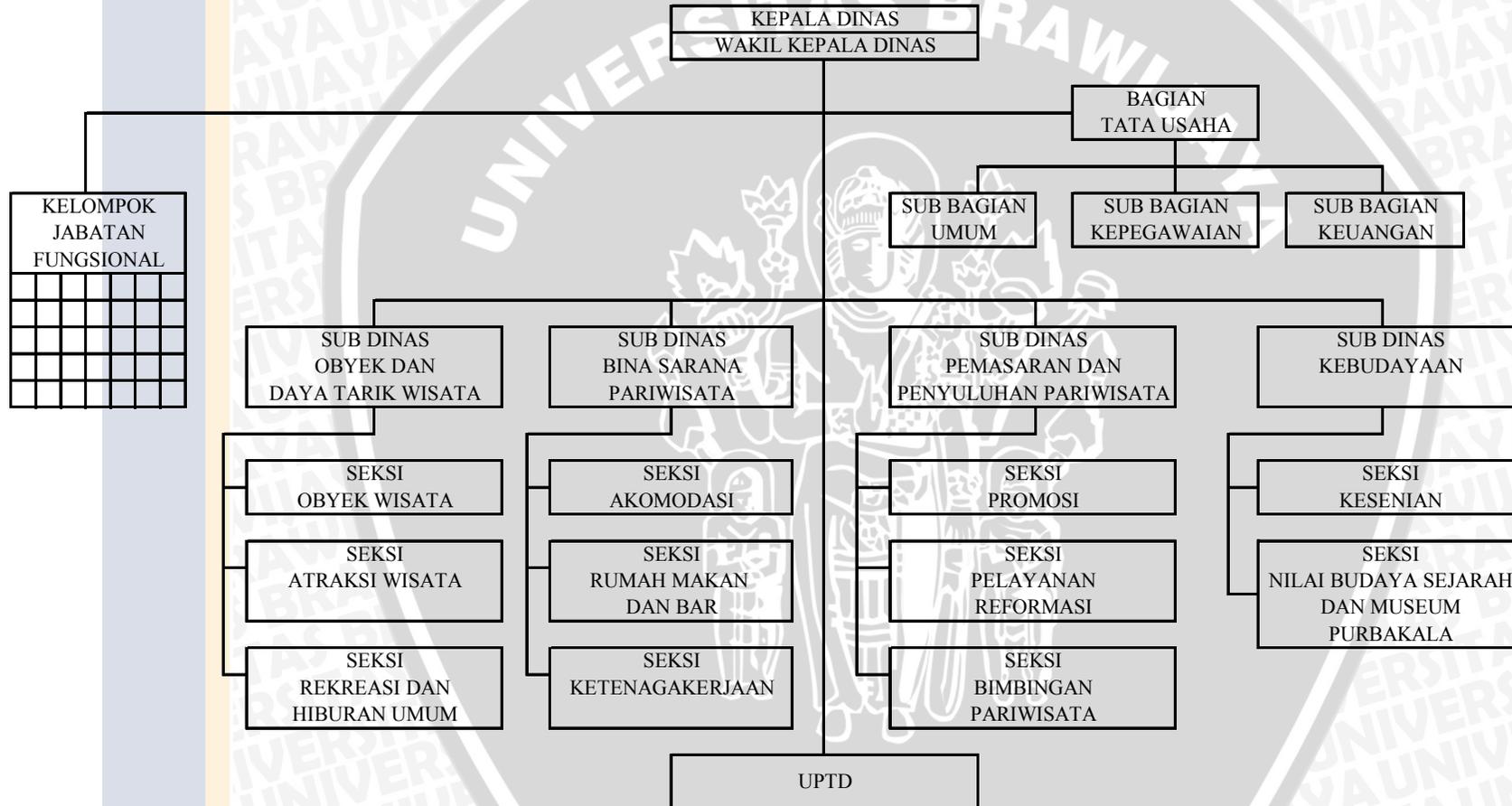
Sub Dinas Kebudayaan, mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan, pendataan, perencanaan dan pelaksanaan pengembangan seni budaya.
 - 2) Pelaksanaan perijinan penyelenggaraan festival seni budaya.
 - 3) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kebudayaan, kesenian, kesejahteraan, nilai tradisional, permesiuman, kesusastraan dan kebahasaan.
 - 4) Pelaksanaan kerjasama dibidang kebudayaan.
 - 5) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan.
 - 6) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
- s. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan keahlian dan kebutuhan.
- t. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Bagan struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar
Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto



Sumber Data : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto, 2007.

4.1.4 Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Pemerintah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam kedudukannya sebagai unsur Pemerintah Kabupaten Mojokerto di bidang Kepariwisata dan Kebudayaan serta sesuai dengan tuntutan kinerja, kualitas aparatur yang diharapkan dapat memberikan pelayanan berkuantitas kepada masyarakat, maka perlu merumuskan visi dan misinya sebagai satu kesatuan dengan menyusun Rencana Strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto, diharapkan mampu berperan menentukan dinamika perubahan lingkungan strategis. Sehingga dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik.

Visi yang dimaksud adalah merupakan cara pandang jauh kedepan yang pada akhirnya dapat mencerminkan apa yang ingin dicapai dan kemana suatu organisasi diarahkan, sehingga pada intinya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan akan menjadi akelator bagi pelaksanaan tugas di bidang pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut maka dirumuskan visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :
“Menetapkan pariwisata dan kebudayaan dapat menumbuhkembangkan kesejahteraan dan perdamaian.”

Untuk memberikan kejelasan terhadap visi yang telah dijelaskan di atas maka perlu diberikan uraian penjelasan bahwa filosofi dari visi ini adalah menekankan dimana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan salah satu andalan pembangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilaksanakan secara berkesinambungan, selaras dan terpadu dengan tetap mengembangkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan mengembangkan prinsip tersebut, maka visi jauh kedepan akan terwujud suatu nuansa kerukunan, persahabatan, kedamaian serta citra Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto berdasarkan Sapta Pesona.

Guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto perlu menetapkan misi secara jelas sebagai suatu pernyataan yang menetapkan tujuan dari sasaran yang ingin dicapai.

Pernyataan misi juga diharapkan mampu membawa organisasi pada suatu fokus yang dapat memberikan penjelasan tentang keberadaan organisasi, kegiatan apa yang dilakukan dan bagaimana cara melaksanakannya. Misi juga merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan umum organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan makna dan ciri visi tersebut maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto merumuskan pernyataan misinya sebagai berikut :

- 1) Sumber daya manusia, diarahkan agar mampu mandiri, tangguh, kreatif, penuh dedikasi, profesional serta berwawasan kebangsaan yang diwujudkan melalui pengajaran pendidikan, dan penyuluhan di bidang kepariwisataan dan kebudayaan.
- 2) Meningkatkan pemasaran yang dilaksanakan secara terarah, terencana terpadu, bertanggung jawab yang berkesinambungan serta diarahkan untuk membuka peluang kerja dan memberdayakan pengusaha kecil, koperasi dan ekonomi kerakyatan.
- 3) Pengembangan produk pariwisata dan kebudayaan didasarkan sumber daya alam dan budaya yang dikemas dan diberdayakan melalui penerapan teknologi, pemanfaatan ilmu pengetahuan serta pelestarian nilai-nilai tradisional.
- 4) Perlindungan wisatawan melalui pemberian jaminan yang berkekuatan hukum, sehingga tercipta kondisi kenyamanan selama menikmati perjalanan wisata.

4.1.5 Personalia

- 1) Jumlah Pegawai

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto didukung oleh Sumber Daya Manusia yang bervariasi baik dari segi pangkat dan golongan kepegawaian, jenis pendidikan dan umur, yang satu sama lain saling mendukung. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 62 orang, dengan rincian sebagai berikut :

- a. 45 orang berstatus PNS

- b. 11 orang berstatus karyawan tunjangan harian lepas (THL)
- c. 6 orang berstatus tunjangan dari dinas.

Berdasarkan eselon, 45 karyawan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto dapat diperinci sebagai berikut :

Tabel
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto
Eselon Kepegawaian

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon II	1 orang
2	Eselon III	4 orang
3	Eselon IV	14 orang
4	Staf	26 orang
Jumlah		45 orang

Sumber data : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto, 2007.

Sementara menurut golongannya karyawan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

Tabel
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto
Golongan Kepegawaian

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	7 orang
2	Golongan III	26 orang
3	Golongan II	12 orang
Jumlah		45 orang

Sumber data : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto, 2007.

Adapun dari tingkat pendidikan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto mempunyai jenjang pendidikan yang beragam disajikan pada tabel berikut :

Tabel
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto
Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana	7 orang
2	Sarjana	17 orang
3	Sarjana Muda / D3	7 orang
4	SLTA	14 orang
Jumlah		45 orang

Sumber data : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto, 2007.

2) Fasilitas kantor

a. Barang tidak bergerak

1. Ruangan kantor 9 buah
2. Ruangan pertemuan/rapat 1 buah
3. Musholla 1 buah
4. Lapangan tenes 1 buah

b. Barang bergerak

1. Meja dan kursi 44 pasang
2. Kursi tamu 8 set
3. Almari arsip 6 buah
4. Filling kabinet 8 buah
5. Komputer 2 buah
6. Mesin ketik 4 buah
7. Telpon 2 buah
8. Faksimili 1 buah
9. Kendaraan roda 4 1 buah
10. Mesin stensil 1 buah
11. Pesawat TV 1 buah
12. Radio Tape 1 buah
13. Kipas angin 2 buah
14. Almari etalase 1 buah
15. Kursi pertemuan 62 buah

- | | |
|---------------------|--------|
| 16. VCD | 1 buah |
| 17. Gamelan slendro | 1 set |
| 18. Pesawat orari | 1 set |

4.1.6 Tujuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto

Tujuan organisasi merupakan penjabaran dari misi organisasi dan menunjukkan sesuai yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dalam kerangka perencanaan strategi tujuan organisasi akan mengarahkan perumusan, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan mendasarkan pada misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto maka penjabarannya ke dalam tujuan dapat dirumuskan sebagai berikut : “Peningkatan dan penekanan pada pemberdayaan masyarakat kecil dan menengah sehingga pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan diharapkan dapat menjadi salah satu sektor andalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.”

4.2 Penyajian Data

4.2.1 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD Kabupaten Mojokerto

Pendapatan daerah yang bersumber dari sektor pariwisata meliputi pajak daerah (Pajak Hotel dan Rumah Makan, Pajak Hiburan) dan Retribusi Daerah (Retribusi Parkir di Obyek Wisata, Retribusi Pemakaian Obyek Wisata) untuk mengetahui berapa besar pendapatan daerah yang diberikan dari sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel
Realisasi PAD dari Sektor Pariwisata
Per Jenis Pendapatan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2004 – 2006

Tahun	Jenis Pendapatan Dari Sektor Pariwisata	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2004	a. Pajak	223.750.000	230.542.496	103,04
	- Pajak Hotel	105.000.000	110.861.158	105,58
	- Pajak Restoran	48.750.000	48.983.638	100,48
	- Pajak Hiburan	70.000.000	70.697.700	101,00
	b. Retribusi	325.765.200	533.319.725	163,71
	- Parkir Obyek Wisata	12.500.200	15.095.500	120,76
	- Pemakaian Obyek Wisata	313.265.000	518.224.225	165,43
	Jumlah	549.515.200	763.862.221	139,01
2005	a. Pajak	248.750.000	261.620.182	105,17
	- Pajak Hotel	115.000.000	115.000.000	100,00
	- Pajak Restoran	58.750.000	59.983.652	102,10
	- Pajak Hiburan	75.000.000	86.636.530	115,52
	b. Retribusi	794.701.200	804.191.149	101,19
	- Parkir Obyek Wisata	16.500.200	15.095.500	91,49
	- Pemakaian Obyek Wisata	778.201.000	789.095.649	101,40
	Jumlah	1.043.451.200	1.065.811.331	102,14
2006	a. Pajak	270.750.000	276.522.951	102,13
	- Pajak Hotel	125.000.000	126.357.390	101,09
	- Pajak Restoran	65.750.000	68.578.209	104,30
	- Pajak Hiburan	80.000.000	81.587.352	101,98
	b. Retribusi	874.525.200	948.107.418	108,41
	- Parkir Obyek Wisata	20.500.200	25.537.200	124,57
	- Pemakaian Obyek Wisata	854.025.000	922.570.218	108,03
	Jumlah	1.145.275.200	1.224.630.369	106,93

Sumber : Data sekunder yang diolah.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dari sektor pariwisata tahun 2004 – 2006 mencapai target bahkan melebihi target. Pada tahun 2004 targetnya sebesar Rp. 549.515.200 tetapi realisasinya sebesar Rp. 763.862.221 berarti persentase pencapaiannya melebihi target yaitu sebesar 139,01%, pada tahun 2005 targetnya sebesar Rp. 1.043.451.200 tetapi realisasinya sebesar Rp. 1.065.811.331 berarti persentase pencapaiannya melebihi target yaitu sebesar 102,14%, dan pada tahun 2006 targetnya sebesar Rp. 1.145.275.200 tetapi realisasinya sebesar Rp. 1.224.630.369 berarti persentase pencapaiannya melebihi target yaitu sebesar 106,93%. Realisasi pendapatan dari sektor Pariwisata di Kabupaten Mojokerto dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2004 sebesar Rp. 763.862.221, kemudian pada tahun 2005 mengalami peningkatan menjadi Rp. 1.065.811.331, pada tahun 2006 kembali mengalami peningkatan menjadi Rp. 1.224.630.369.

Untuk mengetahui besarnya kontribusi pendapatan dari sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mojokerto disajikan pada tabel berikut :

Tabel
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD
Tahun 2004 – 2006

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Sektor Pariwisata (Rp)	Persentase (%)
2004	34.046.267.149,25	763.862.221	2,24
2005	48.575.093.584,85	1.065.811.331	2,19
2006	52.961.484.889,77	1.224.630.369	2,31
Jumlah	135.582.845.623,87	3.054.303.921	2,25
Rata-rata	45.194.281.874,62	1.018.101.307	2,25

Sumber : Data sekunder yang sudah diolah.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 berfluktuasi dan rata-rata kontribusinya sebesar 2,25% per tahun.

4.2.2 Kendala Peningkatan Kontribusi sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mojokerto

Dalam upaya pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Mojokerto maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menemui beberapa kendala yang dapat mempengaruhi proses pengembangan tersebut. Akan tetapi selain beberapa kendala juga memiliki faktor yang dapat menuju upaya pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Mojokerto.

1) Faktor-faktor Pendukung

Sesuai dengan wawancara peneliti dengan Joko Prijono selaku Kepala Seksi Atraksi Wisata mengungkapkan bahwa :

Pada dasarnya Kabupaten Mojokerto kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman budaya, kesenian tradisional peninggalan kerajaan Mojopahit yang merupakan modal utama dalam pengembangan dan peningkatan Pariwisata di Kabupaten Mojokerto. (Wawancara tanggal 15 Juli 2007).

Berdasarkan pendapat di atas yang menjadi faktor pendukung dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Mojokerto selama ini adalah sebagai berikut :

a) Letak geografis

Dari tinjauan geografis Kabupaten Mojokerto memiliki wilayah yang menarik untuk dijadikan sebagai daerah tujuan wisata karena Kabupaten Mojokerto merupakan daerah yang memiliki wilayah yang sejuk dan memiliki potensi tanah yang subur. Sebagian wilayahnya terletak di lereng gunung dan bukit yang mempunyai pemandangan alam yang sangat indah. Selain itu dilihat dari geografi pariwisata Kabupaten Mojokerto termasuk kawasan lintasa Gerbag Bandara Utama masuknya wisatawan mancanegara, yaitu Bandara Yogyakarta, Bandara Juanda dan Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali. Kabupaten Mojokerto juga termasuk kawasan mata rantai daerah tujuan wisata (Yogyakarta, Surabaya, dan Malang).

b) Perkembangan Sarana Penginapan

Berkembangnya sarana penginapan/hotel di Kabupaten Mojokerto cukup pesat yang sampai saat ini berdasarkan penelitian di lapangan jenis dan fasilitas yang sangat memadai. Dimana penginapan merupakan salah satu sarana pokok yang sangat penting bagi kelangsungan pengembangan pariwisata. Dengan adanya hotel yang berbintang dengan fasilitas yang memadai maka ini menjadikan Kabupaten Mojokerto menjadi tujuan para wisatawan terutama mancanegara meskipun selama ini mereka hanya transit saja untuk melanjutkan ke daerah lain. Hal ini merupakan menjadi keuntungan bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah.

c) UU No 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata

Sesuai dengan tujuan pariwisata yang dituangkan dalam UU No. 9 Tahun 1990 mendorong Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk mengembangkan, mendayagunakan dan melestarikan obyek wisata yang ada agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

d) Adanya Potensi Pariwisata dan Seni Budaya

Kabupaten Mojokerto memiliki latar belakang kesenian dan kebudayaan yang hebat yaitu peninggalan kerajaan Mojopahit dan memiliki berbagai kesenian daerah yang bisa dijadikan wisata unggulan

yang meliputi wayang kulit, jaitilan, seni tayub bantengan, ujung dan kesenian lain yang bernafaskan religius. Apabila ini bisa dikembangkan dengan baik maka bisa menjadikan Kabupaten Mojokerto menjadi daerah tujuan wisata unggulan.

2) Faktor Penghambat

Yang menjadi kendala dan faktor penghambat dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

a) Keterbatasan Dana

Adanya keterbatasan dana yang tersedia sehingga pengembangan sektor pariwisata tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Dan hal inilah yang menjadi masalah utama. Khususnya untuk pengembangan sarana dan prasarana di obyek wisata. Selama ini dana yang diperlukan dibebankan pada APBD.

b) Kualitas pelaksana pengembangan pariwisata dan kebudayaan masih kurang

Dengan melihat latar belakang pendidikan pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto hampir seluruh pegawai tersebut tidak memiliki basic pariwisata sama sekali sehingga mereka belum bisa melaksanakan pengembangan pariwisata secara maksimal dan bekerja secara profesional. Oleh sebab itu perlu diberikan pelatihan dan pendidikan untuk menunjang peningkatan kualitas tersebut.

c) Fasilitas jalan

Kabupaten Mojokerto sebenarnya memiliki jala yang sudah bagus, karena seluruh jalan utama sudah diaspal. Akan tetapi yang menjadi permasalahan sekarang adalah jalan untuk menuju obyek wisata kawasan Pacet dan Trawas sangatlah sempit sehingga mengalami kesulitan apabila bersimpangan. Padahal suatu obyek wisata akan menjadi daerah tujuan wisata apabila tersedia sarana dan prasarana yang memadai termasuk sarana jalan karena merupakan faktor utama. Hal ini yang menjadi kendala dalam pengembangan sektor pariwisata dan menyebabkan tidak ada biro

perjalanan wisata nasional maupun internasional yang mengikutsertakan Kabupaten Mojokerto menjadi daerah tujuan wisata dalam kalender wisata.

Hal tersebut di atas seperti apa yang diungkapkan oleh Saudara Dedik selaku pengunjung obyek wisata sebagai berikut :

Sebenarnya kondisi jalan menuju obyek wisata Pacet dan Trawas sudah mulus, akan tetapi jalannya sempit sehingga kami mengalami kesulitan untuk lewat apabila simpangan dengan mobil ataupun kendaraan roda empat lainnya jadi harus berhenti dahulu salah satu memberi kesempatan untuk lewat. Padahal ada jalan-jalan tertentu yang menanjak dan berliku yang sangat membahayakan apabila untuk berhenti. (Wawancara tanggal 19 Juli 2007).

d) Pengemasan produk-produk pariwisata dan Seni Budaya masih kurang

Seni budaya sebagai salah satu komoditas penting dalam bidang pariwisata oleh karena itu perlu dikembangkan. Sebenarnya Kabupaten Mojokerto memiliki produk-produk wisata, seni dan budaya sangat banyak dan menarik. Sebuah pasar wisata menghendaki produk seni budaya yang atraktif spesifik, komunikatif dan memiliki komunitas. Akan tetapi sampai saat ini belum bisa menjadikan daerah tersebut sebagai daerah wisata yang diminati wisatawan terutama mancanegara. Hal ini dikarenakan produk seni dan budaya yang ada tersebut belum bisa dikemas dengan baik yang menunjukkan ciri khas dari Kabupaten Mojokerto yang membedakan dengan daerah yang lain.

4.2.3 Upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Meningkatkan PAD dari Sektor Pariwisata

Strategi atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi sebab strategi menetapkan cara untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi tersebut merupakan satu rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan yang meliputi penetapan kebijaksanaan program organisasi secara operasional dan kegiatan yang akan dilaksanakan

dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang terbatas dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Berdasarkan arahan arti dan makna penerapan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, maka dapat dirumuskan kebijaksanaan, program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

1) Kebijaksanaan organisasi

Kebijaksanaan adalah merupakan pedoman pelaksanaan tindakan yang berupa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu : Pariwisata sebagai salah satu sektor andalan pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan selaras dan terpadu dengan tetap mengembangkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

2) Program operasional organisasi

Program operasional pada dasarnya merupakan langkah implementasi kebijaksanaan penjabaran secara rinci. Langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam waktu 1 sampai dengan 5 tahun mendatang. Berdasarkan kebijaksanaan organisasi yang telah ditetapkan, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto merumuskan operasional sebagai berikut :

- a. Pengembangan dan peningkatan Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW)
- b. Peningkatan pemasaran dan penyuluhan
- c. Peningkatan bina sarana
- d. Peningkatan nilai-nilai budaya dan kesenian
- e. Peningkatan ke tatausahaan

3) Kegiatan organisasi

Strategi implementasi perencanaan strategik (PS) setelah penetapan kebijaksanaan dan program adalah perumusan dan penetapan kegiatan organisasi yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun ke depan. Dengan berorientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran maka program operasional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto yang telah ditetapkan, dijabarkan ke dalam kegiatan organisasi sebagai berikut :

- a. Program pengembangan dan peningkatan Obyek dan Daya Tarik Wisata

1. Pembangunan fasilitas obyek wisata
2. Atraksi wisata
3. Pembinaan rekreasi dan hiburan umum.
- b. Program peningkatan pemasaran dan penyuluhan
 1. Peningkatan promosi wisata dan seni budaya
 2. Peningkatan pelayanan informasi wisata
 3. Pembinaan dan penyuluhan.
- c. Program peningkatan bina sarana
 1. Peningkatan kerjasama dengan PHRI
 2. Peningkatan kerja sama dengan pihak ketiga dalam pelayanan jasa.
- d. Program peningkatan nilai-nilai budaya dan kesenian
 1. Pembinaan dan pengembangan kebudayaan, kesejarahan, nilai tradisional, permuseuman, kesusasteraan dan kebahasaan
 2. Upaya penggalian dan pengemasan seni dan budaya serta pelestariannya.
- e. Program peningkatan Ketata Usahaan
 1. Peningkatan, pengelolaan administrasi kepegawaian
 2. Peningkatan, pengelolaan administrasi keuangan
 3. Peningkatan, pengelolaan administrasi umum.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam meningkatkan pendapatan daerah dari sektor wisata di Kabupaten Mojokerto

a. Peningkatan Pemasaran dan Promosi Pariwisata

Meningkatkan pemasaran dan promosi pariwisata merupakan misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto yang utama. Karena penyebaran informasi tentang obyek wisata melalui kegiatan promosi merupakan salah satu kegiatan vital dalam rangka pengembangan pariwisata. Kegiatan promosi itu merupakan tugas dari Sub Dinas Pemasaran dan Promosi Pariwisata yang di dalamnya memiliki kegiatan seputar persiapan bahan pembinaan, pengembangan dan melaksanakan penyebaran luasan informasi pariwisata secara regional dan internasional serta penyuluhan pariwisata.

Menurut Bapak Bambang Purbantoro Selaku Kasubdin Pemasaran dan Promosi Pariwisata mengatakan :

Kegiatan promosi yang dilakukan oleh Dinas antara lain dengan membuat brosur, leaflet, booklet dan buku panduan wisata yang kemudian disebarakan ke berbagai media dan mengikuti pameran dan festival pariwisata. Selain itu juga banyak kegiatan promosi lainnya. (Wawancara tanggal 16 Juli 2007).

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa kegiatan promosi pariwisata yang telah dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah :

- (1) Dengan membentuk Kelompok-kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) di sekitar obyek wisata.
- (2) Pembuatan leaflet, booklet, majalah yang disebarakan ke berbagai media.
- (3) Mengadakan promosi pariwisata ke daerah lain.
- (4) Menyelenggarakan tour musik wisata.
- (5) Mengikuti gelar wisata di TMII Jakarta, pameran dan festival wisata.

Adapun dalam melakukan usaha promosi di atas yang menjadi pedoman adalah terciptanya Program Sapta Pesona adalah kondisi yang harus diwujudkan dalam rangka menarik minat wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah khususnya obyek wisata. Di wilayah Kabupaten Mojokerto Sapta Pesona terdiri dari tujuh unsur yaitu : Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah-Tamah dan Kenangan. Sehingga para wisatawan yang datang berkunjung akan merasa betah tinggal lebih lama dan nantinya akan datang kembali untuk berkunjung.

Berdasarkan pengamatan peneliti kegiatan pemasaran dan promosi yang dilakukan selama ini hanya terbatas dalam negeri saja. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan dana dan apabila dilihat dari sarana jalan menuju obyek wisata belum memenuhi standar kelayakan sebab jalannya sangat sempit sehingga untuk jalan bus besar sangat kesulitan. Hal inilah yang menjadikan promosi yang dilakukan hanya sebatas dalam negeri saja.

b. Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata

Dari sekian banyaknya potensi yang ada di Kabupaten Mojokerto baru 8 obyek wisata yang telah dikelola dan dijadikan obyek wisata, yaitu kawasan purbakala Trowulan yang terdiri dari 11 obyek wisata yang tercakup dalam

satu paket wisata, Pethtan Jolotundo, Air terjun Dlundung, Wisata Alam Air Panas, Air Terjun Cuban Cunggu, Taman dan Pemandian Ubalan, Sumber Api Alam Bekucuk dan Cek Dam Kemlagi.

Semua obyek wisata tersebut di atas telah dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten sendiri dan pihak ketiga yaitu swasta, maka bagi pengunjung yang datang untuk menikmati obyek wisata tersebut ditarik retribusi, masing-masing obyek wisata, besarnya retribusi tidak sama. Besarnya retribusi yang harus dibayar atau terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan rumus :
Tarif retribusi x tingkat penggunaan jasa

Tingkat penggunaan jasa yang dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, misalnya berapa kali masuk tempat rekreasi, berapa kali, atau berapa jam parkir kendaraan.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Setelah terjadi tanah longsor di obyek wisata Sumber Air Panas Pacet tahun 2002. Upaya pengembangan sektor pariwisata dialihkan di kawasan Trowulan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Sri Winarni selaku Staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto bahwa :

Dengan adanya bencana alam tanah longsor yang terjadi di Air Panas menyebabkan pengembangan sektor pariwisata dialihkan di kawasan Trowulan yaitu dengan membangun fasilitas pendukung situs-situs kerajaan Mojopahit dan kios-kios souvenir serta pasar seni dengan

harapan jumlah kunjungan wisatawan kembali meningkat, selain itu juga tahun 2003 mulai dibangun kembali kolam renang di kawasan air panas. (Wawancara tanggal 19 Juli 2007).

Upaya pengembangan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam bidang obyek dan daya tarik wisata adalah :

- (1) Membangun fasilitas pendukung situs-situs kerajaan Mojopahit dan membangun kios-kios souvenir di kawasan Trowulan.
- (2) Selain itu juga melakukan pembenahan dan penataan obyek wisata sumber air panas Pacet pasca bencana yang baru dibangun tahun 2003.
- (3) Dengan membangun sebuah pasar seni yang merupakan suatu potensi pengembangan yang paling efektif dan efisien untuk sebuah pasar baru di Kabupaten Mojokerto karena Mojokerto dengan potensi alam dan budaya. Pasar seni tersebut penataannya yang artistik ala jaman kebesaran Mojopahit. Selain itu pasar seni ini merupakan sebuah media promosi pariwisata, seni dan budaya yang sedang berkembang di Mojokerto. Produk kerajinan juga dimasukkan dalam pasar seni. Pemerintah Kabupaten Mojokerto (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan) memilih lokasi di Gondang dan Trowulan karena lokasi tersebut menjanjikan bisa berkembang. Selain itu bentuk pengembangan lain yang bisa mengkhaskan wisata di Kabupaten Mojokerto adalah dengan membuat Jalur Bebas Asap yang berarti dalam wilayah tertentu dibuat satu perkampungan wisata jaman Mojopahit, dimana hanya terdapat andong, dokar, cekar, dan tidak ada mobil, sepeda motor, asap dan kebisingan.
- (4) Dengan membuat Jalur Pariwisata. Sebenarnya dari semua obyek wisata yang sedang dikembangkan sekarang ada jalur lingkaran selatan wilayah Mojokerto yang bisa dikembangkan sebagai Jalur Pariwisata. Jalur Pariwisata tersebut adalah dari arah Japanan → Ngoro Industri Persada → Pemandian Watonmas Jedong → Air Terjun Dlundung → Kolam Air Panas dan Air Terjun Cuban Cangu → Pemandian Ubalan → Candi Tikus dan Candi Bajangratu → Kolam Segaran → Candi Wringin Lawang → Air Ajaib Bekucuk → Kota Mojokerto.

c. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Dalam rangka mengembangkan potensi wisata Kabupaten Mojokerto, Pemerintah melakukan pengembangan di antaranya dengan mengembangkan sarana dan prasarana pariwisata. Layak dan tidaknya suatu daerah sebagai daerah tujuan wisata sangat ditentukan oleh keadaan dan tersedianya sarana dan prasarana pariwisata yang bisa menciptakan rasa nyaman sehingga wisatawan akan merasa betah dan tinggal lama di daerah tujuan wisata. Dalam melakukan pengembangan sarana dan prasana tersebut Pemerintah Kabupaten Mojokerto bekerjasama dengan berbagai pihak yaitu masyarakat dan swasta serta sektor terkait lainnya. Usaha pengembangan sarana dan prasarana terhadap kawasan wisata Kabupaten Mojokerto antara lain :

(1) Sarana Pokok Pariwisata

a) Hotel dan Penginapan

Keberadaan hotel/penginapan di Kabupaten Mojokerto cukup memadai, hal ini diungkapkan oleh Bapak Edy sebagai berikut :

Saya melihat ada banyak hotel dan penginapan di Mojokerto ini, khususnya di sekitar obyek wisata Trawas dan Pacet dengan kondisi yang cukup baik dan tarifnyapun tidak terlalu mahal, sehingga memudahkan pengunjung seperti saya untuk beristirahat dan menghilangkan lelah karena saya bukan penduduk asli Mojokerto (wawancara tanggal 19 Juli 2007).

Keberadaan sarana pokok pariwisata sangat penting untuk memenuhi kebutuhan wisatawan selama berada di daerah tujuan wisata yang termasuk sarana pokok pariwisata adalah tempat menginap/hotel, rumah makan/warung. Oleh karena itu bagi suatu daerah tujuan wisata harus terdapat hotel dan rumah makan yang cukup. Berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan penelitian di Kabupaten Mojokerto terdapat banyak hotel/ penginapan/pondokan. Selanjutnya secara rinci daftar hotel/ penginapan tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel
Sarana Hotel dan Penginapan di Kabupaten Mojokerto
Tahun 2007

No	Nama Usaha (Alamat)	Kelas	Kamar	Tarif (Rp. 000)	Fasilitas
1	Hotel Kartika Purnama Jl. Raya Pacet	Melati I	32	22,5 – 60	-
2	Hotel Bukit Raya Jl. Raya Air Panas Padusan Pacet	Melati I	22	35 – 50	R. Pertemuan
3	Pesanggrahan Jl. Raya Pacet	Melati I	9	25 – 30	R. Pertemuan
4	Hotel Sriwijaya Jl. Raya Pacet	Melati I	36	20 – 60	R. Pertemuan
5	Hotel Puncak Carina Jl. Raya Pacet	Melati 2	36	25 – 35	R. Pertemuan
6	Hotel Canggur Jl. Raya Pacet	Melati 2	28	80 – 90	R. Pertemuan R. Makan
7	Hotel Pariwisata Jl. Raya Pacet	Melati 1	15	20 – 35	-
8	Hotel Pariwisata Jl. Raya Pacet	Melati 1	10	20 – 110	R. Pertemuan K. Renang Mainan Anak
9	Wisma Alamanda Jl. Raya Air Panas 2	Melati 1	6	20 – 40	-
10	Hotel Sativa Sanggraloka Jl. Raya Pacet Km 3	Bintang 3	211	-	R. Pertemuan Restoran Mainan Anak Lapangan Tenis Kolam Renang
11	Exlesia Desa Pacet	Pondokan	9	-	R. Pertemuan R. Makan Mainan Anak Lapangan Tenis
12	Resio Aloysia	Pondokan	12	-	R. Pertemuan R. Makan Kolam Renang
13	Pondok Anugerah Pacet	Pondokan	8	400	R. Pertemuan Kolam Renang
14	Pondok Bambang Pacet	Pondokan	3	50 – 100	-

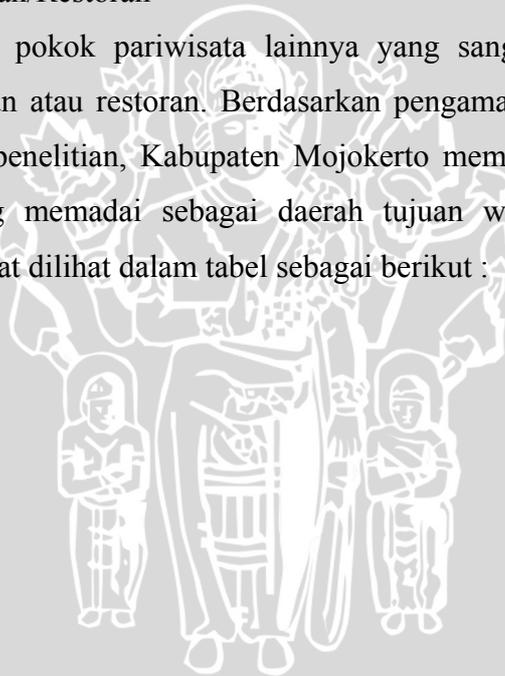
No	Nama Usaha (Alamat)	Kelas	Kamar	Tarif (Rp. 000)	Fasilitas
15	Pondok Perhutani Pacet	Pondokan	5	500	R. Pertemuan Mainan Anak
16	Bethany Pacet	Pondokan	5	-	R. Pertemuan R. Makan Kolam Renang
17	Hotel Holiday Inn Pacet	Melati 1	23	-	-
18	Hotel P5 Jl. Raya Pacet	Melati 1	10	20 - 100	R. Pertemuan K. Renang Mainan Anak R. Makan
19	Padepokan Mahkota Pacet	Melati 1	9	-	-
20	Hotel Grand Trawas Desa Ketapanrame Trawas	Bintang 4	68	300 – 700	R. Pertemuan Restoran K. Renang Lapangan Tenis
21	Padepokan Cahaya Putra D. Ketapanrame Trawas	Melati 3	53	125 – 265	R. Pertemuan K. Renang Lapangan Tenis
22	Hotel History D. Ketapanrame Trawas	Melati 3	35	110 – 625	R. Pertemuan K. Renang
23	Vanda Garden Trawas	Pondokan	5	200 – 400	R. Pertemuan K. Renang
24	Alamanda Trawas	Pondokan	5	200 – 600	R. Pertemuan Mainan Anak K. Renang K. Pancing
25	Villa Bunder Trawas	Pondokan	3	400	R. Makan Mainan Anak
26	Villa Terifi Trawas	Pondokan	2	400	K. Renang Mainan Anak
27	Puri Indah Jl. Raya By Pass	Melati 1	35	-	-
28	Villa Yanto Trawas	Pondokan	2	350	-
29	PPLH Trawas	Pondokan	5	60 - 100	-

Sumber data : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto, 2007.

Berdasarkan tabel di mana dapat diketahui bahwa secara keseluruhan jumlah hotel/penginapan ada 29 buah. Dimana ada 2 hotel jenis bintang, 15 hotel kelas melati, dan 12 jenis pondokan/ villa. Letak dari hotel tersebut kebanyakan berada di sekitar obyek wisata kawasan Pacet dan Trawas sehingga para wisatawan tidak merasa kesulitan apabila beristirahat dan tinggal lebih lama untuk menikmati keindahan obyek wisata tersebut, selain itu juga memberikan keuntungan bagi daerah karena dapat meningkatkan pendapatan daerah. Masing-masing hotel tersebut disertai dengan fasilitas yang memadai dan didukung oleh pemandangan yang indah dan sejuk karena berada di daerah pegunungan.

b) Rumah Makan/Restoran

Sarana pokok pariwisata lainnya yang sangat penting adalah rumah makan atau restoran. Berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan penelitian, Kabupaten Mojokerto memiliki jumlah rumah makan yang memadai sebagai daerah tujuan wisata. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :



Tabel
Rumah Makan atau Restoran di Kabupaten Mojokerto
Tahun 2007

No	Nama Rumah Makan	Alamat
1	Madu Ratna	Jl. Raya Brangkal 268 Sooko
2	Neta Sari atau Nikmat	Gamekan Sooko
3	Asri	Jl. Raya Brangkal 21 Sooko
4	Sari Nusantara	Jl. Raya Brangkal 228 Sooko
5	Duta Baru	Gramekan Sooko
6	Gaya Baru	Jl. Raya Brangkal Sooko
7	Pojok Indah	Jl. Raya Brangkal 264 Sooko
8	Mekar Jaya	Jl. Raya Trowulan
9	Melati	Jl. Jati Pasar Trowulan
10	Tri Asmuni	Jl. Jati Pasar Trowulan
11	Jawa Asli	Jl. Raya Trowulan
12	Wahyu	Jl. Raya Trowulan
13	Nurmaya	Jl. Airlangga 30 Mojosari
14	Rejoyo	Jl. Padukuhan Mojosari
15	Pusat Selera	Jl. Raya Gajah Mada Mojosari
16	Srikandi	Jl. Raya Gajah Mada 120 Mojosari
17	Yuliana	Jl. Brawijaya 7 Mojosari
18	Sari Rasa	Jl. Hayam Wuruk 24 Mojosari
19	Anugerah	Jl. Masjid 5 Mojosari
20	Pantes	Jl. Gajah Mada 62 Mojosari
21	Minang Jaya	Jl. Raya Sidomulyo Bangsal
22	Restu	Jl. Raya Pendowo Ngoro
23	Bu Muk	Jl. Raya Pendowo Ngoro
24	Pecel Madiun	Jl. Raya Pendowo Ngoro
25	Warung Biru	Desa Kembang Sari Ngoro
26	Leshan Dewi Sri	Jl. Raya Gayaman Mojoanyar
27	Leshan Pondok Ikan	Desa Kedung Gede Dlanggu
28	Wisata Desa	Desa Randu Geneng Dlanggu
29	Padepokan Cahaya Putra	Jl. Raya Trawas
30	Lestari	Jl. Airlangga Trawas
31	Asri	Jl. Pahlawan 46 Trawas
32	Polaris	Jl. Trawas
33	Puncak Trawas	Trawas
34	Nuansa Indah	Ubalan Pacet
35	Sari Segar	Jl. Raya Pacet 30 Pacet
36	Purnomo	Jl. Raya Pacet
37	Katon Asri	Jl. Padusan Pacet
38	Shabu	Jl. Raya Pacet
39	Sederhana	Jl. Raya Pacet 43 Pacet

Sumber data : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto, 2007.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui di Kabupaten Mojokerto terdapat 39 rumah makan yang menyediakan berbagai jenis makanan. Rumah makan di Kabupaten Mojokerto rata-rata buka dari jam 07.00 sampai dengan 22.00 WIB. Selain itu beberapa obyek wisata juga terdapat warung makanan sederhana milik masyarakat sekitar lokasi wisata yang menyediakan makanan sederhana dan melayani sampai jam 22.00 WIB untuk hari biasa dan 24 jam untuk malam Minggu.

Pernyataan tersebut seperti yang diungkapkan oleh Ibu Suminah selaku pemilik waruk di obyek wisata Pemandian Air Panas Pacet, “biasanya kami berjualan dari pagi jam 22.00 WIB tapi pada malam Minggu kami buka sampai 24 jam. Karena pada malam Minggu banyak yang datang sampai pagi” (wawancara tanggal 13 Juli 2007).

(2) Prasarana Pariwisata

a) Jalan/Transportasi

Pembangunan prasarana jalan mempunyai fungsi yang sangat penting sebagai urat nadi menuju lokasi obyek wisata. Untuk memperlancar transportasi di Kabupaten Mojokerto telah dibangun 1 terminal besar dan 10 terminal (Trowulan, Kemlagi, Berkucuk, Dinoyo, Lespadangan, Brangkal, Pohjejer, Trawas, dan Pacet). Di masing-masing terminal terdapat angkutan desa yang menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan pengamatan penulis pada saat melakukan penelitian di lapangan bahwa prasarana transportasi khususnya jalan di Kabupaten Mojokerto kurang mendukung dalam rangka pengembangan pariwisata. Jalan menuju obyek wisata sangat sempit sehingga sulit untuk dilalui bus besar sehingga wisatawan yang datang biasanya menggunakan kendaraan pribadi dan sepeda motor. Hal inilah yang menjadi kendala utama dalam pengembangan sektor pariwisata sehingga belum ada biro pariwisata nasional yang menuju Kabupaten Mojokerto.

b) Listrik

Tenaga listrik di Kabupaten Mojokerto dilayani Perusahaan Listrik Negara (PLN). Jaringan listrik PLN sudah menjangkau seluruh wilayah sampai ke pelosok Kabupaten Mojokerto. Tiap tahun terjadi peningkatan jumlah pemakai listrik. Dan berdasarkan pengamatan penulis di lapangan hampir seluruh obyek wisata di Kabupaten Mojokerto sudah menggunakan prasarana listrik yang didistribusikan oleh PLN. Sedangkan obyek wisata yang belum teraliri listrik adalah Air Terjun Cuban Cangu dan Air Terjun Dlundung, tetapi pada kawasan perkemahan di Dlundung sudah ada aliran listrik.

c) Air Bersih

Kebutuhan air bersih di Kabupaten Mojokerto berdasarkan pengamatan penulis masyarakat menggunakan fasilitas air bersih dari PDAM, air sumur dan sumber mata air. Fasilitas air bersih dari PDAM lebih banyak dimanfaatkan masyarakat yaitu pedesaan yang memiliki karakteristik daerah perkotaan dan daerah yang relatif datar.

Untuk pelayanan air bersih dikelola oleh PDAM sedangkan pelayanan didasarkan atas sumber air terdiri dari :

- Sumber Jubel meliputi : Pacet, Kutorejo, Gondang, Jatirejo, Sooko, Bangsal, dan Dlanggu.
- Sumber Mojo meliputi : Kecamatan Pacet
- Sumber Ubalan meliputi : Kecamatan Pacet dan Gondang
- Sumber Sumur Dalam : Kemplagi, Dawar Blandong, Ngoro, Bangsal dan Puri
- Bina Mojosari meliputi : Kecamatan Mojosari dan Pungging

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, hampir seluruh obyek wisata di Kabupaten Mojokerto tidak menggunakan fasilitas air bersih dari PDAM tetapi memanfaatkan sumber mata air khususnya Pacet dan Trawas karena berada di daerah pegunungan.

d) Telekomunikasi

Sarana telekomunikasi daerah di Kabupaten Mojokerto cukup memadai, baik dilihat dari jumlah pelanggan manual dan otomatis. Di samping itu untuk memenuhi kebutuhan jasa telekomunikasi terdapat 5 kantor cabang pelayanan Telkom yaitu pada Kecamatan Ngoro, Mojosari, Mlirip, Dlanggu dan Pacet. Dengan adanya perkembangan teknologi jasa telekomunikasi semakin meningkat yaitu dengan adanya telepon seluler (Ponsel).

Selanjutnya prasarana telekomunikasi lainnya adalah tersedianya pos dan giro sebanyak 13 Kantor Pos Pembantu yang tersebar pada 13 Kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Usaha pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten adalah bekerjasama dengan instansi yang terkait untuk mengembangkan jaringan Telepon Selluler dengan mendirikan tower pada obyek wisata. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan obyek wisata yang dikembangkan sampai saat ini sudah tersedia sarana telekomunikasi misalnya wartel tetapi itu hanya ada satu unit di lokasi wisata. Sedangkan lainnya banyak ditemui di luar obyek wisata.

e) Kesehatan

Prasarana kesehatan yang ada di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2007 untuk melayani seluruh penduduk sudah mencukupi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel
Perkembangan Prasarana Kesehatan di Kabupaten Mojokerto
Tahun 2007

No	Jenis Usaha	Jumlah
1	Rumah Sakit Umum	5 unit
2	Rumah Sakit Bersalin	4 unit
3	Poliklinik	21 unit
4	Puskesmas	27 unit
5	Puskesmas Perawatan	5 unit
6	Puskesmas Pembantu	55 unit
7	Puskesmas Keliling	27 unit
8	Apotik	18 unit
Jumlah		162 unit

Sumber data : Kabupaten Mojokerto Menuju Masa Depan, 2007.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan di Kabupaten Mojokerto terdapat 162 unit kesehatan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan khususnya di kawasan obyek wisata harus ada jaminan bahwa telah tersedia pelayanan memadai agar para wisatawan tidak merasa khawatir untuk berkunjung di kawasan wisata tersebut.

f) Perbankan

Pemerintah telah membangun dan menempatkan bank-bank pemerintah yaitu bank BRI di seluruh Kecamatan yang ada, sedangkan bank yang dikelola swasta juga menunjukkan perkembangan yang baik seperti bank BCA, Bank Mandiri dan sebagainya, hanya saja lokasinya berada di Kota Kabupaten, tidak seberapa jauh dan keberadaannya telah membantu menunjang kepariwisataan

4.3 Analisa Data dan Interpretasi

4.3.1. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mojokerto

Salah satu sektor yang sekarang ini sedang dikembangkan di Kabupaten Mojokerto adalah sektor pariwisata. Dengan harapan kontribusi yang diberikan dari sektor pariwisata meningkat sehingga dapat memberikan peningkatan pendapatan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sektor pariwisata menyumbang rata-rata 2,25% dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto tiap tahunnya. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pendapatan sektor pariwisata adalah jumlah kunjungan wisatawan.

Pendapatan daerah dari sektor pariwisata di Kabupaten Mojokerto diperoleh dari beberapa jenis pendapatan yang menjadi urusan di bidang pariwisata, antara lain Pajak daerah meliputi Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Retribusi Daerah yang meliputi Retribusi pemakaian obyek wisata, Retribusi parkir di obyek wisata. Retribusi Jasa Usaha tempat rekreasi wisata dan olahraga. Berdasarkan data yang disajikan, penerimaan pendapatan dari sektor pariwisata untuk tahun 2004 sebesar Rp. 763.862.221,00, untuk tahun 2005 sebesar Rp. 1.065.811.331,00 dan untuk tahun 2006 terjadi peningkatan pendapatan menjadi Rp. 1.224.630.369,00. Hasil tersebut menandakan bahwa ada peluang peningkatan kembali.

Kontribusi yang diberikan sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah berdasarkan data yang telah disajikan yaitu tahun 2004 sebesar 2,24%, tahun 2005 sebesar 2,19%, sedangkan tahun 2006 sebesar 2,31%. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa kontribusi pendapatan dan sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mojokerto selama tiga tahun terakhir (2004-2006) sebesar 2,25%. Apabila diamati tentang perolehan Pendapatan Asli Daerah selama kurun waktu empat tahun terakhir terlihat menunjukkan kecenderungan peningkatan. Jika tidak terlepas dan faktor yang membuat pendapatan dari sektor pariwisata tersebut mengalami penurunan dikarenakan bencana

alam yang menghancurkan obyek wisata andalan Kabupaten Mojokerto. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sektor pariwisata merupakan sektor yang memiliki pengaruh yang cukup dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Meskipun selama ini banyak sekali faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengembangan sektor pariwisata.

Maksud dan tujuan pengembangan kawasan wisata adalah agar pertumbuhan pariwisata dapat didorong lebih cepat, lebih efisien, terkendali dengan baik dan memperoleh dampak positif yang lebih nyata terhadap kehidupan sosial budaya, ekonomi dan lingkungan. Sasaran pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Mojokerto adalah :

- a. Meningkatkan pembinaan terhadap pengelola obyek wisata.
- b. Meningkatkan sumber daya manusia yang andal dalam kepariwisataan.
- c. Membuat daya tarik kunjungan wisata.
- d. Membuka peluang usaha dan kesempatan kerja bagi masyarakat.
- e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto dalam mengemban visi dan misinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis yakni lingkungan yang mengelilingi dan mempengaruhi perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Faktor-faktor kunci keberhasilan dalam upaya pencapaian misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

- a. Dengan mendayagunakan adanya potensi obyek dan pendukungnya dan dengan memanfaatkan sistem informasi dan promosi melalui elektronik, internet maka akan dapat diwujudkan peningkatan pemasaran secara terarah dan terencana.
- b. Dengan mendayagunakan adanya dana APBD II dan dengan memanfaatkan adanya dukungan dana dari Bank Dunia maka akan dapat diwujudkan peningkatan pengembangan produk pariwisata dan kebudayaan didasarkan sumber alam dan budaya.
- c. Dengan mendayagunakan dana APBD II akan dapat diatasi kurangnya souvenir yang spesifik guna mewujudkan peluang kerja dan memberdayakan pengusaha kecil (ekonomi kerakyatan).

- d. Dengan mengatasi kurangnya sarana promosi yang canggih dan memanfaatkan adanya sistem informasi dan promosi melalui elektro, internet maka akan dapat diwujudkan peningkatan pemasaran yang terencana, terpadu, bertanggung jawab serta berkesinambungan.
- e. Dengan mengatasi kurangnya fasilitas jalan dan sarana transportasi menuju obyek serta sarana komunikasi yang memadai dan memanfaatkan lokasi obyek wisata dekat dengan kota Surabaya dan Lintas Wisata Jakarta – Bali maka akan dapat diwujudkan pengembangan produk pariwisata didasarkan sumber alam dan budaya.
- f. Dengan mengatasi fasilitas jalan, sarana transportasi menuju obyek serta sarana komunikasi yang masih kurang memadai, dan menanggulangi kurangnya Biro Perjalanan Wisata dan akan dapat diwujudkan kenyamanan, keamanan bagi wisatawan dan perlindungan hukum bagi wisatawan.
- g. Dengan mengatasi kualitas pelaksana pembangunan kepariwisataan yang masih rendah dan menanggulangi kurangnya dukungan dan kerjasama pihak ketiga maka akan dapat diwujudkan peningkatan pengembangan kepariwisataan.

Dari berbagai kegiatan yang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto baik kegiatan fisik maupun non fisik dapat direalisasikan semuanya. Bangunan-bangunan fisik untuk melengkapi sarana prasarana pada obyek wisata telah terbangun sementara itu beberapa acara sebagai kegiatan non fisik telah berjalan dengan sukses. Bangunan-bangunan fisik sebagai sarana pada obyek wisata Padusan Pacet dan Makam Troloyo saat ini bertambah jumlahnya dan juga menambah keindahan obyek serta menambah kenyamanan para pengunjung. Jadi kegiatan pembangunan fisik yang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto lakukan telah memberikan kemajuan yang berarti untuk fasilitas kedua obyek di atas. Berbagai kendala bisa teratasi sehingga tidak ada yang menghambat pencapaian target dan sasaran. Hal ini karena Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto senantiasa berkoordinasi dan melakukan sinergi dengan berbagai pihak.

Semua rencana baik fisik maupun non fisik bisa direalisasikan dengan tingkat realisasi mencapai 100%. Dan penggunaan dana yang dialokasikan untuk masing-masing kegiatan dengan keluaran yang dihasilkan mempunyai efisien yang tinggi. Semua kegiatan yang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto lakukan bermuara pada pencapaian tujuan untuk meningkatkan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Mojokerto dan memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat dan pemerintah dalam bentuk meningkatnya pendapatan mereka serta memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan pembangunan Kabupaten Mojokerto secara luas.

4.3.2. Kendala Peningkatan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mojokerto

a. Faktor Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian dikemukakan bahwa ada beberapa faktor pendukung upaya pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Mojokerto yang selanjutnya bisa dianalisis sebagai berikut :

(1) Letak Geografis

Letak Kabupaten Mojokerto pada posisi silang antara Yogyakarta dengan Pulau Bali yang sangat menguntungkan. Karena posisinya yang berada di tengah-tengah kedua daerah tersebut, maka Kabupaten Mojokerto berpeluang menjadi daerah transit bagi wisatawan. Posisi silang yang menguntungkan ini juga didukung kondisi alam yang sejuk dengan berbagai pemandangan dan panorama yang indah yang sangat menjanjikan bagi pengembangan pariwisata.

(2) Pengembangan Sarana Penginapan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana penginapan mengalami perkembangan yang sangat baik dengan kondisi dan fasilitas yang memadai dan dilihat dari kualitas bangunan dan kebersihan sudah memenuhi standar kelayakan

sebuah penginapan. Dari keterangan di atas dapat diartikan bahwa upaya pengembangan sektor pariwisata sudah berjalan lancar.

(3) UU No 9 Tahun 1990 Tentang Pariwisata

Dengan diberlakukannya Undang-undang tersebut Kabupaten Mojokerto merasa terdorong untuk mengembangkan potensi daerah pada sektor pariwisata. Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pengembangan pariwisata sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto akan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang berkenaan dengan sektor pariwisata.

(4) Adanya Potensi Pariwisata Seni dan Budaya

Berdasarkan sejarah Kabupaten Mojokerto merupakan daerah peninggalan kerajaan Mojopahit yang memiliki kesenian dan kebudayaan yang beragam. Sehingga dengan adanya potensi tersebut apabila dikembangkan bisa menjadi wisata unggulan di Kabupaten Mojokerto.

b. Faktor-faktor Penghambat

(1) Adanya keterbatasan dana yang tersedia

Sulitnya pengalokasian dana bagi pengembangan sektor pariwisata yang pada sisi lain berbenturan dengan pengembangan beberapa sektor lainnya akan menjadi penghambat bagi pengembangan sektor pariwisata. Namun Pemerintah Kabupaten Mojokerto harus bijaksana mengupayakan secara maksimal dana bagi pengembangan sektor pariwisata, sebab pada sektor ini menjanjikan prospek yang menguntungkan bagi peningkatan PAD.

(2) Kualitas Pelaksana Pengembangan Pariwisata masih rendah

Berdasarkan pengamatan peneliti pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto hampir secara keseluruhan tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang pariwisata. Secara otomatis pengetahuan yang dimiliki pegawai dalam bidang

pariwisata masih sangat kurang dan kualitasnya masih sangat rendah. Sehingga kurangnya profesionalisme pegawai dalam melaksanakan pengembangan pariwisata yang berkembang dengan cepat.

(3) Fasilitas Jalan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa fasilitas jalan menuju obyek wisata masih kurang dari standar sebagai daerah tujuan wisata. Hal ini disebabkan jalan yang terlalu sempit sehingga tidak bisa buat simpangan. Oleh karena itu para wisatawan yang datang kebanyakan hanya menggunakan sepeda motor dan mobil pribadi. Hal inilah yang menjadi penyebab promosi pariwisata di Kabupaten Mojokerto hanya dalam negeri dan tidak ada biro perjalanan wisata di Kabupaten Mojokerto.

(4) Pengemasan Produk wisata masih kurang

Berdasarkan pengamatan peneliti sampai saat ini produk yang ada belum bisa menjadikan daerah Kabupaten Mojokerto menjadi daerah wisata yang diminati wisatawan terutama mancanegara. Hal ini dikarenakan produk seni dan budaya yang ada tersebut belum bisa dikemas dengan baik yang menunjukkan ciri khas dan Kabupaten Mojokerto yang membedakan dengan daerah yang lain.

4.3.3. Upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Pariwisata

Kabupaten Mojokerto sebagai salah satu Kabupaten yang ada di Jawa Timur yang memiliki obyek beragam obyek wisata serta keanekaragaman kesenian dan kebudayaan karena itu Kabupaten Mojokerto bisa disebut sebagai Daerah tujuan Wisata.

Berdasarkan data yang dihimpun peneliti, dapat dianalisis dan diinterpretasikan bahwa jenis-jenis wisata yang ada di Kabupaten Mojokerto meliputi Wisata Alam, Wisata purbakala, Wisata Seni dan

Budaya. Dan sekian banyak potensi wisata yang ada, ada 8 obyek wisata yang sudah dikelola dan ditangani dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Dalam hal ini sebagai pelaksananya adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto.

Dari semua potensi yang ada tersebut apabila dikelola dan dikembangkan dengan maksimal akan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan PAD dan juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar obyek wisata.

Berdasarkan pengamatan peneliti selama melakukan penelitian dan semua potensi yang ada baru 8 obyek saja yang dikelola dan dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto. Dengan alasan adanya keterbatasan dana sehingga untuk pengembangan obyek wisata lain memerlukan waktu yang bertahap. Selain itu faktor pendukung wisata yang lain seperti kerajinan cinderamata, makanan khas serta produk-produk unggulan yang lain belum bisa dikembangkan dengan optimal sehingga belum mencirikan kekhasan Kabupaten Mojokerto. Oleh karena itu diperlukan pengembangan lebih intensif terhadap potensi wisata yang ada tersebut agar memberikan kontribusi yang maksimal kepada pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah mengupayakan berbagai jenis pengembangan sektor pariwisata antara lain sebagai berikut :

a. Peningkatan Pemasaran dan Promosi Wisata

Dalam mencapai sasaran pengembangan pariwisata salah satu strategi dasar yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah adalah promosi atau pemasaran pariwisata.

Menurut Wahab (1989:158) mengatakan tiga tujuan yang harus dicakup dalam promosi adalah :

- (1) Memperkenalkan produk wisata seluas mungkin
- (2) Menyusun produk itu agar sedapat mungkin menarik
- (3) Menyampaikan isi pesan yang menarik tanpa harus berbohong

Pengembangan kegiatan Pemasaran dan Promosi wisata merupakan faktor penentu keberhasilan pariwisata. Apabila promosi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan menarik akan berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung sehingga dapat meningkatkan pula kontribusi yang diberikan terhadap PAD di Kabupaten Mojokerto. Adapun upaya yang dilakukan dalam melakukan kegiatan promosi wisata meliputi:

- (1) Membentuk Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) sekitar obyek wisata dengan maksud untuk menciptakan kesamaan persepsi gerak dan langkah dan masyarakat, pihak swasta dan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata di daerahnya. Sedangkan tujuannya adalah agar POKDARWIS menjadi kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat yang berfungsi untuk meningkatkan usaha para anggotanya, untuk pengembangan obyek wisata daerah dan pembangunan pariwisata nasional. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah mengadakan pembinaan kepada pemilik hotel dan restaurant se-wilayah Kabupaten Mojokerto dengan harapan pengetahuan mereka bertambah sehingga pelayanan mereka kepada para tamu juga meningkat dengan demikian para tamu/pengunjung akan puas dan mengagendakan untuk berkunjung ke tempat mereka lagi untuk lain kesempatan. Adapun biaya yang telah dikeluarkan dalam pembinaan tersebut pada tahun 2006 yaitu sebesar Rp. 5.000.000,-
- (2) Pembuatan leaflet, booklet, majalah yang disebar ke berbagai media. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga telah menerbitkan buku saku yang berisi nama-nama rumah makan dan hotel di Kabupaten Mojokerto sebagai referensi bagi para pengunjung. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga telah membuat informasi mengenai berbagai obyek di wilayah Kabupaten Mojokerto

semakin luas dikenal masyarakat melalui brosur dan juga pembuatan VCD serta promosi lewat radio dan berbagai media cetak. Sementara dampak dari pembangunan kepariwisataan yang dilakukan bisa dirasakan baik-baik oleh masyarakat sekitar obyek maupun oleh Pemerintah Daerah. Masyarakat sekitar obyek semakin banyak yang membuka kios atau stan untuk berdagang, ini suatu indikator baik atas upaya yang telah kami lakukan dan juga kami telah mampu memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

- (3) Mengadakan promosi pariwisata ke daerah lain. Agar daya tarik yang ada di setiap obyek wisata di Kabupaten Mojokerto dapat menarik wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara untuk berkunjung dilakukan upaya untuk memperkenalkan melalui berbagai informasi dan promosi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka mempromosikan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Mojokerto dengan pameran seni dan budaya Kabupaten Mojokerto. Dan untuk meningkatkan arus kunjungan wisata dilakukan kerjasama promosi dengan pihak swasta dan dengan instansi pemerintah lainnya melalui pembangunan sarana promosi, pelayanan informasi dan melakukan penyuluhan dalam meningkatkan peran serta masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka promosi pariwisata tersebut adalah bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan pariwisata nasional perlu adanya promosi mengenai segala sesuatu tentang pariwisata yang dapat menimbulkan minat seseorang untuk melakukan perjalanan wisata, dan promosi pariwisata harus disusun secara terpadu, dijamin dan mudah dimengerti sehingga memberikan kejelasan mengenai kepariwisataan, dan untuk meningkatkan jumlah pengunjung wisata di wilayah tersebut. Dalam rangka

kegiatan promosi kepariwisataan ini adalah publikasi atau media. Dengan demikian nantinya diharapkan pariwisata di Kabupaten Mojokerto dapat semakin berkembang, yang mana hal ini akan banyak membantu dalam menambah pemasukan daerah.

- (4) Menyelenggarakan Tour Musik Wisata. Dengan pariwisata yang maju akan mendatangkan pengunjung dari dalam maupun luar daerah yang melimpah, kunjungan mereka memberikan masukan sebagai masyarakat sekitar obyek yang berjualan, pengusaha tempat penginapan, pengusaha biro-biro perjalanan dan lain-lain.
- (5) Mengikuti gelar wisata di TMII Jakarta, pameran dan Festival Wisata. Kegiatan tersebut sebagai instrumen untuk menyebarluaskan informasi pariwisata Kabupaten Mojokerto kepada masyarakat agar berminat berkunjung ke Kabupaten Mojokerto.

Dari keseluruhan upaya yang telah dilakukan dalam melaksanakan promosi pariwisata di Kabupaten Mojokerto menurut pengamatan peneliti masih perlu ditingkatkan frekuensinya lebih lanjut untuk menarik wisatawan nusantara maupun mancanegara. Dengan demikian pariwisata Kabupaten Mojokerto dapat semakin berkembang dan membantu dalam menambah pendapatan daerah serta menunjang sektor lain di daerah setempat

b. Pengembangan obyek dan daya tarik wisata

Dalam rangka pengembangan obyek dan daya tarik wisata menurut Mussanef (1995:176), perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Kemampuan mendorong peningkatan dan perkembangan kehidupan ekonomi sosial budaya.
- (2) Nilai-nilai agama, adat-istiadat pandangan dan nilai hidup dalam masyarakat.
- (3) Kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup.

(4) Kelangsungan usaha itu sendiri.

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Mojokerto tidak dapat berjalan dengan sukses apabila tidak disertai dengan obyek wisata yang memiliki daya tarik tersendiri dihandingkan dengan daerah lain. Oleh karena itu diperlukan pengembangan terhadap obyek dan daya tarik wisata.

Sesuai dengan teori di atas ternyata apabila dikaitkan dengan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa telah dilakukan pengembangan terhadap obyek dan daya tarik tersebut, akan tetapi pengembangan tersebut belum terlaksana dengan baik sesuai program yang telah ditetapkan, mengingat adanya keterbatasan dana yang tersedia. Sehingga dalam pengembangan daya tarik tersebut perlu ditingkatkan lagi agar dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata yang ada di Kabupaten Mojokerto.

c. Pengembangan Sarana dan Prasarana

Menurut Yoeti (1997:194) yang termasuk dalam sarana pariwisata adalah :

- (1) Sarana Pokok Pariwisata adalah perusahaan yang hidup dan sangat tergantung pada lalu lintas wisatawan yang melakukan wisata yang termasuk adalah : hotel, losmen, wisma, restoran dan rumah makan.
- (2) Sarana pelengkap pariwisata adalah fasilitas-fasilitas yang dapat melengkapi sarana pokok sehingga fungsinya membuat wisatawan lebih lama tinggal di daerah tujuan wisata. Yang termasuk kelompok ini adalah sarana olahraga dan tempat untuk beribadah.
- (3) Sarana penunjang pariwisata adalah fasilitas yang diperlukan untuk menunjang sarana pokok dan sarana pelengkap yang fungsinya agar wisatawan lebih banyak membelanjakan uangnya di tempat yang dikunjungi yang termasuk kelompok ini adalah keberadaan pasar seni untuk menjual berbagai hasil kerajinan masyarakat.

Dalam melakukan pengembangan sarana dan prasarana tersebut Pemerintah Kabupaten Mojokerto bekerjasama dengan berbagai pihak yaitu masyarakat dan swasta serta sektor terkait lainnya. Usaha pengembangan sarana dan prasarana terhadap kawasan wisata Kabupaten Mojokerto antara lain :

(1) Sarana pokok pariwisata

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa keberadaan sarana pokok pariwisata di Kabupaten Mojokerto yang meliputi Hotel/ penginapan dan Rumah Makan sudah sangat mencukupi. Karena hampir di kecamatan tiap obyek wisata tersedia sarana tersebut. Fasilitas yang disediakan oleh hotel dan rumah makan yang ada sudah mencukupi dan keadaan bangunannya sudah baik dan bersih.

Dengan adanya sarana tersebut menjadikan para wisatawan tidak merasa kesulitan apabila ingin mencari tempat untuk beristirahat dan untuk tinggal lebih lama dalam menikmati keindahan obyek wisata yang ada. Selain itu juga menguntungkan bagi pemerintah setempat karena akan memberikan peningkatan pendapatan bagi daerah setempat.

Pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto hanya sebatas memberikan penyuluhan dan bimbingan saja bagi pihak Hotel dan Rumah Makan agar bisa memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada para wisatawan agar mereka merasa senang dan berkeinginan untuk kembali lagi datang berkunjung.

(2) Prasarana Pariwisata

Sedangkan prasarana pariwisata masih menurut Yoeti (1997:186) dibagi dua kelompok yaitu:

a) Prasarana perekonomian yang terdiri dari

1. Pengangkutan (transportasi) yang termasuk adalah jalan dan angkutan

2. Prasarana Komunikasi yang termasuk adalah telepon, telegram, radio televisi dan lain-lain.
 3. Perbankan
 4. Prasarana Utilitas Meliputi Listrik dan Air Bersih,
- b) Prasarana Sosial adalah semua faktor yang menunjang kemajuan atau menjamin kelangsungan prasarana perekonomian adalah :
1. Pelayanan kesehatan
 2. Petugas yang melayani wisatawan misalnya : Polisi, Pramuwisata.
 3. Faktor keamanan dan kenyamanan

Prasarana yang tersedia di sektor Pariwisata Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

a) Prasarana jalan / Transportasi

Berdasarkan data yang diperoleh sebenarnya untuk prasarana jalan di Kabupaten Mojokerto sudah dalam keadaan baik karena sudah hampir seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto sudah diaspal sampai ke pelosok. Dan untuk transportasi sudah tersedia 10 terminal yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto.

Akan tetapi berdasarkan pengamatan peneliti keadaan jalan menuju obyek wisata belum memenuhi standar sebagai Daerah Tujuan Wisata karena jalan yang tersedia sangat sempit yang mengakibatkan kendaraan roda empat yang melewatinya tidak bisa bersimpangan. Selama ini para wisatawan yang berkunjung hanya memakai sepeda motor dan kendaraan pribadi saja. Hal inilah yang menjadi penyebab juga tidak adanya Biro Perjalanan Wisata yang memakai Kabupaten Mojokerto sebagai tujuan wisata.

Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Mojokerto harus mengadakan pengembangan jalan yang ada tersebut sehingga memenuhi standar sebagai daerah Tujuan Wisata. Padahal sarana jalan merupakan Prasarana yang sangat penting dalam usaha perkembangan sektor pariwisata.

b) Prasarana Listrik

Berdasarkan pengamatan peneliti selama di lapangan bahwa prasarana listrik sudah menjangkau daerah Kabupaten Mojokerto. Dan obyek wisata di Kabupaten Mojokerto hampir seluruhnya telah menggunakan fasilitas tersebut, hanya saja pada obyek wisata air terjun Cuban Cunggu dan Air Terjun Dlundung belum teraliri listrik. Akan tetapi untuk wilayah perkemahan sudah ada aliran listrik.

c) Prasarana Air Bersih

Kabupaten Mojokerto menggunakan PDAM sebagai pemasok air bersih. Berdasarkan pengamatan peneliti hampir seluruh obyek wisata di Kabupaten Mojokerto untuk pelayanan air tidak menggunakan air bersih dan PDAM tetapi memanfaatkan sumber mata air yang ada. Obyek wisata yang menggunakan air bersih dan PDAM adalah kawasan Trowulan sedangkan lainnya menggunakan sumber mata air karena berada di wilayah pegunungan.

d) Prasarana Telekomunikasi

Berdasarkan data hasil penelitian bahwa di lokasi obyek wisata belum tersedia prasarana telekomunikasi yang mencukupi karena dan 8 obyek yang dikembangkan hanya 2 lokasi yang tersedia wartel. Hal ini menyebabkan para wisatawan mengalami kesulitan untuk melakukan komunikasi. Dengan adanya hal tersebut sehingga pemerintah setempat melakukan pengembangan dengan pihak-pihak terkait untuk menambah jaringan / membangun tower di lokasi wisata agar

para wisatawan mudah dalam melakukan komunikasi di obyek wisata.

e) Prasarana Kesehatan

Prasarana kesehatan yang tersedia di Kabupaten Mojokerto sudah sangat mencukupi. Karena masing-masing kecamatan sudah ada puskesmas. Untuk obyek wisata di Kabupaten Mojokerto berdasarkan data hasil penelitian bahwa belum dibangun dan disediakan pos khusus kesehatan untuk melayani kebutuhan kesehatan wisatawan yang berkunjung di obyek wisata tetapi pada hari libur saat pengunjung ramai disediakan petugas kesehatan yang diambilkan dari unit kesehatan terdekat.

f) Prasarana Keamanan

Berdasarkan hasil data yang diperoleh bahwa di tiap-tiap obyek wisata sudah tersedia petugas keamanan yang tergabung menjadi satu dengan pos retribusi. Pelayanan keamanan di lokasi pariwisata dilaksanakan atas kerja sama dan koordinasi dengan kepolisian terdekat, Koramil dan BABINSA. Selain itu juga disediakan rambu-rambu tanda bahaya karena mengingat daerah-daerah tertentu di obyek wisata rawan akan tanah longsor.

g) Prasarana Perbankan

Berdasarkan hasil data yang diperoleh bahwa seluruh lokasi obyek wisata belum tersedia prasarana perbankan. Sehingga para wisatawan merasa kesulitan apabila memerlukan uang untuk kebutuhan mendadak. Sehingga harus keluar terlebih dahulu di daerah terdekat. Seharusnya Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagai daerah tujuan wisata mengupayakan tersedianya prasarana tersebut.

d. Pengembangan Kemampuan Pegawai sebagai Pelaksana Pengembangan Pariwisata

Untuk mengelola pemasukan yang diterima dan obyek pariwisata, diperlukan sumber daya manusia yang memadai, karena sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mengelola penerimaan pendapatan daerah. Pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memberikan penataran dan penyuluhan terhadap pegawai yang ada di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto dan melakukan studi banding ke kota lain yang lebih maju daripada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dalam penataran dan penyuluhan tersebut, salah satunya membahas tentang pengelolaan penerimaan retribusi dan obyek pariwisata tersebut, sehingga pengetahuan akan pengelolaan penerimaan dari sektor pariwisata dapat diketahui oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto. Dalam meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan retribusi secara umum dan hasil penerimaan dan obyek wisata khususnya, maka pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terus berusaha meningkatkan kemampuan kinerja para pegawainya melalui penataran dan penyuluhan di lingkungan kerjanya. Menurut pengamatan peneliti, perlu adanya penataran dan penyuluhan bagi para pegawai sangat penting dalam meningkatkan kualitas pegawai dalam mengelola retribusi secara umum. Tentang pengelolaan obyek wisata yang ada di Kabupaten Mojokerto, pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak hanya menerima retribusi secara mentah saja, namun pemerintah Kabupaten juga menetapkan beberapa target yang ditetapkan dalam obyek wisata tersebut. Untuk meningkatkan pendapatan dan obyek wisata itu pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga melakukan kerjasama dengan Dispenda Kabupaten Mojokerto untuk melakukan penyuluhan dan pembinaan

bagi para pegawai secara umum yang harus dapat memahami sektor retribusi obyek wisata.

Agar pengembangan pariwisata di Kabupaten Mojokerto berhasil dengan baik maka diperlukan kualitas pegawai tentang pariwisata. Adapun langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam mengembangkan pegawai sebagai berikut:

- (1) Dengan diadakan DIKLAT Teknis pariwisata dan kebudayaan, karena hampir seluruh pegawai di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang pariwisata.
- (2) Dengan mengikuti seminar dan kursus-kursus yang berhubungan dengan pariwisata yang diadakan baik di dalam maupun diluar daerah.

Dengan adanya langkah-langkah yang diambil tersebut diharapkan terdapat peningkatan kualitas dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan. Selain itu tercipta profesionalisme kerja, kesesuaian langkah dan gerak dengan perkembangan industri pariwisata yang semakin pesat. Menurut pengamatan peneliti langkah-langkah tersebut di atas belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena belum secara keseluruhan pegawai tersebut mengikuti kegiatan itu yang disebabkan adanya keterbatasan dana.

e. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan

Dengan adanya latar belakang Kabupaten Mojokerto sebagai daerah peninggalan kerajaan Mojopahit yang memiliki beragam peninggalan kesenian dan kebudayaan. Apabila hal tersebut dapat dikembangkan dengan baik akan menjadi fenomena yang menarik untuk dinikmati. Dan usaha pengembangan yang telah dilakukan menurut pengamatan peneliti sudah mengalami peningkatan karena sering diadakan atraksi seni dan budaya di Kabupaten Mojokerto.

f. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Swasta

Cohen dan Up Hoff (Ibnu Syamsi, 1986:114) menyebutkan “partisipasi merupakan keterlibatan nyata orang-orang dalam pembuatan mengenai apa yang dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Juga diartikan sebagai keterlibatan dalam menikmati hasil serta partisipasi mereka dalam melakukan evaluasi.”

(1) Partisipasi Masyarakat

Pengembangan pariwisata akan berhasil dengan baik apabila ada hubungan kerjasama yang baik antara pemerintah setempat dengan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya partisipasi masyarakat. Karena pengembangan pariwisata berdampak secara langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar obyek wisata. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui POKDARWIS.

Dan keseluruhan usaha yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan partisipasi masyarakat menurut pengamatan peneliti masih perlu ditingkatkan frekuensi kegiatannya karena masih banyak masyarakat yang belum melaksanakan POKDARWIS.

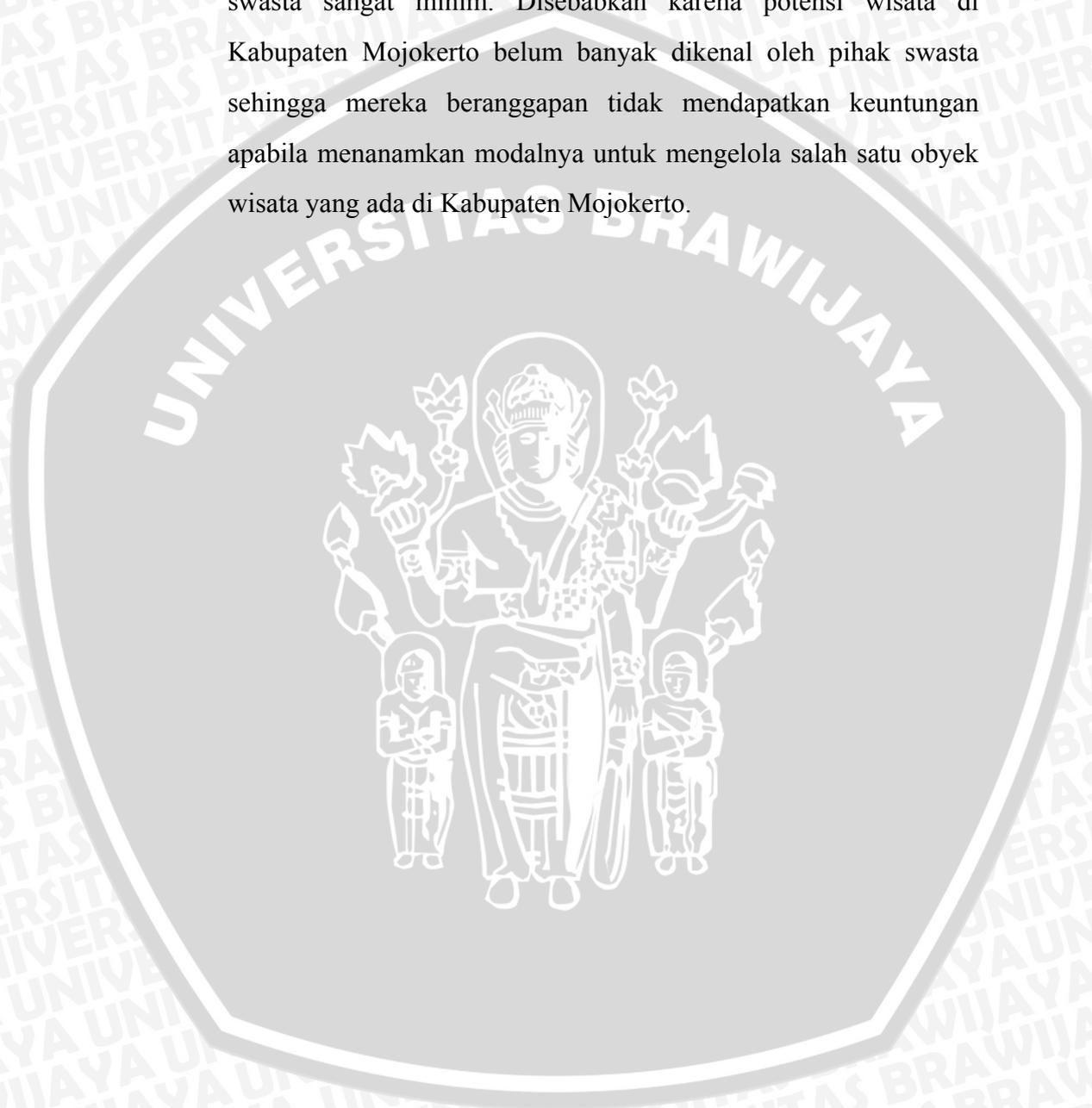
(2) Partisipasi Swasta

Dalam mengembangkan potensi pariwisata di Kabupaten Mojokerto diperlukan dana yang besar. Padahal dana yang tersedia sangat terbatas. Oleh karena itu diperlukan adanya partisipasi dan pihak swasta untuk menanamkan modalnya sehingga pengembangan yang dilakukan dapat berjalan secara optimal.

Akan tetapi menurut pengamatan peneliti upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Mojokerto belum mendapatkan hasil yang maksimal. Karena sampai saat ini belum ada pihak swasta yang menanamkan modalnya pada pengembangan pariwisata di Kabupaten Mojokerto. Pihak swasta cenderung mengelola dan menanamkan modalnya untuk usaha sarana wisata

saja seperti hotel dan restoran. Sedangkan untuk pengelolaan dan pengembangan pariwisata masih sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto sendiri.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa peran swasta sangat minim. Disebabkan karena potensi wisata di Kabupaten Mojokerto belum banyak dikenal oleh pihak swasta sehingga mereka beranggapan tidak mendapatkan keuntungan apabila menanamkan modalnya untuk mengelola salah satu obyek wisata yang ada di Kabupaten Mojokerto.



BAB 5 PENUTUP

5.1. Kesimpulan

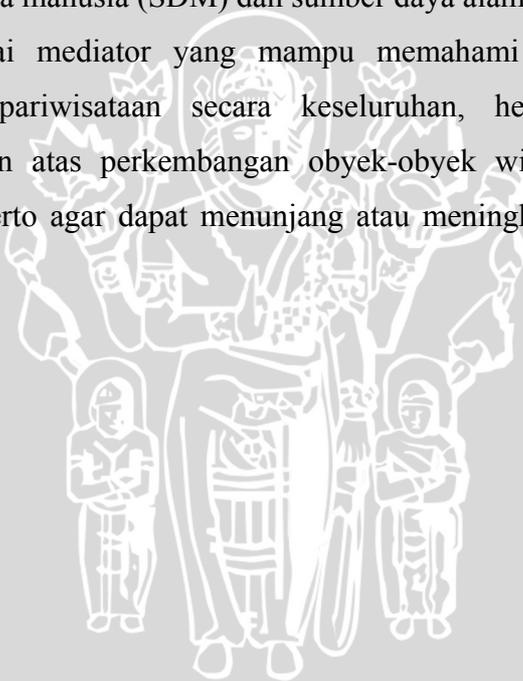
Berdasarkan hasil analisis maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari retribusi obyek wisata tahun 2004 sebesar 2,24%, tahun 2005 sebesar 2,19%, dan tahun 2006 sebesar 2,31%. Sedangkan rata-rata kontribusi pendapatan dan sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mojokerto selama tiga tahun terakhir (2004-2006) yaitu sebesar 2,25%.
- 2) Faktor pendukung dalam pengembangan pariwisata yaitu Kabupaten Mojokerto didukung kondisi alam yang sejuk dengan berbagai pemandangan dan panorama yang indah, kondisi dan fasilitas penginapan yang memadai, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pengembangan pariwisata, dan adanya potensi pariwisata seni dan budaya. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah adanya keterbatasan dana yang tersedia, kualitas pelaksana pengembangan pariwisata masih rendah, fasilitas jalan menuju obyek wisata masih kurang dari standar karena terlalu sempit sehingga tidak bisa buat simpangan, dan pengemasan produk wisata masih kurang.
- 3) Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan pengembangan sektor pariwisata yaitu dengan peningkatan pemasaran dan promosi wisata, pengembangan obyek dan daya tarik wisata, pengembangan sarana dan prasarana, dan pengembangan kemampuan pegawai sebagai pelaksana pengembangan pariwisata.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan sektor retribusi obyek wisata, adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun Rencana Strategis dan Kebijakan untuk membangun arah serta strategi yang tepat dan terinci masing-masing obyek wisata yang ada dengan memperhatikan terhadap pengelolaan retribusi obyek wisata dan sektor Pariwisata.
- 2) Peningkatan sumberdaya manusia yang mengelola dan berkecimpung dalam bidang kepariwisataan.
- 3) Peningkatan penanganan secara profesional dalam penyediaan sarana dan prasarana agar dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- 4) Mengadakan pembinaan terhadap pengelolaan obyek wisata agar terwujud tertib administrasi secara teratur dan rapi.
- 5) Pentingnya peran Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam memperhatikan potensi sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA).
- 6) Pemerintah sebagai mediator yang mampu memahami pengelolaan dan perkembangan kepariwisataan secara keseluruhan, hendaknya tanggap terhadap perubahan atas perkembangan obyek-obyek wisata yang ada di Kabupaten Mojokerto agar dapat menunjang atau meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini. 1993. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Adurrachman. 1991. *Ekonomi Makro*. AMP YKPN. Yogyakarta.
- Damarjati, *Istilah-istilah Dunia Pariwisata*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Dinas Pariwisata Daerah, 1999. *Pelangi Wisata dan Seni Budaya Mojokerto*.
- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Karyono, Hari A, 1997. *Kepariwisata*. Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Kompas*, 17 Maret 2004.
- Kristiati, J. B, 1996. *Masalah Sekitar Pendapatan Daerah*. Prisma LP3ES.
- LAKIP, (Laporan Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan).
- Miles, Mattew, B,S, Huberman, A, Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*: Buku Sumber Metode-metode Baru, Terjemahan Tjejep Rohendi Rohidi, Cetakan I. Jakarta : UI Press.
- Moleong, 1994. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Mussanef, 1995. *Manajemen Pariwisata Indonesia*. Jakarta: Tokjo Agung.
- Mardiasmo, 1995. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nazir, Moh, 1999. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ndrahu, Sunarto, 1983. *Mendayagunakan Potensi Pariwisata Untuk Pembangunan Nasional*. Jakarta: CSIS.
- Pamudji. 1983. *Ekologi Administrasi Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- , 1983. *Kerjasama Antar Daerah Dalam Rangka Pembinaan Wilayah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Pendit, Nyoman, S. 1994. *Ilmu Berwisata Sebuah Pengantar*. Jakarta: Pradya Paramita.
- PERDA No. 3 Kabupaten Mojokerto Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Poerwadarminta, WJS. 1989. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

RENSTRA (Rekapan Strategi Administrasi) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto. 2006.

Siagian P. Sondang. 1984. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.

Sihite, Richard. 1997. *Guiding Technique*, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.

Soekanto. S. 1987. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali.

Spillane, James, J, 1994. *Pariwisata Indonesia Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*. Yogyakarta.

Suwantoro, Gamal. 1997. *Dasar-dasar Pariwisata*, Cetakan pertama, Andi, Yogyakarta

Thoha, Miftah. 1986. *Dimensi-dimensi Prima Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali.

Undang-undang No.9 Tentang *Pariwisata*.

Undang-undang No. 18 Tahun 1997 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang *Otonomi Daerah*.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Undang-undang No. 34 Tahun 2001 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Yoeti, H, Oka, A 1997. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

_____ 1990. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Cetakan Kedua. Angkasa, Bandung

LEMBAR PERSETUJUAN

**DATA PETUGAS/PENANGGUNG JAWAB SURVEY/ RESEARCH/PKL/
KKN/PENELITIAN DI KABUPATEN MOJOKERTO**

Nama Lengkap Penanggung Jawab	: Joni Majaali
Nama Unit Instansi/Organisasi	: Universitas Brawijaya Malang
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat Lengkap dan Nomor Telepon	: Suaratan Gg IV/8A Mojokerto/ Tlp: 0321390449
Tema Survey/Research	: Upaya Peningkatan Pendapatan Sektor Pariwisata Kab. Mojokerto Sebagai Salah Satu Sumber PAD
Maksud dan Tujuan Survey/Research	: Sebagai Sumber Data Dalam Pembuatan Skripsi
Tempat Obyek/Daerah/Lokasi/Kecamatan	: Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kab. Mojokerto
Lama survey/Rescarch	: 1 Bulan
Terhitung Mulai Tanggal	: 11 Juli 2007 S/D 11 Agustus 2007
Jumlah Peserta Survey/Research	: 1 Orang

Mojokerto, 11 Juli 2007

Penanggung Jawab



CATATAN/PERTIMBANGAN:

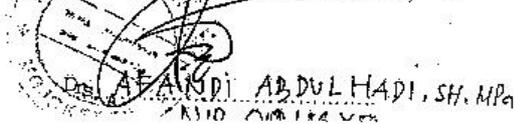
KEBERATAN/TIDAK KEBERATAN*) dilaksanakan adanya Survey/Research/PKL/KKN /Penelitian

Nomor : 556/461/416-109/2007

Tanggal : 31-7-2007

Mojokerto, 11 Juli 2007

Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Camat*)



DR. AEFANUDDIN ABDULHADI, SH. MPi





PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BIDANG KAJIAN STRATEGIS (KASTRA)
 JL. A. Yani No. 16 Telp. (0321) 321953 E-mail : *kastra_ksbngkabmr@yahoo.com*
 Mojokerto 61318

SURAT - KETERANGAN

Untuk melakukan Survey/Research/PKL/KKN/Penelitian
 Nomor : 072/ 500 /416-205/2007

- Membaca : 1. Surat dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Nomor : 3694/J.10/1.14/PG/2007 Tanggal 29 Juni 2007 tentang Riset.
 2. Disposisi dari Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 556/6390/416-205/2007 tanggal 3 Juli 2007 tentang Izin Penelitian.
 3. Pertimbangan dari Dinas Pariwisata Nomor 556/461/416-109/2007 Tanggal 11 Juli 2007 tentang Tidak Keberatan dilakukan Survey/Research/PKL/KKN/Penelitian.

- Mengingat : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1972
 2. Surat Gubernur KDH Tingkat I Jatim tanggal 17 Juli 1972 Nomor. Gub 187/1972

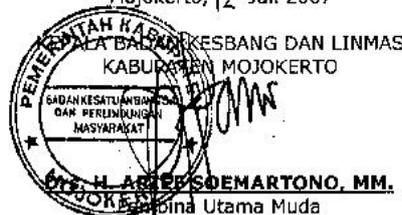
Dengan ini menyatakan **TIDAK KEBERATAN** dilakukan Survey/Research/PKL/KKN/Penelitian Oleh :

Nama Penanggung Jawab : **JONI MAJALI**
 Alamat : Suratan Gang VI/8A Mojokerto, 0321390449.
 Tema acara/Survey/Research : Upaya Peningkatan Pendapatan Sektor Pariwisata Kab. Mojokerto sebagai Salah Satu Sumber PAD.
 Maksud dan Tujuan Penelitian : Sebagai Sumber Data Dalam Pembuatan Skripsi.
 Daerah tempat dilakukan Penelitian : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Mojokerto.
 Lamanya survey/Penelitian : 1 (Satu) Bulan terhitung mulai tanggal 12 Juli s/d 12 Agustus 2007.
 Peserta/Pengikut Penelitian : -

DENGAN KETENTUAN - KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 Jam setelah di tempat yang dituju diwajibkan melapor kedatangannya kepada Camat dan Kepolisian setempat.
2. Mentaati Ketentuan - ketentuan yang berlaku dalam daerah hukum Pemerintah Daerah setempat.
3. Menjaga Tata Tertib keamanan, kesopanan dan kesucilaan menghindari pernyataan pernyataan baik dengan lisan maupun tulisan yang dapat melukai/menyinggung perasaan, menghina agama bangsa dan negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada Tema tersebut.
5. Setelah berakhir melaksanakan survey/research/PKL/Penelitian, diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah daerah setempat mengenai selesainya pelaksanaan Survey/Research /PKL/KKN/Penelitian sebelum meninggalkan daerah tempat Survey/Research/PKL/KKN/Penelitian.
6. Dalam jangka waktu 1 bulan setelah dilaksanakan Survey/Research/PKL/KKN/Penelitian diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasil - hasilnya kepada Bapak Bupati Mojokerto Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan perlindungan Masyarakat Kabupaten Mojokerto.
7. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Mojokerto, 12 Juli 2007



- Tembusan : Disampaikan Kepada :
- Yth. : 1. Bpk. Bupati Mojokerto (sebagai Laporan),
 2. Sdr. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Mojokerto;
 3. Sdr. Yang Bersangkutan.

H. Agus Soemartono, MM.
 Kepala Bidang Utama Muda
 NIP. 510 129 439

